

SERI ADMINISTRASI NEGARA

BIROKRASI

Lukman Arif
Arimurti Kriswibowo

Penerbit Sasanti Institute

Halaman ini dibiarkan kosong

BIROKRASI

Tim Penyusun : Lukman Arif dan Arimurti Kriswibowo

ISBN : 978-602-53124-2-7

Penerbit : SASANTI INSTITUTE

Alamat Redaksi :

Jl. Lesanpura 498 Teluk, Purwokerto Selatan.

Banyumas. Indonesia 53145

Telp: 085526003330

E-mail: sasanti.institute@gmail.com

Cetakan Pertama. 2018

©**Sasanti Institute**. Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun termasuk didalamnya menjiplak sebagian ataupun seluruh bagian tanpa izin tertulis dari penerbit

Halaman ini dibiarkan kosong

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya penyusun dapat menyelesaikan buku ini tepat pada waktunya. Adapun judul dari buku ini adalah "Birokrasi" dengan tujuan untuk memaparkan kekhasan organisasi birokrasi, karakter, pola-pola perilaku serta kaitannya dengan kajian bela negara kepada para pembaca secara khusus mahasiswa administrasi negara dan akademisi pada umumnya. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan buku ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusunan buku ini jauh dari sempurna, dan ini merupakan langkah yang baik dari studi berkelanjutan yang sesungguhnya, oleh karena itu maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penyusun mengharapkan semoga buku ini dapat berguna bagi penyusun pada khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Surabaya, Juli 2018

Tim Penyusun

Halaman ini dibiarkan kosong

Daftar Isi

Bab I Manajemen Keuntungan	1
Operasi Mekanisme Pasar	1
Perhitungan ekonomi	3
Manajemen di bawah Sistem Keuntungan	15
Manajemen Personil di bawah Pasar Tenaga Kerja yang tidak terhalang	21
Bab II Manajemen Birokrasi	25
Birokrasi di bawah Pemerintahan Tunggal	25
Birokrasi dalam Demokrasi	26
Nilai Pokok Manajemen Birokrasi	30
Inti dari Manajemen Birokrasi	34
Manajemen Personil Birokrasi	40
Bab III Birokrasi dan Badan Usaha Milik Publik	45
Ketidamungkinan Pelaksanaan Seluruhnya Pemerintah yang Mengatur	45
Perusahaan Publik dalam Ekonomi Pasar	47
Bab IV Birokratisasi pada Perusahaan Swasta	53
Bab V Implikasi Sosial dan Politik dari Birokratisasi	65
Filsafat Birokratisasi	65
Kepuasan Birokrasi	68
Birokrat sebagai Pemilih	72
Pikiran Birokratisasi	74
Siapa yang Harus Menjadi Tuan?	81
Bab VI Konsekuensi Birokratisasi	89
Belajar dari Gerakan Pemuda Jerman	89
Nasib Generasi yang Bangkit dalam Lingkungan Birokrasi	94
Perwalian dan Kemajuan Otoriter	99
Pemilihan Diktator	102
Hilangnya Rasa Kritis	104
Bab VII Dampak Birokratisasi	109
Kegagalan Masa Lalu	109
Ekonomi vs Perencanaan dan Totalitarianisme	111
Warga Biasa vs Propaganda Profesional Birokratisasi	116
Bab VIII Birokrasi Perwujudan Bela Negara	125
Konsep Birokrasi	125
Pengertian Bela Negara	132
Fungsi Bela Negara	133
Tujuan Bela Negara	135
Birokrasi dan Bela Negara	136

Halaman ini dibiarkan kosong

Bab I

Manajemen Keuntungan

Operasi Mekanisme Pasar

Kapitalisme atau ekonomi pasar adalah sistem kerja sama sosial dan pembagian kerja yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Faktor material produksi dimiliki oleh warga negara perorangan, kapitalis dan pemilik tanah. Tanaman dan pertanian dioperasikan oleh pengusaha dan petani, yaitu oleh individu atau asosiasi individu yang memiliki modal dan tanah sendiri atau telah meminjam atau menyewanya dari pemilik. Perusahaan bebas adalah ciri khas kapitalisme. Tujuan setiap pengusaha (baik pengusaha atau petani) adalah untuk mendapat untung.

Para kapitalis, pengusaha, dan petani berperan penting dalam pelaksanaan urusan ekonomi. Mereka di pucuk pimpinan dan mengarahkan kapal. Tetapi mereka tidak bebas menentukan arahnya. Mereka bukan yang tertinggi, mereka hanya pengemudi, terikat untuk mematuhi perintah kapten tanpa syarat. Kapten adalah konsumen.

Baik kapitalis maupun pengusaha maupun petani tidak menentukan apa yang harus diproduksi. Konsumenlah yang melakukan itu. Para produsen tidak memproduksi untuk konsumsi mereka sendiri tetapi untuk pasar. Mereka berniat menjual produk mereka. Jika konsumen tidak membeli barang yang ditawarkan kepada mereka, pengusaha tidak dapat memulihkan pengeluaran yang dibuat. Dia kehilangan uangnya. Jika ia gagal menyesuaikan prosedurnya dengan keinginan konsumen, ia akan segera dihapus dari posisinya yang unggul di pucuk pimpinan. Pria lain yang

melakukan lebih baik dalam memuaskan permintaan konsumen menggantikannya.

Bos yang sebenarnya, dalam sistem ekonomi pasar kapitalis, adalah konsumen. Konsumen, dengan membeli dan dengan tidak melakukan pembelian, memutuskan siapa yang harus memiliki modal dan menjalankan pabrik. Konsumen menentukan apa yang harus diproduksi dan berapa kuantitas dan kualitasnya. Sikap konsumen menghasilkan untung atau rugi bagi pengusaha. Konsumen membuat pria miskin kaya dan pria kaya miskin. Konsumen bukan bos yang mudah. Konsumen penuh dengan tingkah dan fantasi, dapat berubah dan tidak dapat diprediksi. Konsumen tidak peduli sedikit pun karena jasa masa lalu. Segera setelah sesuatu ditawarkan kepada konsumen yang mereka sukai atau lebih murah, konsumen meninggalkan pemasok lama mereka. Dengan konsumen tidak ada yang lebih penting daripada kepuasan mereka sendiri. Konsumen tidak peduli tentang kepentingan terselubung para kapitalis maupun tentang nasib para pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka jika sebagai konsumen mereka tidak lagi membeli apa yang dulu mereka beli.

Apa artinya ketika kita mengatakan bahwa produksi komoditas A tertentu tidak membayar? Ini menunjukkan fakta bahwa konsumen tidak bersedia membayar produsen A cukup untuk menutupi harga faktor produksi yang diperlukan, sementara pada saat yang sama produsen lain akan menemukan pendapatan mereka melebihi biaya produksi. Permintaan konsumen sangat berperan dalam alokasi berbagai faktor produksi ke berbagai cabang pembuatan barang-barang konsumen. Dengan demikian konsumen memutuskan berapa banyak bahan baku dan tenaga kerja harus digunakan untuk pembuatan A dan berapa banyak untuk barang

dagangan lainnya. Karena itu tidak masuk akal untuk membandingkan produksi untuk keuntungan dan produksi untuk digunakan. Dengan motif keuntungan, pengusaha diharuskan untuk menyediakan barang-barang yang paling mendesak diminta oleh konsumen. Jika pengusaha tidak dipaksa untuk mengambil motif laba sebagai panduannya, ia dapat menghasilkan lebih banyak dari A, meskipun pada kenyataannya konsumen lebih memilih untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Motif laba justru merupakan faktor yang memaksa pengusaha untuk menyediakan dengan cara yang paling efisien komoditas yang ingin digunakan konsumen.

Jadi sistem produksi kapitalis adalah demokrasi ekonomi di mana setiap sen memberikan hak untuk memilih. Konsumen adalah orang yang berdaulat. Kapitalis, pengusaha, dan petani adalah kewajiban rakyat. Jika mereka tidak mematuhi, jika mereka gagal menghasilkan, dengan biaya serendah mungkin, apa yang diminta konsumen, mereka kehilangan kantor mereka. Tugas mereka adalah melayani konsumen. Untung dan rugi adalah instrumen yang digunakan konsumen untuk mengendalikan semua kegiatan bisnis.

Perhitungan ekonomi

Keunggulan sistem kapitalis terdiri dari kenyataan bahwa itu adalah satu-satunya sistem kerja sama sosial dan pembagian kerja yang memungkinkan untuk menerapkan metode perhitungan dalam merencanakan proyek-proyek baru dan menilai kegunaan operasi pabrik-pabrik tersebut, peternakan, dan bengkel sudah bekerja. Ketidakpraktisan semua skema sosialisme dan perencanaan pusat harus dilihat dalam ketidakmungkinan dari segala jenis perhitungan ekonomi dalam kondisi di

mana tidak ada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan akibatnya tidak ada harga pasar untuk faktor-faktor ini.

Masalah yang harus dipecahkan dalam menjalankan urusan ekonomi adalah Ada banyak sekali jenis faktor material produksi, dan di dalam setiap kelas mereka berbeda satu sama lain baik dalam hal sifat fisiknya maupun tempat di mana mereka tersedia. Ada jutaan pekerja dan mereka sangat berbeda dalam hal kemampuan mereka untuk bekerja. Teknologi memberi kita informasi tentang kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya sehubungan dengan apa yang dapat dicapai dengan menggunakan pasokan sumber daya alam ini, barang modal, dan tenaga kerja untuk produksi barang-barang konsumen. Manakah dari prosedur dan rencana potensial ini yang paling menguntungkan? Apa yang harus dilakukan karena mereka cenderung berkontribusi paling besar untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak? Yang mana yang harus ditunda atau dibuang karena pelaksanaannya akan mengalihkan faktor-faktor produksi dari proyek lain yang pelaksanaannya akan lebih berkontribusi pada kepuasan kebutuhan yang mendesak?

Jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan perhitungan dalam bentuk barang. Seseorang tidak dapat membuat berbagai hal masuk ke dalam kalkulus jika tidak ada penyebut yang sama untuk mereka.

Dalam sistem kapitalis, semua desain dan perencanaan didasarkan pada harga pasar. Tanpa mereka semua proyek dan cetak biru para insinyur akan menjadi hobi akademik belaka. Mereka akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana caranya. Tetapi mereka tidak akan berada dalam posisi untuk menentukan apakah realisasi proyek tertentu akan

benar-benar meningkatkan kesejahteraan material atau apakah tidak, dengan menarik faktor-faktor produksi yang langka dari jalur lain, membahayakan kepentingan umum dari kebutuhan yang lebih mendesak, yang adalah dari kebutuhan yang dianggap lebih mendesak oleh konsumen. Panduan perencanaan ekonomi adalah harga pasar. Harga pasar saja dapat menjawab pertanyaan apakah pelaksanaan proyek *P* akan menghasilkan lebih dari biaya, yaitu apakah itu akan lebih berguna daripada pelaksanaan rencana dibayangkan lain yang tidak dapat direalisasikan karena faktor produksi yang diperlukan digunakan untuk kinerja proyek *P*.

Sudah sering ditentang bahwa orientasi kegiatan ekonomi ini sesuai dengan motif laba, yaitu, berdasarkan tolok ukur surplus hasil atas biaya, mengabaikan kepentingan bangsa secara keseluruhan dan hanya memperhitungkan kepentingan diri sendiri. kepentingan individu, berbeda dari dan seringkali bahkan bertentangan dengan kepentingan nasional. Gagasan ini terletak di bagian bawah semua perencanaan totaliter. Kontrol pemerintah atas bisnis, diklaim oleh pendukung manajemen otoriter, menjaga kesejahteraan bangsa, sementara perusahaan bebas, didorong oleh satu-satunya tujuan menghasilkan laba, membahayakan kepentingan nasional.

Kasus ini dicontohkan saat ini dengan mengutip masalah karet sintetis. Jerman, di bawah pemerintahan sosialisme Nazi, telah mengembangkan produksi karet sintetis, sementara Inggris dan Amerika Serikat, di bawah supremasi perusahaan bebas yang mencari untung, tidak peduli dengan pembuatan yang mahal begitu tidak menguntungkan. Karena itu mereka mengabaikan hal penting tentang kesiapsiagaan perang dan menjadikan kemerdekaan mereka sebagai bahaya serius.

Tidak ada yang lebih palsu dari alasan ini. Tidak ada yang pernah menyatakan bahwa pelaksanaan perang dan mempersiapkan angkatan bersenjata suatu negara untuk keadaan darurat perang adalah tugas yang dapat atau harus diserahkan pada kegiatan warga negara secara individu. Pertahanan keamanan dan peradaban suatu negara terhadap agresi dari pihak musuh asing dan gangster domestik adalah tugas pertama pemerintah mana pun. Jika semua orang menyenangkan dan berbudi luhur, jika tidak ada yang mendambakan apa yang menjadi milik orang lain, tidak akan ada kebutuhan untuk pemerintah, untuk tentara dan angkatan laut, untuk polisi, untuk pengadilan, dan untuk penjara. Adalah urusan pemerintah untuk membuat ketentuan perang. Tidak ada warga negara perorangan dan tidak ada kelompok atau kelas warga negara yang dapat disalahkan jika pemerintah gagal dalam upaya ini. Rasa bersalah selalu ada pada pemerintah dan akibatnya, dalam demokrasi, dengan mayoritas pemilih.

Jerman dipersenjatai untuk perang. Karena Staf Umum Jerman tahu bahwa tidak mungkin untuk berperang Jerman mengimpor karet alam, mereka memutuskan untuk mendorong produksi karet sintetis dalam negeri. Tidak perlu menanyakan apakah pihak berwenang militer Inggris dan Amerika yakin atau tidak bahwa negara mereka, bahkan dalam kasus Perang Dunia baru, akan berada dalam posisi untuk bergantung pada perkebunan karet di Malaya dan Hindia Belanda. Bagaimanapun mereka tidak menganggap perlu untuk menimbun stok karet alam dalam negeri atau untuk memulai produksi karet sintetis. Beberapa pengusaha Amerika dan Inggris meneliti kemajuan produksi karet sintetis di Jerman. Tetapi karena biaya produk sintetis jauh lebih tinggi daripada produk alami,

mereka tidak berani meniru contoh yang ditetapkan oleh Jerman. Tidak ada pengusaha yang dapat menginvestasikan uang dalam proyek yang tidak menawarkan prospek keuntungan. Justru fakta inilah yang membuat konsumen berdaulat dan memaksa pengusaha untuk menghasilkan apa yang paling diminta konsumen. Konsumen, yaitu masyarakat Amerika dan Inggris, tidak siap untuk memungkinkan harga karet sintetis yang akan membuat produksinya menguntungkan. Cara termurah untuk menyediakan karet adalah bagi negara-negara Anglo-Saxon untuk memproduksi barang dagangan lain, misalnya, mobil dan berbagai mesin, menjual barang-barang ini ke luar negeri, dan mengimpor karet alam asing.

Jika memungkinkan bagi Pemerintah London dan Washington untuk meramalkan peristiwa Desember 1941, dan Januari dan Februari 1942, mereka akan berbalik ke arah langkah-langkah yang mengamankan produksi karet sintetis dalam negeri. Tidak penting berkenaan dengan masalah kita metode mana yang mereka pilih untuk membiayai bagian dari pengeluaran pertahanan ini. Mereka dapat mensubsidi pabrik yang bersangkutan atau mereka dapat menaikkan, dengan tarif, harga karet domestik ke tingkat yang sedemikian rupa sehingga produksi karet sintetis rumah akan menjadi menguntungkan. Bagaimanapun orang akan dipaksa untuk membayar untuk apa yang dilakukan.

Jika pemerintah tidak menyediakan langkah pertahanan, tidak ada kapitalis atau pengusaha yang bisa mengisi kekosongan ini. Mencela beberapa perusahaan kimia karena tidak mengambil produksi karet sintetis tidak lebih masuk akal daripada menyalahkan industri motor karena tidak, segera setelah Hitler berkuasa, mengubah pabriknya menjadi pabrik pesawat. Atau akan dibenarkan untuk menyalahkan seorang sarjana karena

telah membuang-buang waktu dengan menulis buku tentang sejarah atau filsafat Amerika alih-alih mencurahkan seluruh upayanya untuk melatih dirinya sendiri untuk fungsi-fungsi masa depannya di Pasukan Ekspedisi. Jika pemerintah gagal dalam tugasnya memperlengkapi bangsa untuk mengusir serangan, tidak ada warga negara yang memiliki cara terbuka untuk memperbaiki kejahatan selain mengkritik pihak berwenang dalam menyikapi penguasa (para pemilih) dalam pidato, artikel, dan buku.

Banyak dokter menggambarkan cara sesama warga menghabiskan uang mereka sebagai benar-benar bodoh dan bertentangan dengan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Orang-orang kata mereka, harus mengubah pola makan mereka, membatasi konsumsi minuman dan tembakau yang memabukkan, dan menggunakan waktu senggang mereka dengan cara yang lebih masuk akal. Dokter-dokter ini mungkin benar. Tetapi bukan tugas pemerintah untuk memperbaiki perilaku "rakyatnya". Juga bukan tugas para pengusaha. Mereka bukan penjaga pelanggan mereka. Jika masyarakat lebih suka minuman ringan, pengusaha harus memenuhi keinginan ini. Dia yang ingin mereformasi bangsanya harus mengambil jalan lain untuk dibujuk. Ini saja adalah cara demokratis untuk membawa perubahan. Jika seorang pria gagal dalam upayanya untuk meyakinkan orang lain tentang kesehatan ide-idenya, ia harus menyalahkan ketidakmampuannya sendiri. Dia seharusnya tidak meminta hukum, yaitu, paksaan dan paksaan oleh polisi.

Basis utama dari perhitungan ekonomi adalah penilaian semua barang konsumen di pihak semua orang. Benar bahwa konsumen ini keliru dan penilaian mereka terkadang salah arah. Kita dapat berasumsi bahwa mereka akan menilai berbagai komoditas secara berbeda jika mereka

diinstruksikan dengan lebih baik. Namun, sebagaimana kodrat manusia, kita tidak memiliki cara untuk menggantikan kebijaksanaan otoritas yang sempurna untuk kedangkalan orang.

Kami tidak menyatakan bahwa harga pasar harus dianggap ekspresif dari nilai abadi dan absolut. Tidak ada hal-hal seperti nilai absolut, terlepas dari preferensi subyektif dari pria yang bersalah. Penilaian nilai adalah hasil dari kesewenang-wenangan manusia. Mereka mencerminkan semua kekurangan dan kelemahan penulisnya. Namun, satu-satunya alternatif untuk penentuan harga pasar dengan pilihan semua konsumen adalah penentuan nilai dengan penilaian beberapa kelompok kecil laki-laki, tidak kurang bertanggung jawab untuk kesalahan dan frustrasi daripada mayoritas, meskipun fakta bahwa mereka disebut "otoritas." Tidak peduli bagaimana nilai-nilai barang konsumen yang ditentukan, apakah mereka tetap dengan keputusan diktator atau dengan pilihan dari semua konsumen (seluruh orang) nilai selalu relatif, subjektif, dan manusiawi, tidak pernah absolut, objektif, dan ilahi.

Apa yang harus disadari adalah bahwa dalam masyarakat pasar yang diselenggarakan atas dasar perusahaan bebas dan kepemilikan pribadi atas sarana produksi harga konsumen barang-barang dengan setia dan erat tercermin dalam harga berbagai faktor yang diperlukan untuk produksinya. Dengan demikian menjadi layak untuk ditemukan melalui perhitungan yang tepat yang mana banyaknya proses produksi yang tidak dapat dipikirkan lebih menguntungkan dan mana yang lebih sedikit. "Lebih menguntungkan" berarti dalam hubungan ini penggunaan faktor-faktor produksi ini sedemikian rupa sehingga produksi barang-barang konsumen lebih mendesak diminta oleh konsumen mendapat prioritas di atas produksi

komoditas yang kurang mendesak diminta oleh konsumen. Perhitungan ekonomi memungkinkan bisnis menyesuaikan produksi dengan tuntutan konsumen. Di sisi lain, di bawah berbagai sosialisme, dewan pusat manajemen produksi tidak akan berada dalam posisi untuk terlibat dalam perhitungan ekonomi. Ketika tidak ada pasar dan akibatnya tidak ada harga pasar untuk faktor-faktor produksi, mereka tidak dapat menjadi elemen perhitungan.

Untuk memahami penuh masalah yang terlibat kita harus mencoba untuk memahami sifat dan asal keuntungan. Dalam sistem hipotetis tanpa perubahan apapun, tidak akan ada untung dan rugi sama sekali. Dalam dunia yang stasioner, di mana tidak ada hal baru yang terjadi dan semua kondisi ekonomi tetap sama secara permanen, jumlah total yang harus dikeluarkan pabrik untuk faktor-faktor produksi yang diperlukan akan sama dengan harga yang didapatnya untuk produk tersebut. Harga yang harus dibayarkan untuk faktor-faktor material produksi, upah dan bunga untuk modal yang diinvestasikan, akan menyerap seluruh harga produk. Tidak ada yang tersisa untuk keuntungan. Jelas bahwa sistem seperti itu tidak akan membutuhkan pengusaha dan tidak ada fungsi ekonomi untuk keuntungan. Karena hanya hal-hal yang diproduksi hari ini yang diproduksi kemarin, sehari sebelum kemarin, tahun lalu, dan sepuluh tahun yang lalu, dan sebagai rutinitas yang sama akan berlangsung selamanya, karena tidak ada perubahan terjadi dalam penawaran atau permintaan baik dari konsumen atau dari barang produsen atau dalam metode teknis, karena semua harga stabil, tidak ada ruang yang tersisa untuk kegiatan kewirausahaan.

Tapi dunia yang sebenarnya adalah dunia perubahan permanen. Angka-angka populasi, selera, dan keinginan, pasokan faktor-faktor

produksi dan metode teknologi berada dalam fluks tanpa henti. Dalam keadaan seperti itu, ada kebutuhan untuk penyesuaian produksi terus-menerus terhadap perubahan kondisi. Di sinilah pengusaha masuk.

Mereka yang ingin mendapatkan keuntungan selalu mencari peluang. Segera setelah mereka menemukan bahwa hubungan harga dari faktor-faktor produksi dengan harga yang diantisipasi dari produk-produk tersebut tampaknya menawarkan kesempatan seperti itu, mereka melangkah masuk. Jika penilaian mereka terhadap semua elemen yang terlibat benar, mereka mendapat untung. Tetapi segera kecenderungan menghilangnya keuntungan semacam itu mulai berlaku. Sebagai hasil dari proyek-proyek baru yang diresmikan, harga faktor-faktor produksi yang dipertanyakan naik dan di sisi lain, harga-harga produk mulai turun. Keuntungan adalah fenomena permanen hanya karena selalu ada perubahan dalam kondisi pasar dan metode produksi. Dia yang ingin mendapat untung harus selalu berjaga-jaga untuk peluang baru. Dan dalam mencari laba, ia menyesuaikan produksi dengan tuntutan masyarakat konsumen.

Kita dapat melihat seluruh pasar faktor-faktor material produksi dan tenaga kerja sebagai pelelangan umum. Penawar adalah pengusaha. Tawaran tertinggi mereka dibatasi oleh ekspektasi mereka akan harga yang akan dibayar konsumen untuk produk tersebut. Rekan penawar yang bersaing dengan mereka, yang harus mereka tawar lebih tinggi jika mereka tidak pergi dengan tangan kosong, berada dalam situasi yang sama. Semua penawar ini, seolah-olah, bertindak sebagai wajib bagi konsumen. Tetapi masing-masing mewakili aspek yang berbeda dari keinginan konsumen, baik komoditas lain atau cara lain untuk menghasilkan komoditas yang sama.

Persaingan di antara berbagai pengusaha pada dasarnya adalah persaingan di antara berbagai kemungkinan yang terbuka bagi individu untuk menghilangkan sejauh mungkin keadaan tidak nyaman mereka dengan mengakuisisi barang-barang konsumen. Resolusi setiap orang untuk membeli kulkas dan menunda pembelian mobil baru adalah faktor penentu dalam pembentukan harga mobil dan lemari es. Persaingan antara pengusaha mencerminkan harga barang konsumen ini dalam pembentukan harga dari faktor-faktor produksi. Fakta bahwa berbagai keinginan individu, yang bertentangan karena kelangkaan faktor produksi yang tak terhindarkan, diwakili di pasar oleh berbagai pengusaha yang bersaing menghasilkan harga untuk faktor-faktor ini yang membuat perhitungan ekonomi tidak hanya layak tetapi juga keharusan. Pengusaha yang tidak menghitung, atau mengabaikan hasil perhitungan, akan segera bangkrut dan dikeluarkan dari fungsi manajerialnya.

Tetapi di dalam komunitas sosialis di mana hanya ada satu manajer tidak ada harga dari faktor-faktor produksi atau perhitungan ekonomi. Bagi pengusaha masyarakat kapitalis, faktor produksi melalui harganya mengirimkan peringatan Jangan sentuh saya, saya diperuntukkan untuk kepuasan kebutuhan lain yang lebih mendesak. Tetapi di bawah sosialisme, faktor-faktor produksi ini bisu. Mereka tidak memberi petunjuk kepada perencana. Teknologi menawarkan beragam solusi yang mungkin untuk masalah yang sama. Masing-masing memerlukan pengeluaran jenis dan jumlah lain dari berbagai faktor produksi. Tetapi karena manajer sosialis tidak dapat mereduksinya menjadi penyebut yang sama, ia tidak dalam posisi untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang paling menguntungkan.

Memang benar bahwa di bawah sosialisme tidak akan ada keuntungan yang dapat dilihat maupun kerugian yang dapat dilihat. Jika tidak ada perhitungan, tidak ada cara untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan apakah proyek yang direncanakan atau dilaksanakan adalah yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak; keberhasilan dan kegagalan tetap tidak diakui dalam kegelapan. Para pendukung sosialisme sangat keliru dalam mempertimbangkan tidak adanya keuntungan dan kerugian yang dapat dilihat sebagai poin yang sangat baik. Sebaliknya, hal itu merupakan wakil penting dari setiap manajemen sosialis. Bukanlah keuntungan untuk tidak mengetahui apakah yang dilakukan seseorang adalah cara yang cocok untuk mencapai tujuan yang dicari. Manajemen sosialis akan seperti pria yang terpaksa menghabiskan hidupnya dengan mata tertutup.

Telah dikemukakan keberatan bahwa sistem pasar bagaimanapun juga sangat tidak sesuai dengan kondisi yang disebabkan oleh perang hebat. Jika mekanisme pasar dibiarkan sendiri, mustahil bagi pemerintah untuk mendapatkan semua peralatan yang dibutuhkan. Faktor-faktor langka produksi yang dibutuhkan untuk produksi persenjataan akan disia-siakan untuk keperluan sipil yang, dalam perang, dianggap sebagai kurang penting, bahkan sebagai barang mewah dan limbah. Oleh karena itu dianggap penting dalam masa perang untuk menggunakan sistem pemerintahan menetapkan prioritas dan untuk menciptakan aparatur birokrasi yang diperlukan.

Kesalahan dari alasan ini adalah bahwa ia tidak menyadari bahwa perlunya memberi pemerintah kekuatan penuh untuk menentukan untuk jenis produksi apa bahan-bahan mentah harus digunakan bukanlah hasil

dari perang tetapi dari metode yang diterapkan dalam pembiayaan pengeluaran perang.

Jika seluruh jumlah uang yang dibutuhkan untuk melakukan perang telah dikumpulkan oleh pajak dan dengan meminjam dari publik, semua orang akan terpaksa membatasi konsumsinya secara drastis. Dengan pendapatan uang (setelah pajak) jauh lebih rendah dari sebelumnya, konsumen akan berhenti membeli banyak barang yang mereka beli sebelum perang. Para produsen, justru karena mereka didorong oleh motif laba, akan berhenti memproduksi barang-barang sipil seperti itu dan akan beralih ke produksi barang-barang yang pemerintah, sekarang berdasarkan arus masuk pajak pembeli terbesar di pasar, akan siap untuk membeli.

Namun, sebagian besar pengeluaran perang dibiayai oleh peningkatan mata uang yang beredar dan dengan meminjam dari bank-bank komersial. Di sisi lain, di bawah kendali harga, adalah ilegal untuk menaikkan harga komoditas. Dengan pendapatan uang yang lebih tinggi dan dengan harga komoditas yang tidak berubah orang tidak hanya tidak akan membatasi tetapi akan meningkatkan pembelian barang untuk konsumsi mereka sendiri. Untuk menghindari ini, perlu mengambil jalan lain untuk penjatahan dan untuk prioritas yang ditetapkan pemerintah. Langkah-langkah ini diperlukan karena campur tangan pemerintah sebelumnya yang melumpuhkan operasi pasar mengakibatkan kondisi yang paradoksal dan sangat tidak memuaskan. Bukan ketidakcukupan mekanisme pasar tetapi tidak memadainya campur tangan pemerintah sebelumnya dengan fenomena pasar membuat sistem prioritas tidak dapat dihindari. Dalam hal ini seperti dalam banyak contoh lainnya, birokrat

melihat kegagalan langkah-langkah mereka sebelumnya sebagai bukti bahwa terobosan lebih lanjut ke dalam sistem pasar diperlukan.

Manajemen di bawah Sistem Keuntungan

Semua transaksi bisnis diperiksa dengan cermat menghitung untung dan rugi. Proyek-proyek baru tunduk pada pengawasan yang cermat terhadap peluang yang mereka tawarkan. Setiap langkah menuju realisasinya tercermin dalam entri dalam buku dan akun. Akun untung dan rugi menunjukkan apakah seluruh bisnis, atau salah satu bagiannya, menguntungkan. Tokoh-tokoh buku besar berfungsi sebagai panduan untuk pelaksanaan seluruh bisnis dan masing-masing divisi. Cabang yang tidak membayar dihentikan, mereka yang menghasilkan keuntungan diperluas. Tidak mungkin ada pertanyaan tentang tetap pada lini bisnis yang tidak menguntungkan jika tidak ada prospek menjadikannya menguntungkan di masa depan yang tidak terlalu jauh.

Metode rumit dari pembukuan modern, akuntansi, dan statistik bisnis memberikan pengusaha dengan gambar yang setia dari semua operasinya. Dia berada dalam posisi untuk mengetahui seberapa sukses atau tidak berhasil setiap transaksi itu. Dengan bantuan pernyataan-pernyataan ini, ia dapat memeriksa kegiatan semua departemen yang menjadi perhatiannya, tidak peduli sebesar apa pun itu. Tentu saja ada sejumlah keleluasaan dalam menentukan distribusi biaya overhead. Namun terlepas dari ini, angka-angka memberikan refleksi yang setia dari semua yang terjadi di setiap cabang atau departemen. Buku-buku dan neraca adalah ilmu bisnis. Mereka juga kompas pengusaha.

Alat-alat pembukuan dan akuntansi begitu akrab bagi pebisnis sehingga dia gagal untuk mengamati apa instrumen yang luar biasa itu. Dibutuhkan penyair dan penulis hebat untuk menghargai mereka pada nilai sebenarnya. Goethe menyebut pembukuan dengan entri ganda “salah satu penemuan terbaik dari pikiran manusia”. Dengan cara ini, ia mengamati para pengusaha dapat setiap saat mensurvei keseluruhan umum, tanpa perlu membingungkan dirinya sendiri dengan perinciannya.

Karakterisasi Goethe menjadi inti masalah ini. Keutamaan manajemen komersial justru terletak pada kenyataan bahwa ia menyediakan manajer dengan metode survei keseluruhan dan semua bagian-bagiannya tanpa terperangkap dalam rincian dan hal-hal sepele.

Pengusaha berada dalam posisi untuk memisahkan perhitungan setiap bagian dari bisnisnya sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan peran yang dimainkannya dalam seluruh perusahaannya. Bagi publik, setiap perusahaan atau perusahaan adalah satu kesatuan yang tidak terbagi. Tetapi untuk mata manajemennya terdiri dari berbagai bagian, yang masing-masing dipandang sebagai entitas yang terpisah dan dihargai sesuai dengan bagian yang dikontribusikannya bagi keberhasilan seluruh perusahaan. Dalam sistem perhitungan bisnis, setiap bagian mewakili keberadaan integral, sebuah bisnis independen hipotetis. Diasumsikan bahwa bagian ini “memiliki” bagian tertentu dari seluruh modal yang dipekerjakan dalam perusahaan, yang dibeli dari bagian lain dan dijual kepada mereka, bahwa ia memiliki pengeluaran sendiri dan pendapatannya sendiri, bahwa transaksi ini menghasilkan baik dalam untung atau rugi yang terkait dengan urusannya sendiri terpisah dari hasil yang dicapai oleh bagian lain. Dengan demikian, manajer umum dari seluruh perusahaan

dapat memberikan independensi yang besar kepada manajemen masing-masing bagian. Manajer umum tidak perlu repot dengan detail kecil dari manajemen masing-masing bagian. Para manajer dari berbagai bagian dapat memiliki kebebasan dalam administrasi urusan "internal" bagian mereka. Satu-satunya arahan yang diberikan manajer umum kepada orang-orang yang dipercayakannya kepada manajemen berbagai bagian, departemen, dan cabang adalah Dapatkan laba sebanyak mungkin. Dan pemeriksaan dari rekening menunjukkan kepadanya seberapa sukses atau tidak berhasilnya mereka menjalankan arahan.

Dalam perusahaan berskala besar banyak bagian hanya memproduksi bagian atau produk setengah jadi yang tidak dijual langsung tetapi digunakan oleh bagian lain dalam pembuatan produk akhir. Fakta ini tidak mengubah kondisi yang dijelaskan. Manajer umum membandingkan biaya yang dikeluarkan oleh produksi komponen seperti itu dan produk setengah jadi dengan harga yang harus dia bayar untuk itu jika dia harus membelinya dari pabrik lain. Dia selalu dihadapkan dengan pertanyaan Apakah membayar untuk memproduksi hal-hal ini di bengkel kita sendiri? Tidakkah lebih memuaskan untuk membelinya dari pabrik lain yang berspesialisasi dalam produksinya?

Dengan demikian, dalam kerangka perusahaan pencari keuntungan, tanggung jawab dapat dibagi. Setiap submanager bertanggung jawab atas pekerjaan departemennya. Ini untuk kreditnya jika akun menunjukkan untung, dan itu merugikannya jika mereka menunjukkan kerugian. Minat egoisnya sendiri mendorongnya ke arah perhatian dan pengerahan yang terbaik dalam menjalankan urusan bagiannya. Jika dia mengalami kerugian, dia akan menjadi korban mereka. Dia akan digantikan oleh orang lain yang

manajer umum harapkan lebih sukses, atau seluruh bagian akan dihentikan. Bagaimanapun dia akan diberhentikan dan kehilangan pekerjaannya. Jika dia berhasil menghasilkan keuntungan, dia akan melihat penghasilannya meningkat atau setidaknya dia tidak akan berada dalam bahaya kehilangannya. Apakah atau tidak seorang manajer departemen berhak untuk mendapat bagian dalam laba departemennya tidak begitu penting sehubungan dengan kepentingan pribadi yang ia ambil dalam hasil-hasil transaksi departemennya. Nasibnya bagaimanapun terkait erat dengan departemennya. Dalam bekerja untuk itu, ia bekerja tidak hanya untuk bosnya tetapi juga untuk dirinya sendiri.

Adalah tidak praktis untuk membatasi kebijaksanaan sub-manajer yang bertanggung jawab seperti itu dengan terlalu banyak campur tangan terhadap perincian. Jika dia efisien, campur tangan seperti itu akan menjadi berlebihan, jika tidak berbahaya dengan mengikat tangannya. Jika dia tidak efisien, itu tidak akan membuat kegiatannya lebih sukses. Itu hanya akan memberinya alasan yang lemah bahwa kegagalan itu disebabkan oleh instruksi atasannya yang tidak pantas. Satu-satunya instruksi yang diperlukan adalah pemahaman sendiri dan tidak perlu disebutkan secara khusus untuk Mencari keuntungan. Selain itu, sebagian besar detail dapat dan harus diserahkan kepada kepala setiap departemen.

Sistem ini sangat berperan dalam evolusi bisnis modern. Produksi berskala besar dalam agregat produksi yang besar dan pendirian anak perusahaan di bagian yang jauh dari negara dan di luar negeri, department store, dan toko rantai semuanya dibangun di atas prinsip tanggung jawab manajer bawahan. Ini tidak membatasi tanggung jawab manajer umum. Bawahan hanya bertanggung jawab kepadanya. Mereka tidak

membebaskannya dari tugas menemukan orang yang tepat untuk setiap pekerjaan.

Jika sebuah perusahaan di New York mendirikan toko cabang atau pabrik di Los Angeles, di Buenos Aires, di Budapest, dan di Calcutta, kepala manajer membangun hubungan organisasi pelengkap dengan kantor pusat atau perusahaan induk hanya dalam istilah yang cukup umum. Semua pertanyaan kecil harus berada dalam jangkauan tugas manajer lokal. Departemen audit kantor pusat dengan hati-hati memeriksa transaksi keuangan cabang dan memberi tahu manajer umum segera setelah terjadi penyimpangan. Tindakan pencegahan diambil untuk mencegah pemborosan modal yang tidak dapat diperbaiki yang diinvestasikan di cabang, pemborosan niat baik dan reputasi seluruh perhatian dan tabrakan antara kebijakan cabang dan kebijakan kantor pusat. Tetapi tangan bebas diserahkan kepada manajemen lokal dalam segala hal lainnya. Adalah praktis untuk menempatkan kepercayaan pada kepala anak perusahaan, departemen, atau bagian karena kepentingannya dan orang-orang dari seluruh perhatian bertepatan. Jika dia menghabiskan terlalu banyak untuk operasi saat ini atau untuk mengabaikan peluang untuk transaksi yang menguntungkan, dia tidak hanya akan mengganggu keuntungan kekhawatiran tetapi juga posisinya sendiri. Dia bukan sekadar pegawai yang disewa yang satu-satunya tugasnya adalah penyelesaian hati nurani dari tugas yang ditugaskan dan pasti. Dia sendiri adalah seorang pengusaha, mitra junior seperti halnya pengusaha, tidak peduli apa pun persyaratan kontrak dan keuangan dari pekerjaannya. Dia harus dengan yang terbaik dari ikatan kemampuannya berkontribusi pada keberhasilan perusahaan dengan siapa dia terhubung.

Karena ini memang demikian, tidak ada bahaya dalam membiarkan keputusan penting sesuai kebijaksanaannya. Dia tidak akan membuang uang untuk pembelian produk dan layanan. Dia tidak akan mempekerjakan asisten dan pekerja yang tidak kompeten, ia tidak akan mengeluarkan kolaborator yang cakap untuk menggantikan mereka dengan teman atau kerabat pribadi yang tidak kompeten. Perilakunya tunduk pada keputusan pengadilan yang tidak bisa disuap: perhitungan untung dan rugi. Dalam bisnis hanya ada satu hal yang penting yaitu sukses. Manajer departemen yang gagal itu ditakdirkan tidak peduli apakah kegagalan itu disebabkan oleh dia atau tidak, atau apakah mungkin baginya untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Cabang bisnis yang tidak menguntungkan — cepat atau lambat — harus dihentikan, dan manajernya kehilangan pekerjaan.

Kedaulatan konsumen dan operasi pasar yang demokratis tidak berhenti di depan pintu perhatian bisnis besar. Mereka menyerap semua departemen dan cabangnya. Tanggung jawab kepada konsumen adalah sumber kehidupan bisnis dan usaha dalam masyarakat pasar yang tidak terhambat. Motif laba melalui kelembagaan di mana para pengusaha didorong untuk melayani konsumen dengan kemampuan terbaik mereka pada saat yang sama adalah prinsip pertama dari setiap organisasi internal agregat komersial dan industri. Ini bergabung bersama sentralisasi sepenuhnya dari seluruh perhatian dengan otonomi bagian yang hampir lengkap itu membawa pada persetujuan tanggung jawab penuh dari manajemen pusat dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan inisiatif manajer bawahan bagian, departemen, dan tambahan. Ini memberikan kepada sistem perusahaan bebas bahwa fleksibilitas dan kemampuan

beradaptasi yang menghasilkan kecenderungan yang teguh terhadap perbaikan.

Manajemen Personil di bawah Pasar Tenaga Kerja yang tidak terhalang

Staf perusahaan berskala besar modern kadang-kadang mencakup ratusan ribu pegawai dan pekerja. Mereka membentuk badan yang sangat berbeda dari manajer umum atau presiden hingga scrubwomen, messenger boy, dan magang. Penanganan tubuh sebesar itu menimbulkan banyak masalah. Namun, mereka bisa diselesaikan.

Tidak peduli seberapa besar kekhawatirannya, manajemen pusat hanya berurusan dengan bagian, departemen, cabang, dan anak perusahaan, yang perannya dapat ditentukan dengan tepat dari bukti yang diberikan oleh akun dan statistik. Tentu saja, akun tidak selalu menunjukkan apa yang salah dengan bagian. Mereka hanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa itu tidak membayar dan harus direformasi atau dihentikan. Kalimat yang mereka sampaikan tidak dapat ditarik kembali. Mereka mengungkapkan nilai tunai masing-masing departemen. Dan hanya nilai tunai yang penting di pasar. Konsumen itu tanpa ampun. Mereka tidak pernah membeli untuk menguntungkan produsen yang kurang efisien dan melindunginya dari konsekuensi kegagalannya mengelola lebih baik. Mereka ingin dilayani sebaik mungkin. Dan kerja sistem kapitalis memaksa pengusaha untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh konsumen. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mendistribusikan hadiah dengan mengorbankan konsumen. Dia akan membuang-buang uangnya jika dia menggunakan uangnya sendiri untuk tujuan seperti itu. Dia tidak bisa membayar siapa pun lebih dari yang dia sadari dalam menjual produk.

Hubungan yang sama yang ada antara manajer umum dan bawahan langsungnya, kepala berbagai bagian, meliputi seluruh hirarki bisnis. Setiap kepala bagian menilai bawahan langsungnya sesuai dengan prinsip yang sama dengan mana manajer kepala menghargai dia, dan mandor menerapkan metode yang sama dalam menilai bawahannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di bawah kondisi yang lebih sederhana dari unit yang lebih rendah tidak diperlukan skema akuntansi yang rumit untuk menentukan nilai tunai masing-masing orang. Tidak masalah apakah upah per potong atau upah per jam dibayarkan. Dalam jangka panjang pekerja tidak akan pernah bisa mendapatkan lebih dari yang diizinkan oleh konsumen.

Tidak ada manusia yang sempurna. Sering terjadi bahwa atasan keliru dalam menilai bawahan. Salah satu kualifikasi yang diperlukan untuk posisi yang lebih tinggi adalah kemampuan untuk menilai orang dengan tepat. Dia yang gagal dalam hal ini membahayakan peluang keberhasilannya. Dia melukai kepentingannya sendiri tidak kurang dari orang-orang yang efisiensinya diremehkan. Hal-hal demikian, tidak perlu mencari perlindungan khusus untuk karyawan terhadap kesewenang-wenangan dari pihak majikan mereka atau kewajiban majikan mereka. Ketidaktepatan dalam berurusan dengan personal adalah, di bawah sistem laba yang tidak terhambat, suatu pelanggaran yang menyerang rumah penulisnya.

Di bawah ekonomi pasar yang tidak terhambat, penilaian upaya masing-masing individu terlepas dari pertimbangan pribadi dan karenanya dapat terbebas dari bias dan ketidaksukaan. Pasar memberikan penilaian pada produk, bukan pada produsen. Penilaian hasil produsen secara

otomatis dari penilaian produknya. Setiap koperator dinilai sesuai dengan nilai kontribusinya terhadap proses produksi barang dan jasa. Gaji dan upah tidak tergantung pada keputusan yang sewenang-wenang. Di pasar tenaga kerja, setiap kuantitas dan kualitas pekerjaan dihargai dengan jumlah yang siap dibayar oleh konsumen untuk produk tersebut. Ini bukan bantuan dari pihak pemberi kerja untuk membayar upah dan gaji, itu adalah transaksi bisnis, pembelian faktor produksi. Harga tenaga kerja adalah fenomena pasar yang ditentukan oleh permintaan konsumen akan barang dan jasa. Hampir setiap majikan selalu mencari tenaga kerja yang lebih murah dan setiap karyawan mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi.

Fakta bahwa tenaga kerja adalah, di bawah kapitalisme, suatu komoditas dan dibeli dan dijual sebagai suatu komoditas membuat upah menjadi bebas dari ketergantungan pribadi. Seperti halnya para kapitalis, pengusaha, dan petani, pencari nafkah bergantung pada kesewenang-wenangan konsumen. Tetapi pilihan konsumen tidak menyangkut orang-orang yang terlibat dalam produksi; mereka memperhatikan hal-hal dan bukan manusia. Majikan tidak dalam posisi untuk menikmati favoritisme atau dalam prasangka yang berkaitan dengan personil. Sejauh yang dia lakukan, perbuatan itu sendiri membawa hukumannya sendiri.

Fakta inilah, dan bukan hanya konstitusi dan undang-undang hak, yang membuat para penerima gaji dan upah *dalam sistem kapitalis yang bebas terhambat menjadi* orang bebas. Mereka berdaulat dalam kapasitas mereka sebagai konsumen, dan sebagai produsen mereka, seperti semua warga negara lainnya, tanpa syarat tunduk pada hukum pasar. Dalam menjual faktor produksi, yaitu kerja keras dan kesulitan mereka, di pasar dengan harga pasar kepada semua orang yang siap membelinya, mereka

tidak membahayakan posisi mereka sendiri. Mereka tidak berhutang terima kasih kepada majikan mereka dan kepatuhan mereka, mereka berutang kepadanya sejumlah tenaga kerja dengan kualitas yang pasti. Majikan, di sisi lain, tidak mencari pria simpatik yang ia sukai tetapi pekerja efisien yang sepadan dengan uang yang ia bayarkan kepada mereka.

Rasionalitas dan objektivitas hubungan kapitalis yang keren ini, tentu saja, tidak direalisasikan pada tingkat yang sama di seluruh bidang bisnis. Semakin dekat fungsi pria membawanya ke konsumen, semakin banyak faktor pribadi yang mengganggu. Dalam perdagangan layanan beberapa peran dimainkan oleh simpati dan antipati hubungan lebih “manusiawi.” Doktrin yang keras kepala dan penganut kapitalisme yang gigih siap untuk menyebutnya sebagai keuntungan. Bahkan itu membatasi kebebasan pribadi pengusaha dan karyawannya. Seorang penjaga toko kecil, seorang tukang cukur, pemilik penginapan, dan seorang aktor tidak begitu bebas dalam mengekspresikan keyakinan politik atau agama mereka sebagai pemilik pabrik kapas atau pekerja di pabrik baja.

Tetapi fakta-fakta ini tidak membatalkan karakteristik umum dari sistem pasar. Ini adalah sistem yang secara otomatis menghargai setiap orang sesuai dengan layanan yang ia berikan ke tubuh konsumen yang berdaulat, yaitu kepada sesamanya.

Bab II

Manajemen Birokrasi

Birokrasi di bawah Pemerintahan Tunggal

Kepala suku dari suku primitif kecil sebagai aturan dalam posisi untuk berkonsentrasi di tangan semua legislatif, administratif, dan kekuasaan yudikatif. Keinginannya adalah hukum. Dia adalah eksekutif dan hakim. Tetapi berbeda ketika despot telah berhasil memperluas ukuran wilayahnya. Karena ia tidak memiliki mana-mana, ia harus mendelegasikan sebagian dari kekuatannya kepada bawahan. Mereka, di distrik mereka, wakilnya, bertindak atas namanya dan di bawah naungannya. Bahkan mereka menjadi lalim lokal hanya nominal tunduk pada penguasa perkasa yang telah menunjuk mereka. Mereka memerintah provinsi mereka sesuai dengan kehendak mereka sendiri, mereka menjadi satraps. Raja agung memiliki kekuatan untuk memecat mereka dan menunjuk seorang pengganti. Tapi itu juga bukan obat. Gubernur baru juga segera menjadi satrap yang hampir independen. Apa yang oleh beberapa kritikus (secara keliru) menyatakan sehubungan dengan demokrasi perwakilan, yaitu, bahwa rakyat berdaulat hanya pada hari pemilihan, secara harfiah benar berkaitan dengan sistem despotisme semacam itu raja berdaulat di provinsi hanya pada hari dia menunjuk gubernur baru.

Dalam apa posisi gubernur provinsi yang demikian berbeda dari posisi manajer cabang bisnis? Manajer dari seluruh perhatian menyerahkan agregat kepada manajer cabang yang baru diangkat dan memberinya satu arahan saja: Ma untung. Perintah ini, kewajiban yang terus-menerus diperiksa oleh akun, cukup untuk membuat cabang menjadi bagian dari seluruh perhatian dan untuk memberikan kepada manajer tindakannya

arah yang diarahkan oleh manajer pusat. Tetapi jika penguasa lalim itu, yang keputusan sewenang-wenangnya merupakan satu-satunya prinsip pemerintahan, menunjuk seorang gubernur dan berkata kepadanya: "Jadilah wakilku di provinsi ini," ia menjadikan kesewenang-wenangan wakil presiden menjadi yang tertinggi. di provinsi ini. Dia meninggalkan, setidaknya untuk sementara, kekuatannya sendiri demi kepentingan gubernur.

Untuk menghindari hasil ini, raja mencoba membatasi kekuasaan gubernur dengan mengeluarkan arahan dan instruksi. Kode, keputusan, dan undang-undang memberitahu gubernur provinsi dan bawahannya apa yang harus dilakukan jika masalah ini atau itu muncul. Kebijakan bebas mereka sekarang terbatas tugas pertama mereka adalah mematuhi peraturan. Benar bahwa kesewenang-wenangan mereka sekarang dibatasi sejauh peraturan harus diterapkan. Tetapi pada saat yang sama seluruh karakter manajemen mereka berubah. Mereka tidak lagi berhasrat untuk menangani setiap kasus dengan kemampuan terbaik mereka; mereka tidak lagi ingin menemukan solusi yang paling tepat untuk setiap masalah. Perhatian utama mereka adalah untuk mematuhi aturan dan peraturan, tidak peduli apakah mereka masuk akal atau bertentangan dengan apa yang dimaksudkan. Keutamaan pertama seorang administrator adalah mematuhi kode dan aturan. Ia menjadi seorang birokrat.

Birokrasi dalam Demokrasi

Hal yang sama pada dasarnya berlaku untuk pemerintahan yang demokratis. Sering dinyatakan bahwa manajemen biro tidak sesuai dengan pemerintahan dan institusi yang demokratis. Ini adalah kekeliruan. Demokrasi menyiratkan supremasi hukum. Jika sebaliknya, pemegang

jabatan akan tidak bertanggung jawab dan lalim sewenang-wenang dan hakim cadis tidak stabil dan berubah-ubah. Dua pilar pemerintahan yang demokratis adalah prioritas hukum dan anggaran.

Keutamaan hukum berarti bahwa tidak ada hakim atau pemegang jabatan yang memiliki hak untuk mencampuri urusan atau kondisi individu apa pun kecuali jika hukum yang sah mengharuskan atau memberdayakannya untuk melakukannya. *Nulla poena sine lege*, tidak ada hukuman kecuali diperintahkan oleh hukum. Justru ketidakmampuan Nazi untuk memahami pentingnya prinsip fundamental ini yang menjadikan mereka sebagai antidemokratis. Dalam sistem totaliter Hitler Jerman, hakim harus mengambil keputusan berdasarkan *das gesunde Volksempfinden*, yaitu sesuai dengan perasaan rakyat yang sehat. Karena hakim sendiri harus memutuskan apa perasaan orang-orang yang sehat, ia berdaulat di kursinya seperti kepala suku suku primitif.

Ini sebenarnya adalah hal yang aneh jika seorang bajingan dan hukuman menjadi penyebab hukum cacat. Tapi itu adalah kejahatan kecil jika dibandingkan dengan kesewenang-wenangan peradilan. Jika legislator dalam demokrasi mengakui bahwa undang-undang tersebut tidak memadai, mereka dapat menggantikan undang-undang yang lebih memuaskan dengan yang kurang memuaskan. Mereka adalah mandatory of sovereign, people; mereka, dalam kapasitas ini, tertinggi dan bertanggung jawab kepada para pemilih. Jika pemilih tidak menyetujui metode yang diterapkan oleh perwakilan mereka, mereka akan, pada pemilihan berikutnya, mengembalikan laki-laki lain yang lebih tahu bagaimana menyesuaikan tindakan mereka dengan kehendak mayoritas.

Itu sama dengan kekuatan eksekutif. Di bidang ini juga hanya ada alternatif antara aturan sewenang-wenang dari pejabat kantor despotik dan aturan orang-orang yang ditegakkan dengan perantaraan abidansi hukum. Ini adalah eufemisme untuk memanggil pemerintah di mana para penguasa bebas melakukan apa pun yang mereka yakini paling baik melayani rakyat jelata sebagai *negara kesejahteraan*, dan untuk membedakannya dengan negara di mana administrasi terikat oleh hukum dan warga negara dapat membuat yang baik dalam pengadilan hukum hak mereka terhadap perambahan ilegal dari pihak berwenang. Apa yang disebut negara kesejahteraan ini sebenarnya adalah tirani para penguasa. (Kebetulan kita harus menyadari bahwa bahkan pemerintah yang lalim tidak dapat melakukan tanpa peraturan dan arahan birokrasi jika tidak merosot menjadi rezim kacau dari caciques lokal dan untuk hancur menjadi banyak despotisme kecil). Tujuan negara konstitusional. Juga kesejahteraan masyarakat. Ciri khas yang membedakannya dari despotisme adalah bahwa bukan pihak berwenang tetapi perwakilan rakyat yang terpilih harus memutuskan apa yang terbaik untuk melayani persemakmuran. Sistem ini sendiri membuat rakyat berdaulat dan mengamankan hak penentuan nasib sendiri. Di bawah sistem ini warga tidak hanya berdaulat pada hari pemilihan tetapi juga di antara pemilihan.

Administrasi, dalam komunitas demokratis, tidak hanya terikat oleh hukum tetapi juga oleh anggaran. Kontrol demokratis adalah kontrol anggaran. Perwakilan rakyat memiliki kunci perbendaharaan. Tidak sepeser pun harus dihabiskan tanpa persetujuan parlemen. Adalah ilegal menggunakan dana publik untuk pengeluaran apa pun selain pengeluaran yang dialokasikan oleh parlemen.

Manajemen birokrasi berarti, di bawah demokrasi, manajemen sesuai ketat dengan hukum dan anggaran. Bukan untuk personil administrasi dan hakim untuk menanyakan apa yang harus dilakukan untuk kesejahteraan umum dan bagaimana dana publik harus dibelanjakan. Ini adalah tugas penguasa, rakyat, dan perwakilan mereka. Pengadilan, berbagai cabang administrasi, tentara, dan angkatan laut melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum dan anggaran. Bukan mereka tetapi kedaulatan adalah pembuatan kebijakan.

Sebagian besar tiran, penguasa lalim, dan diktator dengan tulus diyakinkan bahwa kekuasaan mereka bermanfaat bagi rakyat, bahwa pemerintah mereka adalah pemerintahan *bagi rakyat*. Tidak perlu menyelidiki apakah klaim Tuan, Hitler, Stalin, dan Franco ini beralasan atau tidak. Bagaimanapun sistem mereka bukanlah pemerintahan *rakyat* atau *oleh rakyat*. Itu tidak demokratis tetapi otoriter.

Penegasan bahwa manajemen birokrasi adalah instrumen yang sangat diperlukan dari pemerintahan yang demokratis adalah paradoks. Banyak yang akan keberatan. Mereka terbiasa menganggap pemerintahan demokratis sebagai sistem pemerintahan terbaik dan manajemen birokrasi sebagai salah satu kejahatan besar. Bagaimana kedua hal ini, satu baik, lainnya buruk, dapat dihubungkan bersama?

Terlebih lagi, Amerika adalah demokrasi lama dan pembicaraan tentang penari birokrasi adalah fenomena baru di negara ini. Hanya dalam beberapa tahun terakhir orang sadar akan ancaman birokrasi, dan mereka menganggap birokrasi bukan instrumen pemerintahan yang demokratis tetapi, sebaliknya, musuh terburuk kebebasan dan demokrasi.

Terhadap keberatan-keberatan ini kita harus menjawab lagi bahwa birokrasi itu sendiri tidak baik atau buruk. Ini adalah metode manajemen yang dapat diterapkan di berbagai bidang aktivitas manusia. Ada bidang, yaitu, penanganan aparat pemerintahan, di mana metode birokrasi diperlukan oleh kebutuhan. Apa yang banyak orang anggap sebagai kejahatan bukanlah birokrasi seperti itu, tetapi perluasan lingkup dalam manajemen birokrasi yang diterapkan. Ekspansi ini adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari pembatasan progresif kebebasan individu warga negara, dari kecenderungan inheren kebijakan ekonomi dan sosial saat ini. Mengarah pada substitusi kontrol pemerintah untuk inisiatif swasta. Orang menyalahkan birokrasi, tetapi apa yang sebenarnya mereka pikirkan adalah upaya untuk menjadikan negara sosialis dan totaliter.

Selalu ada birokrasi di Amerika. Administrasi kepabeanan dan layanan luar negeri selalu dilakukan sesuai dengan prinsip birokrasi. Apa yang menjadi ciri zaman kita adalah perluasan lingkup campur tangan pemerintah dengan bisnis dan dengan banyak hal lain dari urusan warga negara. Dan ini menghasilkan substitusi manajemen birokrasi untuk manajemen laba.

Nilai Pokok Manajemen Birokrasi

Para pengacara, filsuf, dan politisi memandang pentingnya hukum dari sudut lain daripada buku ini. Dari sudut pandang mereka, fungsi utama hukum adalah untuk membatasi kekuasaan pihak berwenang dan pengadilan untuk memberikan kejahatan kepada setiap warga negara dan untuk membatasi kebebasannya. Jika seseorang memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk memenjarakan atau bahkan membunuh orang, seseorang harus membatasi dan dengan jelas mencoret kekuatan ini.

Kalau tidak, pemegang jabatan atau hakim akan berubah menjadi penguasa lalim yang tidak bertanggung jawab. Undang-undang menentukan dalam kondisi apa hakim harus memiliki hak dan kewajiban untuk menjatuhkan hukuman dan polisi menembakkan senjatanya. Hukum melindungi orang-orang dari kesewenang-wenangan mereka yang menjabat.

Pandangan buku ini agak berbeda. Di sini kita berurusan dengan birokrasi sebagai prinsip teknik administrasi dan atau organisasi. Buku ini memandang aturan dan peraturan tidak hanya sebagai langkah-langkah untuk melindungi rakyat dan untuk melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara tetapi sebagai langkah-langkah untuk melaksanakan kehendak otoritas tertinggi. Kebutuhan untuk membatasi keleluasaan makan malam hadir di setiap organisasi. Setiap organisasi akan terdispersi tanpa adanya pembatasan semacam itu. Tugas kita adalah untuk menyelidiki karakteristik khas dari manajemen birokrasi yang dibedakan dari manajemen komersial.

Manajemen birokrasi adalah manajemen yang terikat untuk mematuhi aturan dan peraturan terperinci yang ditetapkan oleh otoritas badan superior. Tugas birokrat adalah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh aturan dan peraturan ini. Kebijaksanaannya untuk bertindak sesuai dengan keyakinan terbaiknya sendiri sangat dibatasi oleh mereka.

Manajemen bisnis atau manajemen laba adalah manajemen yang diarahkan oleh motif laba. Tujuan dari manajemen bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan. Karena keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan ini dapat dipastikan dengan memperhitungkan tidak hanya untuk seluruh urusan bisnis tetapi juga untuk bagian-bagiannya, layak untuk

mendesentralisasi manajemen dan akuntabilitas tanpa membahayakan kesatuan operasi dan pencapaian tujuan mereka. Tanggung jawab dapat dibagi. Tidak perlu untuk membatasi kebebasan dari bawahan dengan aturan atau regulasi negosiasi selain itu mendasari semua kegiatan usaha, yaitu, untuk membuat operasi mereka menguntungkan.

Tujuan administrasi publik tidak dapat diukur dalam bentuk uang dan tidak dapat diperiksa dengan metode akuntansi. Ambil sistem kepolisian nasional seperti FBI. Tidak ada ukuran yang tersedia yang dapat menentukan apakah biaya yang dikeluarkan oleh salah satu cabang regional atau lokalnya tidak berlebihan. Pengeluaran kantor polisi tidak diganti oleh manajemen yang sukses dan tidak berbeda dalam proporsi dengan keberhasilan yang dicapai. Jika kepala seluruh biro ingin membiarkan kepala stasiun bawahannya bebas berkenaan dengan pengeluaran uang, hasilnya akan menjadi peningkatan besar dalam biaya karena masing-masing dari mereka akan bersemangat untuk meningkatkan layanan cabangnya sebanyak mungkin. Menjadi mustahil bagi eksekutif puncak untuk mempertahankan pengeluaran dalam alokasi yang dialokasikan oleh wakil rakyat atau dalam batas apa pun. Bukan karena ketepatan waktu sehingga peraturan administrasi menentukan berapa banyak yang bisa dihabiskan oleh masing-masing kantor lokal untuk membersihkan tempat, untuk perbaikan furnitur, dan untuk penerangan dan pemanas. Dalam masalah bisnis, hal-hal seperti itu dapat dibiarkan tanpa keraguan atas kebijaksanaan manajer lokal yang bertanggung jawab. Dia tidak akan menghabiskan lebih dari yang diperlukan karena itu, seolah-olah uangnya. Jika dia membuang-buang uang kekhawatiran, dia membahayakan laba cabang dan dengan demikian secara tidak langsung melukai kepentingannya sendiri. Tapi itu

masalah lain dengan kepala daerah dari sebuah agen pemerintah. Dengan membelanjakan lebih banyak uang, dia bisa paling tidak paling tidak, meningkatkan hasil dari urusannya. Hemat harus dikenakan padanya dengan resimenasi.

Dalam administrasi publik tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Layanan publik hanya menghabiskan uang; Penghasilan tidak signifikan yang diperoleh dari sumber-sumber khusus (misalnya, penjualan barang oleh Kantor Percetakan Pemerintah) lebih atau kurang disengaja. Pendapatan yang berasal dari bea cukai dan pajak tidak “diproduksi” oleh aparat administrasi. Sumbernya adalah hukum, bukan kegiatan petugas bea cukai dan pemungut pajak. Bukanlah pantas bagi seorang kolektor pemasukan internal yang membuat penduduk di kabupatennya lebih kaya dan membayar pajak lebih tinggi daripada yang ada di kabupaten lain. Waktu dan upaya yang diperlukan untuk penanganan administrasi pengembalian pajak penghasilan tidak sebanding dengan jumlah penghasilan kena pajak yang bersangkutan.

Dalam administrasi publik tidak ada harga pasar untuk pencapaian. Hal ini membuatnya sangat diperlukan untuk mengoperasikan kantor pusat menurut prinsip-prinsip yang sama sekali berbeda dari yang diterapkan di bawah motif laba.

Sekarang kami berada dalam posisi untuk memberikan definisi manajemen sumber daya manusia : Manajemen birokrasi adalah metode yang diterapkan dalam urusan administrasi yang hasilnya tidak memiliki nilai tunai di pasar. Ingat: Kami tidak mengatakan bahwa penanganan urusan publik yang berhasil tidak memiliki nilai, tetapi bahwa itu tidak

memiliki harga di pasar, bahwa nilainya tidak dapat direalisasikan dalam transaksi pasar dan akibatnya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk uang.

Jika kita membandingkan kondisi dua negara, katakanlah Atlantis dan Thule, kita dapat menetapkan banyak angka statistik penting dari masing-masing negara: ukuran wilayah dan populasi, tingkat kelahiran dan tingkat kematian, jumlah orang yang buta huruf, dari kejahatan yang dilakukan, dan banyak data grafisdemo lainnya. Kita dapat menentukan jumlah pendapatan uang dari semua warganya, nilai uang dari produk sosial tahunan, nilai uang dari barang yang diimpor dan diekspor, dan banyak data ekonomi lainnya. Tetapi kita tidak dapat menetapkan nilai aritmetika apa pun untuk sistem pemerintahan dan administrasi. Itu tidak berarti bahwa kita menyangkal pentingnya atau nilai pemerintahan yang baik. Itu hanya berarti bahwa tidak ada tolok ukur yang dapat mengukur hal-hal ini. Mereka tidak bertanggung jawab atas ekspresi dalam gambar.

Mungkin hal terbesar di Atlantis adalah sistem pemerintahannya yang baik. Bisa jadi Atlantis berutang kesejahteraan pada institusi konstitusional dan administrasi. Tetapi kita tidak dapat membandingkannya dengan cara yang sama seperti kita dapat membandingkan hal-hal lain, misalnya, tingkat upah atau harga susu.

Manajemen birokrasi adalah manajemen urusan yang tidak dapat dihitung dengan perhitungan ekonomi.

Inti dari Manajemen Birokrasi

Warga biasa membandingkan operasi biro dengan kerja sistem laba, yang lebih akrab baginya. Kemudian ia menemukan bahwa manajemen birokrasi boros, tidak efisien, lambat, dan digulung dalam birokrasi. Dia tidak bisa memahami bagaimana orang-orang yang masuk akal membiarkan

sistem jahat seperti itu bertahan. Mengapa tidak mengadopsi metode bisnis pribadi yang sudah dicoba?

Namun, kritik semacam itu tidak masuk akal. Mereka salah mengartikan ciri-ciri khas administrasi publik. Mereka tidak menyadari perbedaan mendasar antara pemerintah dan perusahaan swasta yang mencari untung. Apa yang mereka sebut defisiensi dan kesalahan manajemen lembaga administratif adalah properti yang diperlukan. Biro bukanlah perusahaan yang mencari untung; tidak dapat menggunakan perhitungan ekonomi apa pun; ia harus menyelesaikan masalah yang tidak diketahui oleh manajemen bisnis. Adalah mustahil untuk memperbaiki manajemennya dengan membentuk kembali sesuai dengan pola bisnis swasta. Merupakan kesalahan untuk menilai efisiensi departemen pemerintah dengan membandingkannya dengan kerja suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar.

Tentu saja, dalam administrasi publik setiap negara ada kekurangan yang mengejutkan setiap pengamat. Orang-orang kadang dikejutkan oleh tingkat maladministrasi. Tetapi jika seseorang mencoba untuk berakar, mereka sering belajar bahwa itu bukan semata-mata akibat kelalaian yang keliru atau kurangnya kompetensi. Mereka kadang-kadang berubah menjadi hasil dari kondisi politik dan kelembagaan khusus atau dari upaya untuk mencapai suatu pengaturan dengan masalah yang tidak dapat ditemukan solusi yang lebih memuaskan. Pengamatan terperinci dari semua kesulitan yang terlibat dapat meyakinkan penyelidik yang jujur bahwa, mengingat keadaan umum kekuatan politik, dia sendiri tidak akan tahu bagaimana menangani masalah ini dengan cara yang kurang menyenangkan.

Sia-sia untuk mengadvokasi reformasi birokrasi melalui penunjukan pengusaha sebagai kepala berbagai departemen. Kualitas menjadi wirausahawan tidak melekat dalam kepribadian wirausahawan; itu melekat dalam posisi yang ia tempati dalam kerangka masyarakat pasar. Seorang mantan pengusaha yang diberi tanggung jawab atas biro pemerintah dalam kapasitas ini bukan lagi seorang pengusaha, tetapi seorang birokrat. Tujuannya tidak bisa hanya untung, tetapi kepatuhan dengan aturan dan peraturan. Sebagai kepala biro, ia mungkin memiliki kekuatan untuk mengubah beberapa aturan kecil dan beberapa masalah prosedur internal. Tetapi pengaturan kegiatan biro ditentukan oleh aturan dan peraturan yang berada di luar jangkauannya.

Ilusi luas bahwa efisiensi biro pemerintah dapat ditingkatkan oleh insinyur manajemen dan metode manajemen ilmiah mereka. Namun, rencana semacam itu berasal dari misalnya konstruksi radikal dari tujuan pemerintah sipil. Seperti halnya teknik apa pun, rekayasa manajemen juga dilengkapi dengan ketersediaan metode perhitungan. Metode seperti itu ada dalam bisnis pencarian laba. Di sini pernyataan untung dan rugi adalah yang tertinggi. Masalah manajemen birokrasi justru tidak adanya metode perhitungan seperti itu.

Di bidang usaha mencari laba, tujuan dari kegiatan teknis adalah ditentukan oleh keutamaan motif laba. Tugasnya adalah untuk mengurangi biaya tanpa mengganggu nilai pasar dari hasil atau untuk mengurangi biaya lebih dari pengurangan nilai pasar hasil berikutnya atau untuk meningkatkan nilai pasar hasil lebih dari kenaikan biaya yang diperlukan. Tetapi di bidang pemerintahan hasilnya tidak ada harga di pasar. Itu tidak bisa dibeli atau dijual.

Mari kita perhatikan tiga contoh berikut:

Departemen kepolisian bertugas melindungi pabrik pertahanan terhadap sabotase. Ini menugaskan tiga puluh petugas patroli untuk tugas ini. Komisaris yang bertanggung jawab tidak memerlukan saran dari pakar efisiensi untuk mengetahui bahwa ia dapat menghemat uang dengan mengurangi penjaga menjadi hanya dua puluh orang. Tetapi pertanyaannya adalah: Apakah ekonomi ini lebih besar daripada peningkatan risiko? Ada hal-hal serius yang dipertaruhkan: pertahanan nasional, moral angkatan bersenjata dan warga sipil, reaksi di bidang urusan luar negeri, kehidupan banyak pekerja yang jujur. Semua hal yang berharga ini tidak dapat dinilai dari segi uang. Tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Kongres yang mengalokasikan alokasi yang diperlukan dan dengan cabang eksekutif pemerintah. Mereka tidak dapat menghindarinya dengan menyerahkan keputusan kepada penasihat yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu tugas dari Biro Pendapatan Nasional adalah tugas akhir untuk menentukan pajak yang harus dibayar. Tugasnya adalah penafsiran dan penerapan hukum. Ini bukan hanya pekerjaan klerikal; itu adalah semacam fungsi yudisial. Pembayar pajak yang keberatan dengan interpretasi komisioner terhadap hukum bebas untuk mengajukan gugatan di pengadilan Federal untuk memulihkan jumlah yang dibayarkan. Apa gunanya insinyur efisiensi dengan waktu dan studi geraknya untuk pelaksanaan urusan ini? Stopwatch-nya akan berada di tempat yang salah di ruang kantor biro. Jelaslah bahwa (hal-hal lain dianggap sama) seorang pegawai yang bekerja lebih cepat lebih disukai daripada karyawan lain yang lebih lambat. Tetapi masalah utama adalah kualitas dari kinerja. Hanya panitera senior yang berpengalaman yang dapat menghargai dengan

sepantasnya prestasi para pembantunya. Pekerjaan intelektual tidak dapat diukur dan dinilai oleh perangkat mekanis.

Mari kita akhirnya mempertimbangkan sebuah contoh di mana tidak ada masalah politik "lebih tinggi" maupun masalah penerapan hukum yang benar. Biro bertanggung jawab untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan teknis pekerjaan kantor. Ini adalah pekerjaan yang relatif sederhana. Tapi itu sama sekali bukan pekerjaan mekanik. Petugas terbaik bukanlah dia yang mengisi jumlah pesanan terbesar dalam satu jam. Kinerja yang paling memuaskan adalah membeli bahan yang paling sesuai dengan harga termurah.

Oleh karena itu, sejauh menyangkut manajemen pemerintah, tidak tepat untuk menyatakan bahwa studi waktu, studi gerak, dan alat-alat lain dari manajemen ilmiah "menunjukkan dengan akurasi yang wajar berapa banyak waktu dan upaya yang diperlukan untuk masing-masing metode yang tersedia" dan karena itu mereka "dapat menunjukkan metode dan prosedur mana yang mungkin memerlukan waktu dan upaya paling sedikit." Semua hal semacam itu tidak berguna karena tidak dapat dikoordinasikan dengan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kecepatan saja bukanlah ukuran pekerjaan intelektual. Anda tidak dapat "mengukur" dokter sesuai dengan waktu yang digunakannya dalam memeriksa satu kasus. Dan Anda tidak dapat "mengukur" hakim sesuai dengan waktu yang ia butuhkan untuk memutuskan satu kasus.

Jika seorang pengusaha memproduksi beberapa file artikel yang ditujukan untuk ekspor ke luar negeri, ia ingin mengurangi jam kerja yang dihabiskan untuk produksi berbagai bagian komoditas tersebut. Tetapi lisensi yang diperlukan untuk pengiriman komoditas ini ke luar negeri bukan

bagian dari komoditas. Pemerintah dalam menerbitkan lisensi tidak memberikan kontribusi apa pun untuk produksi, pemasaran, dan pengiriman komoditas ini. Bironya bukan bengkel yang mengubah salah satu bagian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk. Apa yang pemerintah maksudkan dalam membuat ekspor bergantung pada pemberian lisensi adalah menahan perdagangan ekspor. Ia ingin mengurangi total volume ekspor atau volume yang diekspor oleh eksportir yang tidak diinginkan atau dijual kepada pembeli yang tidak diinginkan. Penerbitan lisensi bukan tujuan tetapi perangkat teknis untuk pencapaiannya. Dari sudut pandang pemerintah, lisensi yang ditolak atau bahkan tidak dilamar lebih penting daripada yang diberikan. Oleh karena itu, tidak dengan tujuan untuk mengambil "total jam kerja yang dihabiskan per lisensi" sebagai standar kinerja biro. Akan tidak cocok untuk melakukan "operasi pemrosesan lisensi. . . berdasarkan jalur perakitan. "

Ada perbedaan lainnya. Jika dalam proses suatu proses manufaktur, suatu bagian akan rusak atau hilang, hasilnya adalah peningkatan biaya produksi yang terbatas. Tetapi jika aplikasi lisensi hilang di biro, kerusakan serius dapat ditimbulkan pada warga negara. Undang-undang dapat mencegah orang yang dirugikan menuntut biro untuk ganti rugi. Namun tanggung jawab politik dan moral pemerintah untuk menangani aplikasi ini dengan cara yang sangat hati-hati tetap ada.

Perilaku urusan pemerintah sama berbeda dengan proses persidangan industri seperti halnya penuntutan, pemidanaan, dan menghukum seorang pembunuh dari tumbuhnya jagung atau pembuatan sepatu. Efisiensi pemerintah dan efisiensi industri seluruhnya berbeda. Sebuah fac manajemen tory tidak dapat ditingkatkan dengan mengambil

departemen kepolisian untuk model nya, dan kantor pemungut cukai ini tidak dapat menjadi lebih efisien dengan mengadopsi metode pabrik motor-mobil. Lenin keliru dalam mengangkat biro-biro pemerintah sebagai pola industri. Tetapi mereka yang ingin menjadikan manajemen biro sama dengan pabrik-pabrik juga tidak salah.

Ada banyak hal tentang administrasi pemerintahan yang perlu direformasi. Tentu saja, semua institusi manusia harus terus-menerus disesuaikan lagi dengan perubahan kondisi. Tetapi tidak ada reformasi yang dapat mengubah kantor publik menjadi semacam perusahaan swasta. Pemerintah bukanlah perusahaan yang mencari untung. Perilaku urusannya tidak bisa diperiksa dengan laporan laba-rugi. Pencapaiannya tidak bisa dinilai dari segi uang. Ini adalah dasar untuk setiap penanganan masalah birokrasi.

Manajemen Personil Birokrasi

Seorang birokrat berbeda dari seorang non-birokrat tepatnya karena dia bekerja di bidang di mana tidak mungkin untuk menilai hasil dari upaya seorang pria dalam hal uang. Bangsa ini menghabiskan uang untuk pemeliharaan biro, untuk pembayaran salar ies dan upah, dan untuk mengejar semua equipment dan bahan yang dibutuhkan. Tapi wh itu mendapat untuk pengeluaran, yang layanan yang diberikan, tidak bisa akan dinilai dalam bentuk uang, namun yang penting dan berharga ini “output” mungkin. Penilaiannya tergantung pada kebijaksanaan pemerintah.

Memang benar bahwa penilaian berbagai komoditas yang dijual dan dibeli di pasar tidak kurang bergantung pada kebijaksanaan, yaitu pada kebijaksanaan konsumen. Tetapi karena konsumen adalah kumpulan besar orang yang berbeda, agregasi anonim dan tidak berbentuk, penilaian yang

mereka berikan diubah menjadi fenomena yang tidak bersifat pribadi, harga pasar, dan dengan demikian dipisahkan dari asal-usul mereka yang sewenang-wenang. Terlebih lagi, mereka merujuk pada moda komersial dan layanan seperti itu, bukan untuk pemain mereka. Hubungan penjual-pembeli dan juga kegemaran pengusaha-karyawan dalam mencari untung bisnis adalah murni fakta dan impersonal. Ini adalah kesepakatan dari mana kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Mereka saling berkontribusi untuk kehidupan satu sama lain. Tapi itu different dengan organisasi birokrasi. Di sana hubungan antara atasan dan bawahan bersifat pribadi. Bawahan tergantung pada penilaian atasan terhadap kepribadiannya, bukan pada pekerjaannya. Selama petugas kantor dapat mengandalkan peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan bisnis pribadi, ketergantungan ini tidak dapat menjadi begitu menekan untuk menandai seluruh karakter pegawai. Tetapi ini berbeda di bawah kecenderungan saat ini menuju birokratisasi umum.

Adegan Amerika sampai beberapa tahun yang lalu tidak mengenal *burea u crat* sebagai tipe manusia tertentu. Selalu ada biro dan mereka, karena kebutuhan, dioperasikan dengan cara birokratis. Tetapi tidak ada banyak kelas pria yang menganggap bekerja di kantor publik panggilan eksklusif mereka. Ada sebuah cont inuous pergantian personel antara pekerjaan pemerintah dan swasta obs. Di bawah ketentuan layanan sipil, layanan publik menjadi karier reguler. Pengangkatan didasarkan pada pemeriksaan dan tidak lagi tergantung pada afiliasi politik para pelamar. Banyak yang tetap berada di biro publik seumur hidup. Tapi mereka kembali mempertahankan kemandirian pribadi mereka karena mereka selalu dapat mempertimbangkan untuk kembali ke pekerjaan pribadi.

Itu berbeda di benua Eropa. Di sana para birokrat telah lama membentuk kelompok terpadu. Hanya beberapa pria terkemuka yang kembali ke kehidupan tidak resmi yang praktis terbuka. Mayoritas diikat dengan biro seumur hidup. Mereka mengembangkan karakter yang khas pada penghapusan permanen mereka dari dunia bisnis yang mencari kecocokan. Mereka di cakrawala tellectual adalah hirarki dan aturan dan peraturan. Nasib mereka sepenuhnya bergantung pada bantuan atasan mereka. Mereka tunduk pada kekuasaan mereka tidak hanya saat bertugas. Dipahami bahwa kegiatan pribadi mereka juga—dan bahkan aktivitas mereka—harus sesuai dengan martabat posisi mereka dan dengan kode perilaku khusus—tidak tertulis—yang menjadi perhatian *Staatsbeamter* atau *fonctionnaire (pejabat negara)*. Diharapkan bahwa mereka akan mendukung sudut pandang politis para menteri kabinet yang kebetulan saat itu berada di kantor. Bagaimanapun, kebebasan mereka untuk mendukung partai oposisi dibatasi secara bijaksana.

Munculnya kelas orang-orang seperti itu yang bergantung pada pemerintah menjadi ancaman serius bagi pemeliharaan lembaga-lembaga konstitusional. Berbagai upaya dilakukan untuk melindungi pegawai tersebut dari kesewenang-wenangan pihak atasannya. Tetapi satu-satunya hasil yang dicapai adalah bahwa disiplin santai dan bahwa kelonggaran dalam pelaksanaan tugas semakin menyebar.

Amerika adalah pemula dalam bidang birokrasi. Ini memiliki pengalaman yang jauh lebih sedikit dalam hal ini daripada yang diperoleh negara-negara klasik birokrasi, Prancis, Jerman, Austria, dan Rusia. Di Amerika Serikat masih ada kecenderungan condong ke arah penilaian berlebih terhadap manfaat peraturan pegawai negeri. Peraturan semacam

itu mensyaratkan bahwa pelamar harus berusia tertentu, lulus dari sekolah sertifikasi, dan lulus ujian tertentu. Untuk promosi ke peringkat yang lebih tinggi dan gaji yang lebih tinggi, sejumlah tertentu tahun yang dihabiskan di peringkat bawah dan lulus ujian lebih lanjut diperlukan. Jelas bahwa semua persyaratan tersebut merujuk pada hal-hal yang kurang lebih dangkal. Tidak perlu menunjukkan bahwa kehadiran di sekolah, ujian, dan tahun-tahun yang dihabiskan di posisi yang lebih rendah tidak selalu membuat orang memenuhi syarat untuk pekerjaan yang lebih tinggi. Mesin untuk seleksi ini kadang-kadang melarang orang yang paling kompeten dari suatu pekerjaan dan tidak selalu mencegah penunjukan yang benar-benar tidak kompeten. Tetapi efek terburuk yang dihasilkan adalah bahwa perhatian utama panitera adalah untuk mematuhi formalitas ini dan lainnya. Mereka lupa bahwa pekerjaan mereka adalah melakukan tugas yang ditugaskan sebaik mungkin.

Dalam sistem kepegawaian yang diatur dengan baik, promosi ke pangkat lebih tinggi terutama bergantung pada senioritas. Sebagian besar kepala biro adalah orang tua yang tahu bahwa setelah beberapa tahun mereka akan pensiun. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di posisi bawahan, mereka kehilangan semangat dan inisiatif. Mereka menghindari inovasi dan peningkatan. Mereka memandang setiap proyek untuk reformasi sebagai gangguan ketenangan mereka. Konservatisme mereka yang kaku menggagalkan semua upaya seorang menteri kabinet untuk menyesuaikan layanan dengan kondisi yang berubah. Mereka memandang rendah menteri kabinet sebagai orang awam yang tidak berpengalaman. Di semua negara dengan birokrasi mapan orang-orang biasa berkata: Kabinet datang dan pergi, tetapi biro tetap ada.

Ini akan menjadi kesalahan untuk menganggap frustrasi birokratisme Eropa untuk kekurangan intelektual dan moral personil. Di semua negara ini ada banyak keluarga baik yang keturunannya memilih karier birokrasi karena mereka secara jujur berniat melayani bangsa mereka. Cita-cita seorang bocah miskin yang cemerlang yang ingin mencapai posisi yang lebih baik dalam hidup adalah bergabung dengan staf administrasi. Banyak anggota intelegensia yang paling berbakat dan tinggi melayani di biro. Gengsi dan kedudukan sosial pegawai pemerintah jauh melampaui mereka dari kelas populasi mana pun, kecuali para perwira militer dan anggota keluarga aristokrat tertua dan terkaya.

Banyak pegawai negeri sipil menerbitkan risalah yang sangat bagus tentang masalah hukum administrasi dan statistik. Beberapa di antara mereka berada di waktu senggang penulis yang brilian atau musisi. Yang lain memasuki bidang politik dan menjadi pemimpin partai yang terkemuka. Tentu saja, sebagian besar birokrat adalah orang yang agak biasa-biasa saja. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa sejumlah besar orang yang mampu ditemukan di jajaran pegawai pemerintah.

Kegagalan birokrasi Eropa tentu bukan karena kurangnya personel. Itu adalah hasil dari kelemahan administrasi urusan publik yang tak terhindarkan. Kurangnya standar yang bisa, dengan cara yang tidak perlu dipertanyakan, memastikan keberhasilan atau tidak berhasilnya pelaksanaan tugas pejabat menciptakan masalah yang tak terpecahkan. Ini membunuh ambisi, menghancurkan inisiatif dan insentif untuk melakukan lebih dari yang diperlukan. Itu membuat birokrat melihat instruksi, bukan pada materi dan kesuksesan nyata.

Bab III

Birokasi dan Badan Usaha Milik Publik

Ketidakmungkinan Pelaksanaan Seluruhnya Pemerintah yang Mengatur

Sosialisme, yaitu kendali penuh atas semua kegiatan ekonomi, tidak praktis karena sebuah komunitas sosialis tidak akan memiliki instrumen intelektual perencanaan dan perancangan ekonomi yang tidak dapat ditebus: perhitungan ekonomi. Gagasan perencanaan pusat oleh negara adalah kontradiktif dengan diri sendiri. Dewan manajemen sosialis pusat akan tidak berdaya menghadapi masalah yang harus dipecahkan. Tidak akan pernah tahu apakah proyek yang dianggap menguntungkan atau apakah kinerjanya tidak akan membuang-buang sarana yang tersedia. Sosialisme harus menghasilkan kekacauan total.

Pengakuan akan kebenaran ini selama bertahun-tahun telah dicegah oleh tabu-tabu Marxisme. Salah satu kontribusi utama Marxisme bagi keberhasilan propaganda pro-sosialis adalah melarang studi masalah ekonomi dari persemakmuran sosialis. Studi-studi semacam itu menurut pendapat Karl Marx dan sekte-nya adalah tanda dari sebuah "utopianisme ilusi." Sosialisme "ilmiah", sebagaimana Marx dan Engels menyebut merek mereka sendiri, tidak boleh terlibat dalam penyelidikan yang tidak berguna ini. Kaum sosialis "ilmiah" harus memuaskan diri mereka sendiri dengan wawasan bahwa sosialisme pasti akan datang dan akan mengubah bumi menjadi firdaus. Mereka tidak boleh terlalu masuk akal untuk bertanya bagaimana sistem sosialis akan bekerja.

Salah satu fakta paling menonjol dari sejarah intelektual abad ke – 19 dan awal abad ke-20 adalah bahwa Marxian *Verboten* ini benar-benar

dipatuhi. Beberapa ekonom yang berani menentanginya tidak dihargai dan segera dilupakan. Hanya sekitar dua puluh lima tahun yang lalu mantra itu rusak. Kemustahilan perhitungan ekonomi di bawah sosialisme didemonstrasikan dengan cara yang tak terbantahkan.

Tentu saja, beberapa orang Marxis yang keras kepala mengajukan keberatan. Mereka mau tidak mau mengakui bahwa masalah perhitungan ekonomi adalah masalah sosialisme yang paling serius dan bahwa itu adalah skandal bahwa para sosialis dalam delapan puluh tahun propaganda fanatik menyia-nyiaikan waktu mereka pada hal-hal sepele tanpa meramalkan apa yang menjadi masalah utama. Tetapi mereka meyakinkan partisan mereka yang ketakutan bahwa akan lebih mudah untuk menemukan solusi yang memuaskan. Memang, berbagai profesor dan penulis sosialis baik di Rusia dan di negara-negara Barat menyarankan chemes untuk kalkulus ekonomi di bawah sosialisme. Skema ini terbukti sangat palsu. Tidak sulit bagi para ekonom untuk mengungkap kekeliruan dan kontradiksi mereka. Kaum sosialis gagal total dalam upaya putus asa mereka untuk menolak demonstrasi bahwa tidak ada perhitungan ekonomi yang layak dalam sistem sosialisme apa pun.

Hal ini jelas bahwa manajemen sosialis juga akan bertujuan memasok masyarakat dengan komoditas sebanyak dan sebagus yang dapat diproduksi di bawah kondisi dari pasokan faktor produksi dan pengetahuan teknologi yang ada. Pemerintah sosialis juga akan bersemangat untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang-barang yang menurut pendapatnya sangat dibutuhkan, dan melepaskan produksi barang-barang yang dianggapnya kurang dibutuhkan dengan cepat. Tetapi perhitungan ekonomi yang tidak layak akan membuat

mustahil untuk menemukan metode produksi barang yang dibutuhkan adalah yang paling ekonomis.

Pemerintah sosialis Rusia dan Jerman beroperasi di dunia yang sebagian besar masih melekat pada ekonomi pasar. Dengan demikian mereka berada dalam posisi untuk menggunakan perhitungan ekonomi mereka harga yang ditetapkan di luar negeri. Hanya karena mereka dapat merujuk pada harga-harga ini mereka dapat menghitung, menyimpan buku, dan membuat uang. Akan sangat berbeda jika setiap negara mengadopsi sosialisme. Maka tidak akan ada lagi harga untuk faktor-faktor produksi dan perhitungan ekonomi menjadi tidak mungkin.

Perusahaan Publik dalam Ekonomi Pasar

Demikian pula halnya dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah di mana sebagian besar kegiatan ekonomi berada di bawah pengelolaan perusahaan bebas. Bagi mereka perhitungan ekonomi juga tidak menawarkan kesulitan.

Kita tidak perlu bertanya apakah layak untuk mengelola perusahaan pemerintah, negara bagian dan kota tersebut dengan cara yang sama dengan perusahaan swasta. Karena itu adalah fakta bahwa sebagai aturan, pihak berwenang cenderung menyimpang dari sistem laba. Mereka tidak ingin mengoperasikan perusahaan mereka dari sudut pandang pencapaian laba sebesar mungkin. Mereka menganggap penyelesaian tugas-tugas lain lebih penting. Mereka siap untuk melepaskan laba atau setidaknya sebagian dari laba atau bahkan mengambil kerugian untuk pencapaian tujuan lainnya.

Apa pun tujuan yang ingin dicapai oleh tujuan lain ini, hasil dari kebijakan semacam itu selalu sama dengan mensubsidi sebagian orang

dengan beban orang lain. Jika perusahaan milik pemerintah beroperasi dengan kerugian atau hanya sebagian dari laba yang dapat diperoleh jika dilakukan semata-mata sesuai dengan motif laba, penurunan tersebut mempengaruhi anggaran dan dengan demikian pembayar pajak. Jika, misalnya, sistem transportasi milik kota membebani pelanggan dengan tarif sangat rendah sehingga biaya operasi tidak dapat ditanggung, para pembayar pajak sebenarnya mensubsidi mereka yang naik kereta.

Tetapi kita tidak perlu, dalam sebuah buku yang membahas masalah-masalah birokrasi, mengganggu aspek-aspek keuangan ini. Dari sudut pandang kami, hasil lain harus dipertimbangkan.

Segera setelah suatu usaha tidak lagi dioperasikan dengan motif laba, prinsip-prinsip lain harus diadopsi untuk pelaksanaan urusannya. Otoritas kota tidak bisa hanya menginstruksikan manajer: Jangan repot-repot tentang keuntungan. Mereka harus memberinya perintah yang lebih pasti dan tepat. Perintah macam apa ini?

Juara perusahaan dinasionalisasi dan kota cenderung untuk menjawab pertanyaan ini dengan cara yang agak naif: Tugas perusahaan publik adalah untuk memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi masalahnya tidak sesederhana ini. Tugas tunggal setiap upaya adalah membuat layanan yang bermanfaat. Tetapi apa arti istilah ini? Siapa, dalam kasus perusahaan publik, untuk memutuskan apakah suatu layanan bermanfaat? Dan jauh lebih penting: Bagaimana kita mengetahui apakah layanan yang diberikan tidak dibayar terlalu banyak yaitu, apakah faktor-faktor produksi yang diserap oleh kinerjanya tidak ditarik dari jalur pemanfaatan lain di mana mereka dapat memberikan layanan yang lebih bernilai?

Dengan perusahaan pencari keuntungan swasta masalah ini diselesaikan oleh sikap publik. Bukti kegunaan layanan yang diberikan adalah bahwa sejumlah warga yang cukup siap membayar harga yang diminta untuk mereka. Tidak ada keraguan tentang fakta bahwa pelanggan menganggap layanan yang diberikan oleh toko roti bermanfaat. Mereka siap membayar harga yang diminta untuk roti. Di bawah harga ini, produksi roti cenderung meluas sampai saturasi tercapai, yaitu sampai ekspansi lebih lanjut akan menarik faktor-faktor produksi dari cabang-cabang industri yang produknya lebih banyak diminati oleh konsumen. Dalam mengambil motif laba sebagai panduan, perusahaan bebas menyesuaikan aktivitasnya dengan keinginan publik. Motif keuntungan mendorong setiap pengusaha untuk mencapai layanan yang dianggap paling mendesak oleh konsumen. Struktur harga pasar memberi tahu mereka betapa bebasnya mereka berinvestasi di setiap cabang produksi.

Tetapi jika perusahaan publik ingin dioperasikan tanpa memperhatikan keuntungan, perilaku publik tidak lagi memberikan kriteria kegunaannya. Jika pemerintah atau otoritas kota diputuskan untuk melanjutkan meskipun fakta bahwa biaya operasi tidak dibuat oleh pembayaran yang diterima dari pelanggan, di mana kriteria dapat ditemukan tentang kegunaan dari layanan yang diberikan? Bagaimana kita bisa mengetahui apakah defisitnya tidak terlalu besar terkait layanan ini? Dan bagaimana mengetahui apakah defisit tidak dapat dikurangi tanpa merusak nilai layanan?

Bisnis swasta akan hancur jika operasinya hanya membawa kerugian dan tidak ada cara untuk memperbaiki situasi ini. Tidak menguntungkannya adalah bukti dari kenyataan bahwa konsumen tidak mengizinkannya.

Dengan perusahaan swasta, tidak ada cara untuk menentang putusan publik ini dan mempertahankannya. Manajer pabrik yang melibatkan kerugian dapat menjelaskan dan memaafkan kegagalan. Tetapi permintaan maaf seperti itu tidak ada gunanya mereka tidak dapat mencegah pengabaian terakhir dari proyek yang gagal.

Berbeda dengan perusahaan publik. Di sini, penampilan defisit tidak dianggap sebagai bukti kegagalan. Manajer tidak bertanggung jawab untuk itu. Tanggung jawab bertujuan pada atasan, pemerintah, untuk menjual dengan harga yang sedemikian rendah sehingga kerugian menjadi tidak terhindarkan. Tetapi jika pemerintah membatasi pembatasannya dengan menetapkan harga penjualan dan menyerahkan semua yang lain kepada manajer, itu akan memberinya kekuatan penuh untuk menarik dana perbendaharaan.

Penting untuk menyadari bahwa masalah kita tidak ada hubungannya sama sekali dengan keharusan mencegah manajer dari penyalahgunaan kriminal atas kekuasaannya. Kami berasumsi bahwa pemerintah pusat atau pemerintah daerah telah menunjuk seorang manajer yang jujur dan efisien dan bahwa iklim moral negara atau kota dan organisasi yang bersangkutan memberikan perlindungan yang memuaskan terhadap segala kesalahan yang mengerikan. Masalah kita sangat berbeda. Ini berasal dari kenyataan bahwa setiap layanan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengeluaran. Betapapun bagusnya pemerintahan di rumah sakit, sistem kereta bawah tanah, atau saluran air mungkin, manajer selalu tahu bagaimana ia dapat meningkatkan layanan asalkan dana yang dibutuhkan tersedia. Dalam bidang apa pun yang diinginkan manusia, kepuasan penuh tidak dapat dicapai sedemikian rupa sehingga tidak ada

peningkatan lebih lanjut yang dimungkinkan. Para spesialis berniat meningkatkan kepuasan kebutuhan hanya di cabang kegiatan khusus mereka. Mereka tidak dan tidak bisa repot-repot memeriksa cek mana perluasan pabrik yang dipercayakan kepada mereka akan dikenakan pada kelas-kelas lain dari kebutuhan-kepuasan. Bukan tugas direktur rumah sakit untuk meninggalkan beberapa perbaikan rumah sakit kota agar tidak menghambat peningkatan sistem kereta bawah tanah atau sebaliknya. Justru manajer yang efisien dan jujur yang akan mencoba membuat layanan pakaiannya sebaik mungkin. Tetapi karena ia tidak terkekang oleh pertimbangan kesuksesan finansial, biaya yang terlibat akan membebani dana publik. Dia akan menjadi semacam pemboros uang pembayar pajak yang tidak bertanggung jawab. Karena ini tidak mungkin, pemerintah harus memperhatikan banyak detail manajemen. Ini harus mendefinisikan dengan cara yang tepat kualitas dan kuantitas layanan yang akan diberikan dan komoditas yang akan dijual itu harus saya karena petunjuk terperinci con mempelajari metode yang akan diterapkan dalam pembelian faktor-faktor material produksi dan dalam mempekerjakan dan memberi imbalan tenaga kerja. Karena akun untung atau rugi tidak dianggap sebagai kriteria keberhasilan atau kegagalan manajemen, satu-satunya cara untuk membuat manajer bertanggung jawab kepada bos, perbendaharaan, adalah membatasi kebijaksanaannya dengan aturan dan peraturan. Jika ia yakin perlu mengeluarkan lebih dari yang diizinkan oleh instruksi ini, ia harus mengajukan permohonan alokasi uang khusus. Dalam hal ini keputusan ada pada atasannya, pemerintah, atau kotamadya. Bagaimanapun, manajer bukanlah eksekutif bisnis tetapi seorang birokrat, yaitu seorang petugas yang terikat untuk mematuhi berbagai instruksi. Kriteria manajemen yang

baik bukanlah persetujuan pelanggan yang menghasilkan kelebihan pendapatan atas biaya tetapi kepatuhan ketat terhadap seperangkat aturan birokrasi. Aturan manajemen tertinggi tunduk pada aturan seperti itu.

Tentu saja, pemerintah atau dewan kota (legistatif) akan bersemangat untuk merancang peraturan dan regulasi ini sedemikian rupa sehingga layanan yang diberikan menjadi berguna seperti yang mereka inginkan dan defisit tidak lebih tinggi dari yang mereka inginkan. Tapi ini tidak menghilangkan karakter birokrasi dalam menjalankan urusan. Manajemen berada di bawah keharusan untuk mematuhi kode instruksi; ini saja yang penting. Manajer tidak bertanggung jawab jika tindakannya benar dari sudut pandang kode ini. Tugas utamanya bukan efisiensi seperti itu, tetapi efisiensi dalam batas kepatuhan terhadap peraturan. Posisinya bukan sebagai eksekutif di perusahaan pencari untung, tetapi sebagai pegawai negeri, misalnya, kepala departemen kepolisian.

Satu-satunya alternatif untuk mencari-cari bisnis adalah manajemen birokrasi. Akan sangat tidak praktis untuk mendelegasikan kepada setiap individu atau kelompok individu kekuatan untuk menggunakan dana publik dengan bebas. Penting untuk membatasi kekuatan para manajer dari sistem nasionalisasi atau sistem daerah oleh birokrasi seadanya jika mereka tidak dijadikan pembelanja uang publik yang tidak bertanggung jawab dan jika manajemen mereka tidak mengacaukan seluruh anggaran.

Bab IV

Birokratisasi pada Perusahaan Swasta

Tidak ada perusahaan swasta yang akan menjadi mangsa metode manajemen birokratis jika dioperasikan dengan tujuan tunggal untuk menghasilkan keuntungan. Telah ditunjukkan bahwa di bawah motif laba setiap agregat industri, tidak peduli sebesar apa pun itu, berada dalam posisi untuk mengatur seluruh bisnisnya dan setiap bagiannya sedemikian rupa sehingga semangat akuisisi modal dapat meresap dari atas ke bawah.

Tapi kita adalah zaman serangan umum pada motif laba. Opini publik mengutuknya sebagai sangat tidak bermoral dan sangat merusak persemakmuran. Partai-partai politik dan pemerintah sangat ingin memindahkannya dan menempatkan apa yang mereka sebut sebagai sudut pandang “layanan” dan apa yang sebenarnya merupakan manajemen birokrasi.

Kita tidak perlu membahas secara terperinci apa yang telah dicapai oleh Nazi dalam hal ini. Nazi telah berhasil sepenuhnya menghilangkan motif keuntungan dari kondisi bisnis. Di Jerman tidak ada lagi pertanyaan tentang usaha bebas. Tidak ada lagi pengusaha. Mantan wirausahawan telah direduksi menjadi status *Betriebsführer* (manajer toko). Mereka tidak bebas dalam operasi mereka; mereka terikat untuk mematuhi tanpa syarat perintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Manajemen Produksi, yang *Reichswirtschaftsministerium*, dan kantor distrik dan cabang bawahannya. Pemerintah tidak hanya menentukan harga dan tingkat bunga yang harus dibayar dan diminta, tinggi upah dan gaji, berapa yang harus diproduksi dan metode yang harus diterapkan dalam produksi itu memberikan pemasukan yang pasti kepada

setiap manajer toko , sehingga secara virtual mengubah dirinya menjadi pegawai negeri yang digaji. Sistem ini memiliki, tetapi untuk penggunaan beberapa istilah, tidak ada kesamaan dengan kapitalisme dan ekonomi pasar. Ini hanyalah sosialisme dari pola Jerman, *Zwangswirtschaft*. Berbeda dari pola sosialisme Rusia, sistem nasionalisasi langsung semua pabrik, hanya dalam hal teknis. Dan, tentu saja, seperti sistem Rusia, mode organisasi sosial yang murni otoriter.

Di seluruh dunia, hal-hal yang belum berjalan sejauh itu. Di negara-negara Anglo-Saxon masih ada perusahaan swasta. Tetapi kecenderungan umum zaman kita adalah membiarkan pemerintah mengganggu bisnis swasta. Dan campur tangan ini dalam banyak hal memaksa manajemen birokrasi pada perusahaan swasta.

1. Interferensi dengan Tingginya Keuntungan

Pemerintah dapat menerapkan berbagai metode untuk membatasi keuntungan yang perusahaan bebas untuk mendapatkan. Metode yang paling sering digunakan adalah:

- 1) Keuntungan yang diperoleh oleh suatu kelas khusus dari usaha bebas adalah terbatas. Surplus akan diserahkan kepada otoritas (misalnya, kota) atau untuk didistribusikan sebagai bonus kepada karyawan atau harus dihilangkan dengan pengurangan tarif atau harga yang dibebankan kepada pelanggan.
- 2) Otoritas bebas menentukan harga atau tarif yang diberikan oleh hadiah yang masuk untuk komoditas yang dijual atau layanan yang diberikan. Ia menggunakan kekuatan ini untuk mencegah apa yang disebutnya keuntungan berlebihan.

- 3) Perusahaan tidak bebas membebankan biaya lebih banyak untuk komoditas yang dijual dan layanan yang diberikan dari biaya aktual ditambah jumlah tambahan yang ditentukan oleh otoritas baik sebagai persentase dari biaya atau sebagai biaya tetap.
- 4) Perusahaan bebas menghasilkan sebanyak yang dimungkinkan oleh kondisi pasar; tetapi pajak menyerap semua laba atau sebagian besar di atas jumlah tertentu.

Apa yang umum pada semua contoh ini adalah kenyataan bahwa perusahaan tidak lagi tertarik untuk meningkatkan keuntungannya. Itu kehilangan insentif untuk menurunkan biaya dan melakukan tugasnya seefisien dan semurah mungkin. Tetapi di sisi lain semua pemeriksaan pada perbaikan dalam prosedur dan upaya untuk mengurangi biaya tetap ada. Risiko yang terkait dengan adopsi perangkat hemat biaya baru jatuh pada pengusaha. Ketidaksepakatan yang saya alami dalam menolak permintaan karyawan akan upah dan gaji yang lebih tinggi menjadi tanggung jawabnya.

Opini publik, yang bias oleh dongeng palsu kaum sosialis, terburu-buru menyalahkan pengusaha. Dikatakan kepada kita, amoralitas mereka yang berakibat pada menurunnya efisiensi. Jika mereka sama teliti dan mengabdikan diri untuk memajukan kesejahteraan publik seperti halnya pegawai negeri yang tidak mementingkan diri sendiri, mereka dengan teguh akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pelayanan, meskipun kepentingan keuntungan pribadi mereka tidak diimbangi. Ini adalah keserakahan mereka yang membahayakan kerja perusahaan di bawah peluang keuntungan yang terbatas. Mengapa seorang pria tidak melakukan yang terbaik meskipun ia mungkin tidak

mengharapkan keuntungan pribadi dari kinerja yang paling menguntungkan dari tugasnya?

Tidak ada yang lebih masuk akal daripada mengangkat birokrat sebagai model bagi wirausahawan. Birokrat tidak bebas untuk mengarah pada peningkatan. Ia terikat pada peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh badan yang superior. Dia tidak punya hak untuk memulai inovasi jika atasannya tidak menyetujuinya. Tugas dan kebajikannya adalah untuk taat.

Mari kita ambil contoh kondisi kehidupan tentara. Tentara tentu saja merupakan organisasi birokrasi yang paling ideal dan sempurna. Di sebagian besar negara mereka diperintahkan oleh perwira yang dengan tulus didedikasikan untuk satu tujuan saja: untuk membuat angkatan bersenjata negara mereka seefisien mungkin. Namun demikian, pelaksanaan urusan militer ditandai dengan permusuhan keras kepala terhadap setiap upaya menuju perbaikan. Dikatakan bahwa staf umum selalu bersiap untuk perang terakhir, tidak pernah untuk perang masa depan. Setiap ide baru selalu bertemu dengan oposisi yang gigih dari pihak yang bertanggung jawab atas manajemen. Juara kemajuan memiliki pengalaman paling tidak menyenangkan. Tidak perlu memaksakan fakta-fakta ini; mereka akrab bagi semua orang.

Alasan untuk keadaan yang tidak memuaskan ini jelas. Kemajuan dalam bentuk apa pun selalu berbeda dengan ide-ide lama dan mapan dan karena itu dengan kode yang diilhami oleh mereka. Setiap langkah kemajuan adalah perubahan yang melibatkan risiko besar. Hanya beberapa pria, yang dianugerahi kemampuan luar biasa dan langka, memiliki karunia merencanakan hal-hal baru dan mengakui berkat-berkat mereka. Di bawah kapitalisme, inovator bebas untuk memulai upaya untuk merealisasikan

rencananya terlepas dari keengganan mayoritas untuk mengakui prestasi mereka. Cukup kalau dia berhasil dalam membujuk beberapa pria yang masuk akal untuk meminjamkannya dana untuk memulai. Di bawah sistem birokrasi perlu meyakinkan orang-orang di atas, sebagai aturan orang tua terbiasa melakukan hal-hal dengan cara yang ditentukan, dan tidak lagi terbuka untuk ide-ide baru. Tidak ada kemajuan dan reformasi tidak dapat diharapkan dalam keadaan di mana langkah pertama adalah untuk mendapatkan persetujuan dari orang-orang tua. Pelopor metode baru dianggap pemberontak dan diperlakukan seperti itu. Untuk pikiran birokrasi, abidansi hukum, yaitu berpegang teguh pada adat dan kuno, adalah yang pertama dari semua kebajikan.

Untuk mengatakan kepada pengusaha dari suatu perusahaan dengan peluang keuntungan yang terbatas, "Berperilaku seperti yang dilakukan oleh para birokrat yang berhati nurani", sama saja dengan mengatakan kepadanya untuk menghindari reformasi apapun. Tidak ada yang bisa, sekaligus birokrat dan inovator yang benar. Kemajuan justru yang tidak diprediksi oleh peraturan dan regulasi; itu tentu di luar bidang kegiatan birokrasi.

Kelebihan dari sistem laba adalah bahwa ia memberikan peningkatan premi yang cukup tinggi untuk bertindak sebagai insentif untuk mengambil risiko tinggi. Jika premi ini dihapus atau dikurangi secara serius, tidak mungkin ada pertanyaan kemajuan.

Bisnis besar menghabiskan banyak uang untuk penelitian karena ingin mendapatkan keuntungan dari metode produksi baru. Setiap pengusaha selalu mencari perbaikan; dia ingin mendapat untung baik dari menurunkan biaya atau dari menyempurnakan produknya. Publik hanya

melihat inovasi yang berhasil. Tidak menyadari berapa banyak perusahaan gagal karena mereka keliru dalam mengadopsi prosedur baru.

Sia-sia untuk meminta wirausahawan untuk memulai, terlepas dari tidak adanya insentif laba, pada semua perbaikan yang akan ia lakukan jika laba yang diharapkan akan memperkaya dirinya. Pengusaha bebas membuat keputusan pada pemeriksaan yang cermat dan cermat dari semua pro dan kontra dan pada penimbangan peluang keberhasilan dan kegagalan. Dia mengimbangi kemungkinan untung dari kemungkinan kerugian. Entah kehilangan atau perolehan akan terjadi dalam kekayaannya sendiri. Ini penting. Menyeimbangkan risiko kehilangan uang sendiri dengan peluang pemerintah atau orang lain untuk mendapat untung berarti melihat masalah dari sudut pandang yang sangat berbeda.

Tetapi ada juga sesuatu yang jauh lebih penting. Inovasi yang salah tidak hanya harus mengganggu modal yang diinvestasikan, tetapi juga harus mengurangi laba di masa depan. Sebagian besar dari keuntungan ini akan mengalir, jika diperoleh, ke dalam kas. Sekarang, kejatuhan mereka mempengaruhi pendapatan pemerintah. Pemerintah tidak akan mengizinkan pengusaha untuk mengambil risiko apa yang dianggapnya sebagai pendapatannya sendiri. Ini akan berpikir bahwa itu tidak dibenarkan di leaving enterpriser hak untuk mengekspos kehilangan apa yang hampir uang pemerintah. Ini akan membatasi kebebasan wirausahawan untuk mengelola urusan "miliknya", yang secara praktis bukan lagi miliknya melainkan milik pemerintah.

Kami sudah berada di awal kebijakan tersebut. Dalam hal kontrak biaya-plus, pemerintah berusaha untuk memuaskan dirinya tidak hanya mengenai apakah biaya yang diklaim oleh kontraktor benar-

benar dikeluarkan, tetapi tidak kurang dari apakah mereka diizinkan berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak. Dibutuhkan setiap pengurangan biaya yang dikeluarkan untuk barang, tetapi tidak mengakui pengeluaran tepi yang, menurut pendapat karyawannya, biro krat, tidak diperlukan. Situasi yang dihasilkan adalah ini: Kontraktor menghabiskan sejumlah uang dengan maksud mengurangi biaya produksi. Jika dia berhasil, hasilnya adalah — di bawah biaya plus persentase dari metode biaya — bahwa keuntungannya dikurangi. Jika dia tidak berhasil, pemerintah tidak mengganti pengeluaran yang dipertanyakan dan dia juga kalah. Setiap upaya untuk mengubah apa pun dalam rutinitas produksi tradisional harus membuahkan hasil buruk baginya. Satu-satunya cara untuk menghindari hukuman adalah baginya untuk tidak mengubah apa pun.

Di bidang perpajakan, pembatasan yang diberikan pada gaji adalah titik awal dari perkembangan baru. Mereka mempengaruhi, saat ini, hanya gaji yang lebih tinggi. Tetapi mereka tidak akan berhenti di sini. Setelah prinsip diterima, bahwa Biro Pendapatan Internal memiliki hak untuk menyatakan apakah biaya, pengurangan, atau kerugian tertentu dapat dibenarkan atau tidak, kekuatan pengusaha juga akan dibatasi dengan memperhatikan item-item biaya lainnya. Maka manajemen akan berada di bawah keharusan untuk memastikan dirinya sendiri, sebelum memulai perubahan apa pun, apakah otoritas pajak menyetujui pengeluaran yang diperlukan. Para Kolektor Penghasilan Internal akan menjadi otoritas tertinggi dalam urusan manufaktur.

2. Interferensi dengan Pilihan Personil

Setiap jenis pemerintahan yang campur tangan dengan bisnis swasta memasukkan hadiah menghasilkan konsekuensi bencana yang sama. Ini melumpuhkan inisiatif dan melahirkan birokratisme. Kami tidak dapat menyelidiki semua metode yang diajukan. Cukup mempertimbangkan satu contoh yang menjengkelkan.

Bahkan pada abad ke-19, di puncak liberalisme Eropa, perusahaan swasta tidak pernah sebebaskan dulu di negeri ini. Di Eropa kontinental setiap perusahaan dan khususnya perusahaan selalu bergantung dalam banyak hal pada kebijaksanaan lembaga pemerintah. Biro memiliki kekuatan menimbulkan kerusakan serius pada setiap perusahaan. Untuk menghindari kerugian seperti itu, manajemen perlu hidup dengan baik dengan mereka yang berkuasa.

Prosedur yang paling sering adalah untuk memenuhi keinginan pemerintah mengenai komposisi dewan direksi. Bahkan di Inggris, dewan direksi yang tidak menyertakan beberapa rekan sejawat dianggap tidak cukup terhormat. Di benua Eropa dan khususnya di Eropa Timur dan Selatan, dewan penuh dengan mantan menteri kabinet dan jenderal, politisi dan sepupu, saudara ipar, teman sekolah, dan teman-teman dari pejabat tinggi seperti itu. Dengan direktur ini, tidak ada kemampuan komersial atau pengalaman bisnis yang diperlukan.

Kehadiran orang-orang bodoh seperti itu di dewan direksi pada dasarnya tidak berbahaya. Yang mereka lakukan hanyalah mengumpulkan biaya dan berbagi keuntungan. Tetapi ada kerabat dan teman-teman lain dari mereka yang berkuasa yang tidak memenuhi syarat untuk jabatan direktur. Bagi mereka ada posisi yang digaji pada staf. Orang-orang ini lebih merupakan liabilitas daripada aset.

Dengan meningkatnya campur tangan pemerintah dengan bisnis, menjadi penting untuk menunjuk eksekutif yang tugas utamanya adalah melicinkan kesulitan dengan pihak berwenang. Pertama itu hanya satu wakil presiden yang bertanggung jawab "urusan mengacu pada administrasi pemerintah." Kemudian persyaratan utama untuk presiden dan untuk semua wakil presiden adalah untuk memiliki reputasi yang baik dengan pemerintah dan partai-partai politik. Akhirnya tidak ada perusahaan yang mampu membeli "kemewahan" seorang eksekutif yang tidak disukai oleh pemerintahan, serikat buruh, dan partai-partai politik yang hebat. Mantan pejabat pemerintah, asisten sekretaris, dan anggota dewan dari berbagai kementerian dianggap sebagai pilihan yang paling tepat untuk posisi eksekutif.

Para eksekutif semacam itu tidak peduli sedikit pun tentang kemakmuran perusahaan. Mereka terbiasa dengan manajemen birokrasi dan karenanya mengubah perilaku bisnis korporasi. Mengapa repot-repot mengeluarkan produk yang lebih baik dan lebih murah jika seseorang dapat mengandalkan dukungan dari pihak pemerintah? Bagi mereka kontrak pemerintah, perlindungan tarif yang lebih efektif, dan bantuan pemerintah lainnya menjadi perhatian utama. Dan mereka membayar hak istimewa seperti itu oleh kontribusi untuk dana partai dan pemerintah menopang agenda dana dan dengan menunjuk orang-orang yang bersimpati kepada pihak berwenang.

Sudah lama sejak itu para staf perusahaan besar Jerman diseleksi dari sudut pandang kemampuan komersial dan teknologi. Mantan anggota klub siswa yang cerdas dan andal secara politis seringkali memiliki

kesempatan lebih baik untuk bekerja dan maju daripada para pakar yang efisien.

Kondisi Amerika sama sangat berbeda. Seperti di setiap bidang birokrasi, Amerika juga "terbelakang" di bidang birokrasi perusahaan swasta. Ini adalah pertanyaan terbuka apakah Sekretaris Ickes * benar dalam mengatakan: "Setiap bisnis adalah birokrasi." Tetapi jika Sekretaris Dalam Negeri itu benar, atau sejauh ia benar, ini bukan hasil evolusi bisnis pribadi tetapi dari tumbuh yang mengatur m ent gangguan bisnis.

3. Ketergantungan tanpa batas pada Kebijaksanaan Biro Pemerintah

Setiap pengusaha Amerika yang memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan kondisi ekonomi di Eropa Selatan dan Timur memadamkan pengamatannya menjadi dua hal: Pengusaha negara-negara ini tidak peduli tentang efisiensi produk, dan pemerintah berada di tangan kelompok yang korup. . . Karakterisasi ini pada umumnya benar. Tetapi gagal menyebutkan bahwa inefisiensi industri dan korupsi adalah konsekuensi dari metode campur tangan pemerintah dengan bisnis seperti yang diterapkan di negara-negara ini.

Di bawah sistem ini, pemerintah memiliki kekuatan tak terbatas untuk menghancurkan setiap perusahaan atau memberikan bantuan padanya. Keberhasilan atau kegagalan setiap bisnis bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan mereka yang ada di kantor. Jika pengusaha tersebut tidak menjadi warga negara dari negara asing yang kuat yang agen diplomatik dan konsuler memberinya perlindungan, ia berada di bawah kekuasaan administrasi dan partai yang berkuasa. Mereka dapat mengambil semua hartanya dan memenjarakannya. Di sisi lain, mereka bisa membuatnya kaya.

Pemerintah menentukan tinggi tarif dan tarif pengiriman. Ini memberi atau menolak impor dan ekspor lisensi. Setiap warga negara atau penduduk terikat untuk menjual semua hasil dalam valuta asing kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah adalah satu-satunya penjual valuta asing; itu bebas untuk menolak ad libitum ap komplikasi valuta asing. Di Uni Eropa tali di mana hampir setiap jenis produksi tergantung pada importasi pada peralatan, mesin, bahan baku, dan barang setengah jadi dari luar negeri, penolakan semacam itu sama dengan penutupan pabrik. Penentuan akhir pajak yang jatuh tempo praktis diserahkan pada kebijaksanaan otoritas yang tidak terbatas. Pemerintah dapat menggunakan dalih apa pun untuk penyitaan pabrik atau toko apa pun. Parlemen adalah boneka di tangan para penguasa; pengadilan penuh sesak.

Dalam lingkungan seperti itu pengusaha harus menggunakan dua cara: diplomasi dan penyusunan. Dia harus menggunakan metode-metode ini tidak hanya berkenaan dengan partai yang berkuasa, tetapi tidak kurang dengan merujuk kepada kelompok-kelompok oposisi yang terlarang dan terus-menerus dipotong yang suatu hari dapat mengambil alih kendali. Ini adalah jenis transaksi ganda dan berbahaya; hanya pria yang tidak memiliki rasa takut dan hambatan yang bisa bertahan dalam lingkungan yang busuk ini. Pengusaha yang telah tumbuh di bawah kondisi usia yang lebih liberal harus pergi dan digantikan oleh petualang. Pengusaha Eropa dan Amerika Barat, yang terbiasa dengan lingkungan legalitas dan kebenaran, akan hilang kecuali mereka mengamankan layanan agen pribumi.

Sistem ini, tentu saja, tidak menawarkan banyak insentif untuk peningkatan teknologi. Pengusaha mempertimbangkan investasi tambahan

hanya jika ia dapat membeli mesin secara kredit dari perusahaan asing. Menjadi seorang debitor dari sebuah perusahaan di salah satu negara Barat dianggap menguntungkan karena seseorang mengharapkan bahwa para diplomat yang bersangkutan akan ikut campur untuk melindungi kreditor dan dengan demikian membantu debitor untuk melakukannya. Cabang-cabang produksi baru diresmikan hanya jika pemerintah memberikan premi sedemikian rupa sehingga diharapkan keuntungan besar.

Akan menjadi kesalahan untuk menyalahkan korupsi ini pada sistem campur tangan pemerintah dengan bisnis dan birokratisme. Birokratisme berubah menjadi pemerasan di tangan para politisi bejat. Namun kita harus menyadari bahwa negara-negara ini akan terhindar dari kejahatan jika mereka tidak membalut sistem kebebasan terpecah. Rekonstruksi ekonomi pascaperang harus dimulai di negara-negara ini dengan perubahan radikal dalam kebijakan mereka.

Bab V

Implikasi Sosial dan Politik dari Birokratisasi

Filsafat Birokratisme

Antagonisme yang harus dihadapi rakyat dalam perjuangan sebelumnya untuk kebebasan itu sederhana dan dapat dipahami oleh semua orang. Di satu sisi ada para tiran dan pendukung mereka; ada di sisi lain para pendukung pemerintahan populer. Konflik politik adalah pergulatan berbagai kelompok untuk supremasi. Pertanyaannya adalah: Siapa yang harus berkuasa? Kami atau mereka? Sedikit atau banyak? Orang lalim atau penguasa aris atau orang-orang?

Saat ini, falsafah *statolatry* yang modis telah mengaburkan masalah ini. Konflik politik tidak lagi dipandang sebagai pergulatan antar kelompok laki-laki. Mereka dianggap sebagai perang antara dua prinsip, yang baik dan yang buruk. Yang baik diwujudkan dalam Negara Dewa yang agung, perwujudan dari gagasan abadi tentang moralitas, dan yang buruk dalam "individu yang kasar" dari orang-orang yang egois. Dalam pertentangan ini, Negara selalu benar dan individu selalu salah. Negara adalah wakil dari persemakmuran, keadilan, peradaban, dan kebijaksanaan superior. Individu itu adalah orang miskin yang bodoh, mudah ditipu.

Ketika seorang Jerman mengatakan "der Staat" atau ketika seorang Marxian mengatakan "society (masyarakat)", mereka dikagumi oleh kekaguman. Bagaimana seorang pria bisa begitu korup sehingga bangkit dalam pemberontakan melawan Yang Mahatinggi ini?

Louis XIV sangat jujur dan tulus ketika dia berkata: Akulah Negara. Etika modern itu sederhana. Dia berkata: Aku adalah pelayan Negara; tetapi, ia menyiratkan, Negara adalah Tuhan. Anda bisa

memberontak melawan raja Bourbon, dan Prancis melakukannya. Ini tentu saja merupakan perjuangan manusia melawan manusia. Tetapi Anda tidak bisa memberontak melawan Negara Dewa dan melawan tukang rendahannya, birokrat.

Janganlah kita mempertanyakan ketulusan dari pejabat yang bermaksud baik. Dia sepenuhnya diilhami dengan gagasan bahwa itu adalah tugas sakralnya untuk memperjuangkan idolanya melawan keegoisan rakyat. Menurut pendapatnya, pemenang dari hukum ilahi yang kekal. Dia tidak merasa dirinya terikat *secara moral* oleh hukum manusia yang ditulis oleh para pembela individualisme ke dalam statuta. Manusia tidak dapat mengubah hukum tuhan asli, Negara. Warga negara perorangan, dalam melanggar salah satu hukum negaranya, adalah penjahat yang layak dihukum. Dia telah bertindak untuk keuntungan egoisnya sendiri. Tetapi hal yang sangat berbeda jika seorang pejabat kantor menghindari undang-undang negara yang diberlakukan dengan semestinya untuk kepentingan "Negara". Menurut pendapat pengadilan "reaksioner", secara teknis ia mungkin bersalah atas suatu pelanggaran. Tetapi dalam pengertian moral yang lebih tinggi dia benar. Dia telah melanggar hukum manusia agar dia tidak melanggar hukum ilahi.

Inilah esensi filosofi birokratisme. Di mata para pejabat, hukum tertulis adalah penghalang yang dibangun untuk melindungi para bajingan terhadap klaim masyarakat yang adil. Mengapa seorang penjahat menghindari hukuman hanya karena "Negara" dalam menuntutnya telah melanggar beberapa formalitas sembrono? Mengapa seorang pria harus membayar pajak yang lebih rendah hanya karena ada celah yang tersisa dalam undang-undang perpajakan? Mengapa pengacara harus mencari

nafkah dengan menasihati orang bagaimana mendapat untung dari ketidaksempurnaan hukum tertulis? Apa gunanya semua pembatasan yang diberlakukan oleh hukum tertulis atas upaya jujur pejabat pemerintah untuk membuat orang bahagia? Andai saja tidak ada konstitusi, undang-undang hak, hukum, parlemen, dan pengadilan! Tidak ada surat kabar dan tidak ada pengacara! Betapa indahnya dunia jika "Negara" bebas menyembuhkan semua penyakit!

Itu hanya satu langkah dari mentalitas seperti itu ke totalitarianisme sempurna dari Stalin dan Hitler.

Jawaban yang harus diberikan kepada para radikal birokratis ini sudah jelas. Warga negara itu dapat menjawab: Anda mungkin luar biasa dan sebagian besar orang-orang, jauh lebih baik daripada kita, warga negara lainnya. Kami tidak mempertanyakan kompetensi dan kecerdasan Anda. Tetapi Anda bukan pendeta dewa yang disebut "Negara." Anda adalah hamba hukum, hukum yang disahkan negara kita. Bukan urusan Anda untuk mengkritik hukum, apalagi melanggar hukum. Dalam melanggar hukum Anda mungkin lebih buruk daripada kebanyakan pemeran, tidak peduli seberapa baik niat Anda. Karena kamu diangkat, disumpah, dan dibayar untuk menegakkan hukum, bukan untuk melanggarnya. Hukum terburuk adalah lebih buruk daripada tirani birokrasi.

Perbedaan utama antara seorang polisi dan seorang penculik dan antara seorang pemungut pajak dan perampok adalah bahwa polisi dan pemungut pajak mematuhi dan menegakkan hukum, sementara penculik dan perampok sangat terlambat. Hapus hukum, dan masyarakat akan dihancurkan oleh anarki. Negara adalah satu-satunya institusi yang berhak untuk menerapkan paksaan dan untuk melukai individu. Kekuatan luar biasa

ini tidak dapat diabaikan begitu saja oleh beberapa orang, betapapun kompeten dan pintar mereka mungkin menganggap diri mereka sendiri. Tidak perlu membatasi aplikasinya. Ini adalah tugas hukum.

Para pemegang jabatan dan birokrat bukanlah Negara. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk penerapan hukum. Orang bisa menyebut pendapat semacam itu ortodoks dan doktriner. Mereka memang ekspresi kebijaksanaan lama. Tapi alternatif dari aturan hukum adalah aturan lalim.

Kepuasan Birokrasi

Tugas pejabat kantor adalah melayani publik. Kantornya telah didirikan (secara langsung atau tidak langsung) oleh tindakan legislatif dan dengan alokasi sarana yang diperlukan untuk dukungannya dalam anggaran. Dia mengeksekusi hukum negaranya. Dalam melakukan tugasnya, dia menunjukkan dirinya sebagai anggota masyarakat yang berguna, bahkan jika undang-undang yang harus dipraktikkannya merugikan rakyat jelata. Karena bukan dia yang bertanggung jawab atas ketidakmampuan mereka. Orang-orang berdaulat yang harus disalahkan, bukan pelaksana kehendak rakyat yang setia. Karena para penyuling tidak bertanggung jawab atas orang-orang yang mabuk, maka panitera pemerintah tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang tidak diinginkan dari undang-undang yang tidak bijaksana.

Di sisi lain, bukan manfaat birokrat bahwa banyak manfaat diperoleh dari tindakan mereka. Bahwa pekerjaan kepolisian sangat efisien sehingga warga negara terlindungi dengan baik terhadap pembunuhan, perampokan, dan pencurian tidak mengharuskan orang lain untuk lebih berterima kasih kepada petugas polisi daripada kepada sesama warga negara lainnya

membuat layanan yang bermanfaat. Petugas polisi dan petugas pemadam kebakaran tidak memiliki klaim yang lebih baik atas rasa terima kasih publik daripada para dokter, insinyur kereta api, tukang las, pelaut, atau produsen komoditas yang bermanfaat. Polisi lalu lintas tidak memiliki alasan untuk kesombongan daripada produsen lampu lalu lintas. Bukan kepantasannya bahwa atasannya menugaskannya untuk tugas di mana ia setiap hari dan setiap jam mencegah pembunuhan tidak disengaja dan dengan demikian menyelamatkan banyak orang.

Memang benar bahwa masyarakat tidak dapat melakukan tanpa layanan yang diberikan oleh petugas patroli, pemungut pajak, dan panitera pengadilan. Tetapi tidak kurang benar bahwa setiap orang akan menderita kerusakan besar jika mereka bukan pemulung, penyapu cerobong asap, mesin pencuci piring, dan pembasmi serangga. Dalam kerangka kerja sama sosial, setiap warga negara bergantung pada layanan yang diberikan oleh semua warga negaranya. Ahli bedah besar dan musisi terkenal tidak akan pernah bisa memusatkan semua upayanya pada operasi dan musik jika pembagian kerja tidak membebaskan mereka dari keharusan mengurus banyak hal sepele yang kinerjanya akan mencegah mereka menjadi sempurna. spesialis. Duta Besar dan penjaga mercusuar tidak memiliki klaim yang lebih baik untuk julukan itu *pilar masyarakat* selain portir Pullman dan wanita. Karena, di bawah pembagian kerja, struktur masyarakat bertumpu pada bahu semua pria dan wanita.

Tentu saja ada pria dan wanita yang melayani dengan cara yang altruistik dan sepenuhnya terpisah. Umat manusia tidak akan pernah mencapai keadaan peradaban saat ini tanpa heroisme dan pengorbanan diri dari pihak elit. Setiap langkah maju menuju perbaikan kondisi moral adalah

pencapaian orang-orang yang siap mengorbankan kesejahteraan mereka sendiri, kesehatan mereka, dan kehidupan mereka demi tujuan yang mereka anggap adil dan menguntungkan. Mereka melakukan apa yang mereka anggap kewajiban mereka tanpa peduli apakah mereka sendiri tidak akan menjadi korban. Orang-orang ini tidak bekerja demi imbalan, mereka melayani sampai mati.

Itu adalah kebingungan yang disengaja dari pihak metafisi Jerman tentang statolatry bahwa mereka berpakaian semua orang dalam pelayanan pemerintah dengan gloriole pengorbanan diri altruistik seperti itu. Dari tulisan para etat Jerman, pegawai negeri sipil muncul sebagai makhluk suci, semacam biarawan yang meninggalkan semua kesenangan duniawi dan semua kebahagiaan pribadi untuk melayani, dengan kemampuan terbaiknya, letnan Allah, dulu raja Hohenzollern dan hari ini sang Führer. The *Staatsbeamte* tidak bekerja untuk mendapatkan bayaran karena tidak ada gaji sebesar apa pun yang dapat dianggap sebagai hadiah yang memadai untuk manfaat yang tak ternilai yang diperoleh masyarakat dari pengorbanannya yang menyangkal diri. Masyarakat tidak membayar upah tetapi pemeliharaan yang memadai untuk pangkatnya dalam hierarki resmi. Adalah keliru jika menyebut semua pemeliharaan ini sebagai gaji. Hanya kaum liberal, yang bias oleh prasangka dan kesalahan komersialisme, menggunakan istilah yang salah. Jika *Beamtengehalt* (gaji pegawai negeri sipil) adalah gaji yang nyata, itu hanya akan adil dan wajar untuk memberikan pemegang kantor paling sederhana pendapatan lebih tinggi dari siapa pun di luar hirarki resmi. Setiap PNS pada saat bertugas, wajib menjaga kedaulatan dan kemaksuman Negara. Kesaksiannya di pengadilan lebih penting daripada kesaksian orang awam.

Semua ini hanya omong kosong belaka. Di semua negara kebanyakan orang bergabung dengan staf kantor-kantor pemerintah karena gaji dan pensiun yang lebih tinggi daripada yang mereka harapkan dapatkan di tempat kerja lain. Mereka tidak meninggalkan apa pun dalam melayani pemerintah. Layanan sipil bagi mereka adalah pekerjaan paling menguntungkan yang bisa mereka temukan.

Insentif yang ditawarkan oleh layanan sipil di Eropa tidak hanya terdiri dari tingkat gaji dan pensiun; banyak pelamar, dan bukan yang terbaik, tertarik oleh kemudahan pekerjaan dan keamanan. Sebagai aturan, pekerjaan pemerintah kurang mendesak daripada pembisnis. Selain itu, janji temu itu untuk seumur hidup. Seorang karyawan dapat diberhentikan hanya ketika semacam persidangan peradilan menemukan dia bersalah karena mengabaikan tugasnya dengan kejam. Di Jerman, Rusia, dan Prancis, setiap tahun ribuan anak laki-laki yang rencana hidupnya benar-benar diperbaiki memasuki tingkat terendah dari sistem pendidikan menengah. Mereka akan mengambil gelar mereka, mereka akan mendapatkan pekerjaan di salah satu dari banyak departemen, mereka akan melayani tiga puluh atau empat puluh tahun, dan kemudian pensiun dengan pensiun. Hidup tidak memiliki kejutan dan sensasi bagi mereka, semuanya jelas dan diketahui sebelumnya.

Itu perbedaan antara prestise sosial pekerjaan pemerintah di benua Eropa dan di Amerika dapat diilustrasikan dengan sebuah contoh. Di Eropa diskriminasi sosial dan politik terhadap kelompok minoritas mengambil bentuk pembatasan orang-orang semacam itu dari akses ke semua pekerjaan pemerintah, tidak peduli betapa pun sederhananya posisi dan gaji. Di Jerman, di Kekaisaran Austro-Hungaria, dan di banyak negara lain

semua pekerjaan subordinat yang tidak memerlukan kemampuan atau pelatihan khusus — seperti pelayan, penjaga pintu, bentara, beadles, penampil, kurir, petugas kebersihan — secara hukum disediakan untuk mantan tentara yang secara sukarela telah memberikan layanan aktif selama bertahun-tahun di angkatan bersenjata daripada minimum yang disyaratkan oleh hukum. Pekerjaan-pekerjaan ini dianggap penghargaan yang sangat berharga bagi para petugas yang tidak ditugaskan. Di mata orang-orang, itu adalah hak istimewa untuk melayani sebagai pelayan di biro. Jika di Jerman ada kelas status sosial orang Negro Amerika, orang seperti itu tidak akan pernah berani melamar untuk salah satu dari pekerjaan ini. Mereka akan tahu bahwa ambisi seperti itu sangat boros bagi mereka.

Birokrat sebagai Pemilih

Birokrat bukan hanya pegawai pemerintah. Birokrat, di bawah konstitusi yang demokratis, pada saat yang sama seorang pemilih dan sebagai bagian dari penguasa, majikannya. Birokrat berada dalam posisi yang aneh: birokrat adalah majikan dan karyawan. Dan minat uangnya sebagai karyawan menjulang di atas minatnya sebagai majikan, karena ia mendapat lebih banyak dari dana publik daripada yang ia berikan kepada mereka.

Hubungan ganda ini menjadi lebih penting karena orang-orang di gaji pemerintah meningkat. Birokrat sebagai pemilih lebih mudah mendapatkan kenaikan gaji daripada menjaga keseimbangan anggaran. Perhatian utamanya adalah membengkaknya gaji.

Struktur politik Jerman dan Prancis, di tahun-tahun terakhir sebelum jatuhnya konstitusi demokrasi mereka, sangat dipengaruhi oleh kenyataan

bahwa bagi sebagian besar pemilih, negara adalah sumber pendapatan. Tidak hanya tuan rumah pegawai negeri, dan mereka yang bekerja di cabang-cabang bisnis yang dinasionalisasi (misalnya, kereta api, pos, telegraf, dan telepon), ada juga penerima pengangguran membagikan dan manfaat jaminan sosial, serta petani dan beberapa kelompok lain yang disubsidi pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Perhatian utama mereka adalah untuk mendapatkan lebih banyak dari dana publik. Mereka tidak peduli dengan masalah "ideal" seperti kebebasan, keadilan, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik. Mereka meminta lebih banyak uang, itu saja. Tidak ada kandidat untuk parlemen, diet provinsi, atau dewan kota yang dapat mengambil risiko menentang selera karyawan publik untuk kenaikan gaji. Berbagai partai politik berkeinginan untuk mengalahkan satu sama lain dalam kemeriahan.

Pada abad kesembilan belas parlemen berniat membatasi pengeluaran publik sebanyak mungkin. Tapi sekarang penghematan menjadi hina. Pengeluaran tanpa batas dianggap sebagai kebijakan yang bijak. Baik partai yang berkuasa maupun oposisi berjuang untuk popularitas dengan keterbukaan. Untuk membuat kantor baru dengan karyawan baru disebut kebijakan "positif", dan setiap upaya untuk mencegah pemborosan dana publik diremehkan sebagai "negatif".

Demokrasi perwakilan tidak dapat bertahan hidup jika sebagian besar pemilih berada di daftar gaji pemerintah. Jika anggota parlemen tidak lagi menganggap diri mereka wajib dari wajib pajak tetapi wakil dari mereka yang menerima gaji, upah, subsidi, doles, dan manfaat lain dari jaminan, demokrasi dilakukan untuk itu.

Salah satu antinomi yang melekat dalam masalah-masalah konstitusional masa kini. Ini telah membuat banyak orang putus asa dengan masa depan demokrasi. Ketika mereka menjadi yakin bahwa tren ke arah campur tangan pemerintah yang lebih banyak dengan bisnis, ke arah lebih banyak kantor dengan lebih banyak karyawan, ke arah lebih banyak sumbangan dan subsidi tidak dapat dihindari, mereka tidak dapat membantu kehilangan kepercayaan pada pemerintah oleh rakyat.

Pikiran Birokratisasi

Tren modern menuju kemahakuasaan pemerintah dan totaliterisme akan gagal sejak awal jika para pendukungnya tidak berhasil mengindoktrinasi anak muda dengan ajaran mereka dan mencegah mereka dari berkenalan dengan ajaran ekonomi.

Ekonomi adalah ilmu teoretis dan dengan demikian tidak memberi tahu manusia nilai-nilai apa yang harus ia pilih dan tujuan apa yang harus ia tuju. Itu tidak menetapkan tujuan akhir. Ini bukan tugas orang yang berpikir tetapi dari orang yang bertindak. Sains adalah produk pemikiran, tindakan produk kehendak. Dalam pengertian ini kita dapat mengatakan bahwa ekonomi sebagai ilmu pengetahuan adalah netral sehubungan dengan tujuan akhir dari usaha manusia.

Tetapi itu berbeda sehubungan dengan sarana yang akan diterapkan untuk pencapaian tujuan sosial yang diberikan. Di sana ekonomi adalah satu-satunya panduan tindakan yang dapat diandalkan. Jika laki-laki ingin berhasil dalam mengejar tujuan sosial, mereka harus menyesuaikan perilaku mereka dengan hasil pemikiran ekonomi.

Fakta luar biasa dari sejarah intelektual selama seratus tahun terakhir adalah perjuangan melawan ekonomi. Pengacara kemahakuasaan

pemerintah tidak masuk ke dalam diskusi tentang masalah yang terlibat. Mereka menyebut nama-nama ekonom, mereka menaruh kecurigaan pada gerakan mereka, mereka mencemooh mereka dan meminta kutukan atas mereka.

Namun, bukan tugas buku ini untuk menghadapi fenomena ini. Kita harus membatasi diri pada deskripsi peran yang dimainkan biro dalam pengembangan ini.

Di sebagian besar negara di benua Eropa, universitas dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Mereka berada di bawah kendali Departemen Pendidikan karena kantor polisi tunduk pada kepala departemen kepolisian. Para guru adalah pegawai negeri seperti petugas patroli dan petugas bea cukai. Liberalisme abad kesembilan belas mencoba membatasi hak Kementerian Pendidikan untuk mengganggu kebebasan profesor universitas untuk mengajarkan apa yang mereka anggap benar dan benar. Tetapi ketika pemerintah menunjuk para profesor, itu hanya menunjuk orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat dipercaya, yaitu, orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah dan siap untuk meremehkan ekonomi dan untuk mengajarkan doktrin kemahakuasaan pemerintah.

Seperti di semua bidang birokratisasi lainnya, Jerman pada abad ke-19 jauh lebih maju dari negara-negara lain dalam hal ini. Tidak ada yang menandakan semangat universitas-universitas Jerman lebih baik daripada bagian dari orasi yang disampaikan fisiologis Emil du Bois-Reymond pada tahun 1870 dalam kapasitas rangkapnya sebagai Rektor Universitas Berlin dan sebagai Presiden Akademi Sains Prusia: "Kami, Universitas Berlin, yang berseberangan dengan istana Raja, adalah dengan akta yayasan kami,

pengawal intelektual Rumah Hohenzollern. "Gagasan bahwa seorang antek kerajaan harus mengakui pandangan yang bertentangan dengan ajaran pemerintah, majikannya, tidak bisa dipahami oleh pikiran Prusia. Untuk mempertahankan teori bahwa ada hal-hal seperti hukum ekonomi dianggap semacam pemberontakan. Karena jika ada hukum ekonomi, maka pemerintah tidak dapat dianggap sebagai mahakuasa, karena kebijakan mereka hanya bisa berhasil ketika disesuaikan dengan operasi undang-undang ini. Dengan demikian, perhatian utama profesor ilmu sosial Jerman adalah untuk mengancam bidat skandal bahwa ada keteraturan dalam fenomena ekonomi. Pengajaran ekonomi *dibenci* dan *wirtschaftliche Staatswissenschaften* (aspek ekonomi ilmu politik) menggantikannya. Satu-satunya kualitas yang diperlukan dalam guru akademik ilmu-ilmu sosial adalah penghinaan pengoperasian sistem pasar dan dukungan antusias dari kontrol pemerintah. Di bawah Kaiser, kaum Marxis radikal yang secara terbuka mengadvokasi pergolakan rakyat dan penggulingan pemerintah yang kejam tidak ditunjuk sebagai jabatan profesional penuh waktu; Republik Weimar sebenarnya menghapus diskriminasi ini.

Ekonomi berkaitan dengan operasi seluruh sistem kerja sama sosial, dengan permainan semua faktor penentu, dan dengan saling ketergantungan dari berbagai cabang produksi. Itu tidak dapat dipecah menjadi bidang-bidang terpisah yang terbuka untuk dikunjungi oleh para spesialis yang tidak dapat melihat sisanya. Tidak masuk akal untuk mempelajari uang atau tenaga kerja atau perdagangan luar negeri dengan spesialisasi yang sama dengan yang diterapkan para sejarawan ketika membagi sejarah manusia menjadi berbagai bagian. Sejarah Sweden dapat ditangani dengan hampir tidak ada referensi ke sejarah Peru. Tetapi Anda

tidak dapat berurusan dengan tingkat upah tanpa berurusan pada saat yang sama dengan harga komoditas, suku bunga, dan keuntungan. Setiap perubahan yang terjadi di salah satu elemen ekonomi mempengaruhi semuanya elemen lainnya. Seseorang tidak akan pernah menemukan apa yang dihasilkan oleh suatu kebijakan atau perubahan yang pasti jika seseorang membatasi penyelidikannya pada segmen khusus dari keseluruhan sistem.

Saling ketergantungan inilah yang tidak ingin dilihat pemerintah ketika campur tangan dalam urusan ekonomi. Pemerintah sebelumnya cenderung dianugerahi kekuatan mistis untuk memberi pertolongan dari banyak tanduk. Ia mahatahu dan mahakuasa. Bisa dengan tongkat ajaib menciptakan kebahagiaan dan kelimpahan.

Yang benar adalah bahwa pemerintah tidak bisa memberi jika tidak diambil dari seseorang. Subsidi tidak pernah dibayarkan oleh pemerintah dari dana sendiri; Dengan mengorbankan wajib pajak, negara memberikan subsidi. Inflasi dan ekspansi kredit, metode yang lebih disukai dari keterbukaan pemerintah saat ini, tidak menambahkan apa pun pada jumlah sumber daya yang tersedia. Mereka membuat beberapa orang lebih makmur, tetapi hanya sejauh mereka membuat orang lain lebih miskin. Campur tangan dengan pasar, dengan harga komoditas, tingkat upah, dan tingkat bunga sebagaimana ditentukan oleh permintaan dan penawaran, dalam jangka pendek dapat mencapai tujuan yang diarahkan oleh pemerintah. Tetapi dalam jangka panjang tindakan-tindakan semacam itu selalu menghasilkan keadaan yang (dari sudut pandang pemerintah) lebih tidak memuaskan daripada keadaan sebelumnya yang ingin mereka ubah.

Bukan wewenang pemerintah untuk membuat semua orang lebih makmur. Ini dapat meningkatkan pendapatan petani dengan secara paksa membatasi produksi pertanian domestik. Tetapi harga produk pertanian yang lebih tinggi dibayar oleh konsumen, bukan oleh negara. Rekan dari standar hidup petani yang lebih tinggi adalah penurunan standar hidup seluruh bangsa. Pemerintah dapat melindungi toko-toko kecil dari persaingan pusat perbelanjaan dan toko berantai. Tapi di sini konsumen membayar lagi. Negara dapat memperbaiki kondisi sebagian dari penerima upah dengan cara membuat undang-undang yang tidak jujur atau dengan memberikan kebebasan kepada tekanan dan paksaan serikat pekerja. Tetapi jika kebijakan ini tidak menghasilkan kenaikan yang sesuai dalam harga-harga manufaktur, dengan demikian membawa tingkat upah riil kembali ke tingkat pasar, itu menyebabkan pengangguran sebagian besar dari mereka yang mau mendapatkan upah.

Pengawasan terhadap kebijakan semacam itu dari sudut pandang teori ekonomi harus selalu menunjukkan kesia-siaan mereka. Inilah sebabnya mengapa ekonomi tabu oleh birokrat. Tetapi pemerintah mendorong para spesialis yang membatasi pengamatan mereka ke bidang sempit tanpa peduli tentang konsekuensi lebih lanjut dari suatu kebijakan. Ekonom tenaga kerja hanya berurusan dengan hasil langsung dari kebijakan pro-tenaga kerja, ekonom pertanian hanya dengan kenaikan harga pertanian. Mereka berdua memandang masalah hanya dari sudut kelompok-kelompok penekan yang langsung disukai oleh tindakan yang dipermasalahkan dan mengabaikan konsekuensi sosial utamanya. Mereka bukan ekonom, tetapi penjelas kegiatan pemerintah di cabang tertentu dari administrasi.

Untuk campur tangan pemerintah dengan bisnis, kesatuan kebijakan pemerintah telah lama hancur menjadi bagian-bagian yang tidak terkoordinasi dengan baik. Lewat sudah hari-hari ketika masih mungkin untuk berbicara tentang kebijakan pemerintah. Hari ini di sebagian besar negara masing-masing departemen mengikuti jalannya sendiri, bekerja melawan upaya departemen lain. Departemen tenaga kerja bertujuan pada tingkat upah yang lebih tinggi dan biaya hidup yang lebih rendah. Tetapi departemen pertanian administrasi yang sama bertujuan untuk menaikkan harga pangan, dan departemen perdagangan mencoba menaikkan harga komoditas domestik dengan tarif. Satu departemen bertarung melawan monopoli, tetapi departemen lain ingin mewujudkan (dengan tarif, paten, dan cara lain) persyaratan yang diperlukan untuk membangun monopoli pengendalian. Dan setiap departemen mengacu pada pendapat ahli dari mereka yang berspesialisasi dalam bidangnya masing-masing.

Dengan demikian para pelajar tidak lagi menerima inisiasi di bidang ekonomi. Mereka belajar fakta-fakta yang tidak jelas dan tidak berhubungan tentang berbagai pemerintahan ment langkah-langkah menggagalkan satu sama lain. Tesis-tesis dokter mereka dan pekerjaan penelitian pascasarjana mereka tidak berurusan dengan ekonomi tetapi dengan berbagai topik sejarah ekonomi dan berbagai contoh campur tangan pemerintah dengan bisnis. Studi statistik terperinci dan terdokumentasi dengan baik tentang kondisi masa lalu langsung (studi keliru sering diberi label tentang kondisi "hari ini") sangat berharga bagi sejarawan masa depan. Mereka tidak kalah pentingnya untuk tugas-tugas kejuruan para pengacara dan juru tulis kantor. Tetapi mereka tentu saja

bukan pengganti kurangnya pengajaran di bidang ekonomi. Sungguh menakjubkan bahwa tesis doktor Stresemann berurusan dengan kondisi perdagangan bir botol di Berlin. Di bawah kondisi kurikulum universitas Jerman, itu berarti bahwa ia mengabdikan penipu bagian yang lebih baik dari pekerjaan universitasnya untuk mempelajari pemasaran bir dan kebiasaan minum penduduk. Ini adalah peralatan intelektual yang diberikan oleh sistem universitas Jerman yang dimuliakan kepada seorang pria yang kemudian bertindak sebagai kanselir Reich di tahun-tahun paling kritis dalam sejarah Jerman.

Setelah profesor-profesor tua yang duduk di kursi berbunga-bunga singkat dari liberalisme Jerman telah meninggal, menjadi mustahil untuk mendengar apa pun tentang ekonomi di universitas-universitas di Reich. Tidak ada lagi ahli ekonomi Jerman, dan buku-buku ahli ekonomi asing tidak dapat ditemukan di perpustakaan seminar universitas. Para ilmuwan sosial tidak mengikuti teladan para profesor teologi yang membiasakan para siswanya dengan ajaran dan dogma-dogma dari gereja-gereja dan sekte-sekte lain serta dengan filosofi ateisme karena mereka sangat ingin menyangkal kepercayaan yang mereka anggap sesat. Semua yang dipelajari oleh para siswa dari ilmu-ilmu sosial dari guru-guru mereka adalah bahwa ekonomi adalah ilmu palsu dan apa yang disebut ekonomi, seperti kata Marx, sycophan para pembela ini tentang kepentingan kelas yang tidak adil dari para pengeksploitasi borjuis, siap menjual rakyat kepada bisnis besar dan membiayai modal. Lulusan meninggalkan universitas meyakini pendukung totaliterisme baik dari varietas Nazi atau merek Marxian.

Kondisi di negara lain sama saja. Pendirian pembelajaran Perancis yang paling terkemuka adalah *École Normale Supérieure* di Paris; lulusannya mengisi jabatan paling penting dalam administrasi publik, politik, dan pendidikan tinggi. Sekolah ini didominasi oleh kaum Marxis dan pendukung lain dari kontrol penuh pemerintah. Di Rusia, Pemerintah Kekaisaran tidak mengakui kepada seorang ketua universitas siapa pun yang dicurigai memiliki gagasan liberal tentang ekonomi "Barat". Tetapi, di sisi lain, ia menunjuk banyak kaum Marxis dari sayap "Marxisme" yang loyal, yaitu mereka yang menjauhi kaum fanatik revolusioner. Demikianlah Czar sendiri berkontribusi pada kemenangan Marxisme di kemudian hari.

Totalitarianisme Eropa adalah hasil dari keunggulan birokrasi di bidang pendidikan. Universitas membuka jalan bagi para diktator. Saat ini baik di Rusia maupun di Jerman, universitas adalah benteng utama sistem satu partai. Tidak hanya ilmu-ilmu sosial, sejarah, dan filsafat, tetapi semua cabang ilmu pengetahuan, seni, dan era masa depan lainnya diatur atau, seperti kata Nazi, *gleichgeschaltet*. Bahkan Sidney dan Beatrice Webb, pengagum Soviet yang naif dan tidak kritis seperti mereka, terkejut ketika mereka menemukan bahwa *Jurnal Ilmu Pengetahuan* Marxis-Leninis mendukung "untuk pesta dalam matematika" dan "untuk kemurnian teori Marxis-Leninis dalam operasi". Dan bahwa *Soviet Herald of Venereology and Dermatology* bertujuan untuk mempertimbangkan semua masalah yang dibahasnya dari sudut pandang materialisme dialektik.

Siapa yang Harus Menjadi Tuan?

Dibutuhkan sistem pembagian lab atau prinsip apa pun untuk koordinasi kegiatan berbagai spesialis. Upaya spesialis akan menjadi tanpa tujuan dan bertentangan dengan tujuan jika dia tidak menemukan panduan

dalam supremasi publik. Tentu saja, satu-satunya tujuan produksi adalah melayani konsumen.

Di bawah masyarakat pasar motif laba adalah prinsip pengarah. Di bawah kendali pemerintah itu adalah rezim. Tidak ada lagi kemungkinan yang tersisa. Bagi seorang pria yang tidak didorong oleh dorongan untuk menghasilkan uang di pasar, beberapa kode harus mengatakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana.

Salah satu keberatan yang paling sering diajukan terhadap sistem kapitalisme liberal dan demokratis adalah bahwa itu terutama menekankan hak-hak individu, untuk mengabaikan tugas-tugasnya. Orang-orang berdiri di atas hak mereka dan melupakan kewajiban mereka. Namun, dari sudut pandang sosial, tugas warga negara lebih penting daripada hak-hak mereka.

Kita tidak perlu memikirkan aspek politik dan konstitusi dari kritik antidemokratis ini. Hak-hak manusia sebagaimana dikodifikasikan dalam berbagai undang-undang hak diundangkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah. Tetapi bagi mereka semua orang akan menjadi budak penguasa lalim.

Dalam bidang ekonomi, hak untuk memperoleh dan memiliki properti bukanlah hak istimewa. Ini adalah prinsip yang melindungi kepuasan terbaik dari keinginan konsumen. Dia yang ingin mendapatkan, mendapatkan, dan memiliki kekayaan adalah kebutuhan untuk melayani konsumen. Motif untung adalah sarana untuk membuat publik unggul. Semakin baik seorang pria berhasil memasok konsumen, semakin besar pendapatannya. Adalah menguntungkan semua orang bahwa pengusaha yang menghasilkan sepatu bagus dengan biaya termurah menjadi kaya; kebanyakan orang akan menderita kerugian jika hukum membatasi haknya

untuk menjadi lebih kaya. Undang-undang semacam itu hanya akan menguntungkan pesaingnya yang kurang efisien. Itu tidak akan lebih rendah tetapi menaikkan harga sepatu.

Keuntungan adalah hadiah untuk pemenuhan tugas terbaik dari beberapa sukarela sebagai jumlah tugas. Ini adalah instrumen yang membuat massa tertinggi. Orang biasa adalah pelanggan yang menjadi kapten industri dan semua pembantu mereka bekerja.

Ditentang bahwa ini tidak benar sejauh bisnis besar diperhatikan. Konsumen tidak punya pilihan lain selain menggurui bisnis atau mengabaikan kepuasan kebutuhan akhir. Karena itu ia dipaksa untuk tunduk pada harga berapa pun yang diminta oleh pengusaha. Bisnis besar bukan lagi pemasok dan pemasok tetapi master. Itu tidak perlu meningkatkan dan memurahkan layanannya.

Mari kita perhatikan kasus jalur kereta api yang menghubungkan dua kota yang tidak terhubung oleh jalur kereta api lainnya. Kita bahkan dapat mengabaikan fakta bahwa alat transportasi lain bersaing dengan kereta api: bus, mobil penumpang, pesawat terbang, dan kapal sungai. Berdasarkan asumsi-asumsi ini, memang benar bahwa siapa pun yang ingin bepergian dipaksa untuk melindungi kereta api. Tetapi ini tidak menghilangkan minat perusahaan pada layanan yang baik dan murah. Tidak semua yang mempertimbangkan bepergian terpaksa melakukan perjalanan dalam kondisi apa pun. Jumlah penumpang baik untuk kesenangan maupun untuk busi ness tergantung pada efisiensi layanan dan pada tarif yang dikenakan. Beberapa orang akan melakukan perjalanan dalam hal apa pun. Yang lain hanya akan bepergian jika kualitas dan kecepatan layanan serta harga murah membuat perjalanan menjadi menarik. Justru kelompok kedua

inilah yang menjadi patronase bagi perusahaan perbedaan antara bisnis yang membosankan atau bahkan bisnis yang buruk dan menguntungkan. Jika ini berlaku untuk kereta api di bawah asumsi ekstrem yang dibuat di atas, itu jauh lebih benar untuk cabang bisnis lainnya.

Semua spesialis, baik pebisnis atau orang profesional, sepenuhnya menyadari ketergantungan mereka pada arahan konsumen. Pengalaman sehari-hari mengajarkan mereka bahwa, di bawah kapitalisme, tugas utama mereka adalah melayani konsumen. Spesialis-spesialis yang kurang memahami masalah-masalah sosial mendasar sangat membenci “perbudakan” ini dan ingin dibebaskan. Pemberontakan para ahli yang berpikiran sempit adalah salah satu kekuatan kuat yang mendorong birokratisasi umum.

Arsitek harus menyesuaikan cetak biru dengan keinginan orang-orang yang dia bangun rumah; atau - dalam kasus rumah apartemen - pemilik yang ingin memiliki bangunan sesuai dengan selera penyewa prospektif dan karenanya dapat dengan mudah disewa. Tidak perlu mencari tahu apakah arsitek itu benar dalam mempercayai bahwa ia lebih tahu seperti apa rumah yang baik itu daripada orang awam bodoh yang kurang selera. Dia mungkin marah karena marah ketika dia dipaksa untuk merendahkan proyek-proyeknya yang indah untuk menyenangkan pelanggannya. Dan dia merindukan keadaan ideal di mana dia bisa membangun rumah yang memenuhi standar artistiknya sendiri. Dia merindukan kantor perumahan pemerintah dan melihat dirinya dalam lamunannya di bagian atas biro ini. Kemudian dia akan membangun tempat tinggal sesuai dengan caranya sendiri.

Arsitek ini akan sangat tersinggung jika seseorang memanggilnya calon diktator. Satu-satunya tujuan saya, dia bisa membalas, adalah untuk membuat orang bahagia dengan memberi mereka rumah yang lebih baik; orang-orang ini terlalu bodoh untuk mengetahui apa yang terbaik untuk mempromosikan kesejahteraan mereka sendiri; ahli, di bawah naungan pemerintah, harus merawat mereka; harus ada undang-undang yang melarang bangunan jelek. Tapi, mari kita bertanya, siapa yang memutuskan gaya arsitektur seperti apa yang harus dianggap baik dan mana yang buruk? Arsitek kami akan menjawab: Tentu saja, saya, ahlinya. Dia dengan berani menentang fakta bahwa ada, bahkan di antara para arsitek, perbedaan pendapat yang sangat besar berkaitan dengan gaya dan nilai-nilai artistik.

Kami tidak ingin menekankan poin bahwa arsiteknya, bahkan di bawah kediktatoran birokratis dan tepatnya di bawah totaliterisme seperti itu, tidak akan bebas untuk membangun sesuai dengan idenya sendiri. Dia harus mematuhi selera atasan birokratisnya, dan mereka sendiri akan tunduk pada keinginan sang diktator tertinggi. Di Jerman Nazi para arsitek juga tidak bebas. Mereka harus menyesuaikan diri dengan rencana artis Hitler yang frustrasi.

Yang lebih penting adalah ini. Ada, di bidang estetika seperti di semua bidang usaha manusia lainnya, tidak ada kriteria absolut tentang apa yang indah dan apa yang tidak. Jika seseorang *memaksa* sesamanya untuk tunduk pada standar nilainya sendiri, ia tidak membuat mereka lebih bahagia. Mereka sendiri dapat memutuskan apa yang membuat mereka bahagia dan apa yang mereka sukai. Anda tidak meningkatkan kebahagiaan seorang pria yang ingin menghadiri pertunjukan *Abie's Irish Rose* dengan

memaksanya menghadiri pertunjukan *Hamlet* yang sempurna sebagai gantinya. Anda mungkin mencemooh selera yang buruk. Tetapi dia sendiri yang tertinggi dalam hal kepuasannya sendiri.

Pakar gizi diktator ingin memberi makan sesama warganya sesuai dengan idenya sendiri tentang makanan yang sempurna. Dia ingin berurusan dengan laki-laki karena peternak berurusan dengan sapi. Dia gagal untuk menyadari bahwa nutrisi bukanlah tujuan itu sendiri tetapi sarana untuk mencapai tujuan lainnya. Peternak tidak memberi makan sapi untuk membuatnya bahagia tetapi untuk mencapai suatu tujuan yang seharusnya diberikan oleh sapi yang diberi makan dengan baik. Ada berbagai skema untuk memberi makan sapi. Yang mana dari mereka yang dia pilih tergantung pada apakah dia ingin mendapatkan susu sebanyak mungkin atau daging sebanyak mungkin atau sesuatu yang lain. Setiap diktator berencana untuk membesarkan, memelihara, memberi makan, dan melatih sesamanya seperti peternak memelihara ternaknya. Tujuannya bukan untuk membuat orang bahagia tetapi untuk membawa mereka ke dalam kondisi yang membuatnya, diktator, bahagia. Dia ingin menjinakkan mereka, untuk memberi mereka status ternak. Peternak sapi juga adalah lalim yang baik hati.

Pertanyaannya adalah: Siapa yang seharusnya menjadi tuan? Haruskah manusia bebas memilih jalannya sendiri menuju apa yang menurutnya akan membuatnya bahagia? Atau haruskah seorang diktator menggunakan sesamanya sebagai pion dalam upayanya untuk menjadikan dirinya, sang diktator, lebih bahagia?

Kita mungkin mengakui bahwa beberapa ahli benar dalam memberi tahu kita bahwa kebanyakan orang berperilaku bodoh dalam mengejar

kebahagiaan mereka. Tetapi Anda tidak bisa membuat pria lebih bahagia dengan menempatkannya di bawah perwalian. Para ahli dari berbagai lembaga pemerintah tentu saja pria baik-baik saja. Tetapi mereka tidak benar menjadi marah kapan pun legislatif menggagalkan desain mereka yang dijabarkan dengan cermat. Apa gunanya pemerintahan yang representatif, mereka bertanya; itu hanya menggagalkan niat baik kita. Tetapi satu-satunya pertanyaan adalah: Siapa yang harus menjalankan negara? Para pemilih atau birokrat?

Setiap setengah kecerdasan dapat menggunakan cambuk dan memaksa orang lain untuk patuh. Tapi itu membutuhkan otak dan ketekunan untuk melayani publik. Hanya beberapa orang yang berhasil memproduksi sepatu lebih baik dan lebih murah daripada pesaing mereka. Pakar yang tidak efisien akan selalu mengincar supremasi birokrasi. Dia sepenuhnya menyadari fakta bahwa dia tidak dapat melanjutkan dalam sistem kompetitif. Baginya, birokrasi serba adalah tempat berlindung. Dilengkapi dengan kekuatan kantor ia akan menegakkan keputusannya dengan bantuan polisi.

Di bagian paling bawah dari semua pembelaan fanatik perencanaan dan cialisme ini seringkali tidak ada yang lain selain kesadaran intim dari inferioritas dan inefisiensi seseorang sendiri. Pria yang menyadari ketidakmampuannya menghadapi persaingan mencela "sistem persaingan gila ini." Dia yang tidak layak untuk melayani sesama warga negaranya ingin memerintah mereka.

Bab VI

Konsekuensi Birokratisasi

Belajar dari Gerakan Pemuda Jerman

Keinginan tinggi muncul di filosofi Horatio Alger. Namun Aljazair berhasil lebih baik daripada orang lain dalam menekankan titik paling khas masyarakat kapitalis. Kapitalisme adalah suatu sistem di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh kekayaan; itu memberi semua orang kesempatan tanpa batas. Tidak semua orang, tentu saja, disukai oleh keberuntungan. Sangat sedikit yang menjadi jutawan. Tetapi semua orang tahu bahwa upaya keras dan tidak kurang dari upaya berat membayar. Semua jalan terbuka untuk anak muda yang pintar. Ia optimis dengan kesadaran akan kekuatannya sendiri. Dia memiliki kepercayaan diri dan penuh harapan. Dan ketika dia bertambah tua dan menyadari bahwa banyak dari rencananya telah frustrasi, dia tidak memiliki alasan untuk putus asa. Anak-anaknya akan memulai perlombaan lagi dan dia tidak melihat alasan mengapa mereka tidak boleh berhasil di tempat dia sendiri gagal. Hidup itu layak dijalani karena penuh janji.

Semua ini benar-benar berlaku di Amerika. Di Eropa lama masih ada banyak pemeriksaan yang diwariskan dari *rezim lama*. Bahkan di puncak liberalisme, aristokrasi dan pejabat sedang berjuang untuk mempertahankan hak istimewa mereka. Tapi di Amerika tidak ada sisa-sisa Abad Kegelapan. Dalam pengertian ini adalah negara muda, dan itu adalah negara bebas. Negara muda bukan kode industri atau serikat buruh. Thomas Alva Edison dan Henry Ford tidak harus mengatasi hambatan yang dibangun oleh pemerintah yang picik dan opini publik yang picik.

Dalam kondisi seperti negara bebas, generasi muda digerakkan oleh semangat perintis. Mereka dilahirkan dalam masyarakat yang maju, dan mereka menyadari bahwa tugas mereka adalah menyumbangkan sesuatu untuk perbaikan urusan manusia. Mereka akan mengubah dunia, membentuknya sesuai dengan dunia mereka sendiri ide-ide. Mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan; besok adalah milik mereka dan mereka harus bersiap untuk hal-hal besar yang sedang menunggu mereka. Mereka tidak berbicara tentang masa muda mereka dan tentang hak-hak kaum muda; mereka bertindak seperti orang muda harus bertindak. Mereka tidak membual tentang "dinamisme" mereka sendiri; mereka dinamis dan tidak perlu bagi mereka untuk menekankan kualitas ini. Mereka tidak menantang generasi yang lebih tua dengan pembicaraan arogan. Mereka ingin mengalahkannya dengan perbuatan mereka.

Tetapi negara muda adalah hal yang sangat berbeda di bawah gelombang birokrasi yang meningkat. Pekerjaan pemerintah tidak menawarkan kesempatan untuk menampilkan bakat dan hadiah pribadi. Regimentasi berarti malapetaka inisiatif. Pria muda itu tidak memiliki ilusi tentang masa depannya. Dia tahu apa yang ada di toko untuknya. Dia akan mendapatkan pekerjaan dengan salah satu biro yang tak terhitung banyaknya, dia akan tetapi seorang penggerak dalam mesin besar yang pekerjaannya kurang lebih saya chanical. Rutinitas teknik birokrasi akan melumpuhkan pikirannya dan mengikat tangannya. Dia akan menikmati keamanan. Tetapi keamanan ini akan lebih baik daripada jenis yang dinikmati narapidana di dalam dinding penjara. Ia tidak akan pernah bebas membuat keputusan dan menentukan nasibnya sendiri. Dia akan selamanya menjadi manusia yang dijaga oleh orang lain. Dia tidak akan pernah menjadi

pria sejati yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia bergidik melihat gedung kantor besar di mana dia akan mengubur dirinya sendiri.

Pada dekade sebelum Perang Dunia Pertama Jerman, negara yang paling maju di jalan menuju resimen birokrasi, menyaksikan munculnya fenomena yang sampai sekarang tidak pernah terdengar dari: gerakan pemuda. Geng-geng bergolak dari anak laki-laki dan perempuan yang tidak rapi berkeliaran di negara itu, membuat banyak keributan dan mengabaikan pelajaran sekolah mereka. Dengan kata-kata bombastik mereka mengumumkan Injil zaman keemasan. Semua generasi sebelumnya, mereka menekankan, benar-benar bodoh; ketidakmampuan mereka telah mengubah bumi menjadi neraka. Tapi generasi muda tidak lagi bersedia menanggung *gerontokrasi*, yang supremasi dari impotensi kepikunan yang bodoh. Mulai sekarang para pemuda yang brilian akan memerintah. Mereka akan menghancurkan segala sesuatu yang sudah tua dan tidak berguna, mereka akan menolak semua yang disayangi orang tua mereka, mereka akan menggantikan nilai-nilai dan ideologi nyata dan substansial baru dengan yang kuno dan salah dari peradaban kapitalis dan borjuis, dan mereka akan membangun masyarakat baru raksasa dan manusia super.

Pertengkaran yang meningkat dari para remaja ini hanyalah penyamaran yang buruk karena kurangnya ide dan program tertentu. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan selain ini: Kita masih muda dan karenanya dipilih; kita cerdas karena kita masih muda; kami adalah pembawa masa depan; kita adalah musuh maut borjuis busuk dan orang Filistin. Dan jika seseorang tidak takut untuk bertanya kepada mereka apa rencana mereka, mereka hanya tahu satu jawaban: Para pemimpin kita akan menyelesaikan semua masalah.

Selalu menjadi tugas generasi baru untuk memprovokasi perubahan. Tetapi ciri khas gerakan pemuda adalah mereka tidak memiliki ide atau rencana baru. Mereka membatasi tindakan mereka ketika pemuda bergerak justru karena mereka tidak memiliki program apa pun yang dapat mereka gunakan untuk memberi nama pada upaya mereka. Bahkan mereka mendukung sepenuhnya program orang tua mereka. Mereka tidak menentang kecenderungan terhadap kemahakuasaan dan birokrasi pemerintah. Radikalisme revolusioner mereka tidak lain adalah kecerobohan tahun-tahun antara masa kanak-kanak dan kejantanan; itu adalah fenomena pubertas yang berkepanjangan. Itu tidak mengandung konten ideologis.

Para pemimpin gerakan pemuda adalah orang-orang yang mengalami gangguan mental. Banyak dari mereka yang terpengaruh oleh seksualitas yang tidak wajar, mereka adalah pemboros atau homoseksual. Tak satu pun dari mereka unggul dalam bidang kegiatan apa pun atau menyumbang apa pun bagi kemajuan manusia. Nama-nama mereka sudah lama terlupakan; satu-satunya jejak yang mereka tinggalkan adalah beberapa buku dan puisi yang mengkhotbahkan kejahatan seksual. Tetapi sebagian besar pengikut mereka sangat berbeda. Mereka hanya memiliki satu tujuan: mendapatkan pekerjaan sesegera mungkin dengan pemerintah. Mereka yang tidak terbunuh dalam perang dan revolutions hari ini birokrat bertele-tele dan pemalu di kantor tak terhitung dari Jerman *Zwangswirtschaft*. Mereka adalah budak Hitler yang patuh dan setia. Tetapi mereka akan menjadi penurut penerus Hitler yang tidak kalah patuh dan setia, apakah ia seorang nasionalis Jerman atau boneka Stalin.

Dari Jerman, gerakan pemuda ini menyebar ke negara lain. Fasisme Italian menutupi dirinya sebagai gerakan pemuda. Lagu pestanya, "Giovinezza," adalah nyanyian pujian kaum muda. Pemimpin badutnya membual masih dalam usia lima puluhan akhir dari semangat mudanya dan ingin menyembunyikan usianya seperti seorang wanita centil. Tetapi satu-satunya perhatian dari Fascist pangkat-dan-file adalah untuk mendapatkan pekerjaan pemerintah. Pada masa perang Ethiopia, penulis saat ini meminta beberapa mahasiswa pascasarjana dari salah satu universitas di Italia untuk penjelasan tentang permusuhan mereka terhadap Prancis dan Inggris. Jawabannya luar biasa: "Italia," kata mereka, "tidak menawarkan cukup kesempatan bagi kaum intelektualnya. Kami ingin menaklukkan koloni Inggris dan Prancis untuk mendapatkan administrasi wilayah ini pekerjaan yang sekarang berada di tangan birokrat Inggris dan Perancis".

Gerakan kaum muda adalah ekspresi dari kegelisahan yang dirasakan kaum muda dalam menghadapi prospek suram yang ditawarkan oleh kecenderungan umum menuju resimentasi. Tetapi itu adalah pemberontakan palsu yang ditakdirkan untuk gagal karena tidak berani melawan dengan serius terhadap ancaman yang tumbuh dari kendali pemerintah dan otalitarianisme. Calon perusuh yang gempar itu tidak berdaya karena mereka berada di bawah mantra takhayul totaliter. Mereka menikmati ocehan yang menghasut dan melantunkan hasutan dan meneriakkan lagu inflamasi, tetapi mereka pertama-tama menginginkan pekerjaan pemerintah.

Saat ini gerakan pemuda sudah mati di negara-negara paling maju dalam perjalanan menuju totalitarianisme. Di Rusia, di Jerman, dan di Italia, anak-anak dan para pengiklan diintegrasikan dengan kuat ke dalam

semua perangkat yang mencakup semua kontrol. Anak-anak dari usia paling lembut adalah anggota organisasi politik. Dari buaian sampai liang kubur semua warga negara tunduk pada mesin sistem satu partai, yang terikat untuk patuh tanpa mengajukan pertanyaan. Tidak ada asosiasi atau pertemuan "pribadi" yang diizinkan. Aparat resmi tidak mentolerir kompetisi apa pun. Ideologi resmi tidak mentolerir pembangkang. Begitulah realitas utopia birokrasi.

Nasib Generasi yang Bangkit dalam Lingkungan Birokrasi

Gerakan kaum muda adalah pemberontakan kaum muda yang impoten dan gagal terhadap ancaman birokratisasi. Itu ditakdirkan karena tidak menyerang benih kejahatan, kecenderungan menuju sosialisasi. Sebenarnya itu hanyalah ekspresi kebingungan dari kegelisahan, tanpa ide yang jelas dan rencana yang pasti. Para remaja yang memberontak begitu sepenuhnya berada di bawah mantra ide-ide sosialis sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan.

Jelaslah bahwa kaum muda adalah tim pertama dari tren menuju birokratisasi. Para pemuda kehilangan kesempatan untuk membentuk nasib mereka sendiri. Bagi mereka tidak ada peluang lagi. Mereka sebenarnya adalah "generasi yang hilang" karena mereka tidak memiliki hak paling tepat dari setiap generasi yang meningkat, hak untuk menyumbangkan sesuatu yang baru pada inventaris lama peradaban. The slogan: *Manusia telah mencapai tahap kedewasaan*, adalah kehancuran mereka. Apa orang muda yang kepadanya tidak ada yang bisa diubah dan diperbaiki? Prospek siapa yang akan dimulai dari anak tangga terbawah dari tangga birokrasi dan untuk naik secara perlahan dengan mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh atasan yang lebih tua? Terlihat

dari sudut pandang mereka birokratisasi berarti tunduk pada yang muda terhadap dominasi yang lama. Ini berarti kembali ke semacam sistem kasta.

Di antara semua bangsa dan peradaban — di zaman sebelum munculnya liberalisme modern dan keturunannya, kapitalisme — masyarakat didasarkan pada status. Bangsa itu dibagi menjadi kasta-kasta. Ada beberapa kasus istimewa seperti raja dan bangsawan, dan kasta yang kurang mampu seperti budak dan budak. Seorang pria dilahirkan ke dalam kasta yang pasti, tetap di dalamnya sepanjang hidupnya, dan mewariskan status kastanya kepada anak-anaknya. Dia yang dilahirkan dalam salah satu kasta yang lebih rendah selamanya dirampas haknya untuk mencapai salah satu stasiun kehidupan yang diperuntukkan bagi yang istimewa. Liberalisme dan kapitalisme menghapuskan semua diskriminasi semacam itu dan membuat semua orang setara di bawah hukum. Sekarang hampir semua orang bebas untuk bersaing di setiap tempat di komunitas.

Marxisme memberikan interpretasi berbeda tentang pencapaian pencapaian liberalisme. Doktrin utama Karl Marx adalah doktrin konflik kelas ekonomi yang tidak dapat direkonsiliasi. Masyarakat kapitalis dibagi ke dalam kelas-kelas yang kepentingannya antagonis. Dengan demikian perjuangan kelas tidak terhindarkan. Ia akan lenyap hanya dalam masyarakat sosialisme tanpa kelas di masa depan.

Fakta paling luar biasa tentang doktrin ini adalah bahwa doktrin ini tidak pernah secara eksplisit diuraikan. Dalam *Manifesto Komunis*, contoh-contoh yang digunakan untuk contoh perjuangan kelas diambil dari konflik antara para kasta. Kemudian Marx menambahkan bahwa masyarakat borjuis modern telah membentuk kelas-kelas baru. Tetapi dia tidak pernah mengatakan apa itu kelas dan apa yang ada dalam

pikirannya ketika berbicara tentang kelas dan antagonisme kelas dan dalam mengoordinasi kelas untuk kasta. Semua tulisannya berkaitan dengan istilah-istilah yang tidak pernah didefinisikan ini. Meskipun tak kenal lelah dalam menerbitkan buku-buku dan artikel-artikel yang penuh dengan definisi canggih dan penataan rambut yang skolastik, Marx tidak pernah berusaha menjelaskan dalam bahasa yang tidak ambigu apa karakternya. tanda kelas ekonomi adalah. Ketika dia meninggal, tiga puluh lima tahun setelah penerbitan *Manifesto Komunis*, dia meninggalkan naskah jilid ketiga dari risalah utamanya, *Capital*, yang belum selesai. Dan, sangat signifikan, manuskrip itu terputus tepat pada titik di mana penjelasan tentang gagasan mendasar dari seluruh filsafatnya diberikan. Baik Marx maupun siapa pun dari sejumlah penulis Marxis tidak dapat memberi tahu kami apa itu kelas sosial, apalagi apakah kelas sosial seperti itu benar-benar memainkan peran dalam struktur sosial yang ditugaskan kepada mereka dalam doktrin.

Tentu saja, dari sudut pandang logis diperbolehkan untuk mengklasifikasikan sesuatu sesuai dengan sifat apa pun yang dipilih. Pertanyaannya hanya apakah klasifikasi berdasarkan sifat yang dipilih berguna untuk penyelidikan lebih lanjut dan untuk klarifikasi dan amplifikasi tepi pengetahuan kita. Karena itu pertanyaannya bukan apakah kelas-kelas Marxian benar-benar ada, tetapi apakah mereka benar-benar memiliki kepentingan yang melekat padanya oleh Marx. Marx gagal memberikan definisi yang tepat tentang konsep *kelas sosial* yang telah dia gunakan dalam semua tulisannya dengan cara yang longgar dan tidak pasti, karena definisi yang jelas pasti akan menghilangkan kesia-siaan dan

nilainya. Esensi untuk berurusan dengan masalah ekonomi dan sosial dan absurditas mengoordinasikannya dengan kasta sosial.

Ciri khas kasta adalah kekakuannya. Kelas-kelas sosial, sebagaimana dicontohkan oleh Marx dalam menyebut kaum kapitalis, pengusaha, dan kelas-kelas penerima upah, dicirikan oleh fleksibilitas mereka. Ada perubahan terus-menerus dalam komposisi berbagai kelas. Di mana hari ini adalah keturunan orang-orang yang pada zaman Marx adalah pengusaha? Dan di mana leluhur para pengusaha kontemporer preneurs di zaman Marx? Akses ke berbagai stasiun masyarakat kapitalis modern terbuka untuk semua orang. Kita dapat menyebut senator Amerika Serikat suatu kelas tanpa melanggar prinsip logis. Tapi itu akan menjadi kesalahan untuk mengoordinasikan mereka ke kasta aristokrat turun-temurun, terlepas dari kenyataan bahwa beberapa senator mungkin merupakan keturunan senator dari hari-hari sebelumnya.

Intinya telah ditekankan bahwa kekuatan anonim yang beroperasi di pasar terus-menerus menentukan siapa yang harus menjadi pengusaha dan siapa yang harus menjadi kapitalis. Konsumen memilih, seolah-olah, bagi mereka yang akan menduduki posisi yang ditinggikan dalam pengaturan struktur ekonomi bangsa.

Sekarang di bawah sosialisme tidak ada pengusaha atau kapitalis. Dalam pengertian ini, yaitu, bahwa apa yang disebut Marx sebagai *kelas* tidak akan ada lagi, ia benar menyebut sosialisme sebagai masyarakat tanpa kelas. Tapi ini tidak berhasil. Akan ada perbedaan-perbedaan lain dalam fungsi-fungsi sosial yang dapat kita sebut kelas-kelas dengan pasti tidak kurang kebenarannya dibandingkan dengan Marx. Akan ada orang-orang yang mengeluarkan perintah dan mereka yang

terikat untuk mematuhi perintah-perintah ini tanpa syarat; akan ada orang-orang yang membuat rencana dan orang-orang yang tugasnya melaksanakan rencana-rencana ini.

Satu-satunya hal yang diperhitungkan adalah faedah yang di bawah kapitalisme setiap orang adalah arsitek kekayaannya sendiri. Seorang anak laki-laki yang ingin memperbaiki nasibnya sendiri harus mengandalkan kekuatan dan upayanya sendiri. Pemilihan konsumen melewati penilaian tanpa menghormati orang. Prestasi kandidat, bukan orangnya, dihargai. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan layanan yang diberikan dengan baik adalah satu-satunya cara untuk berhasil.

Di bawah sosialisme, sebaliknya, pemula harus menyenangkan mereka yang sudah menetap. Mereka tidak suka pendatang baru yang terlalu efisien. (Tidak juga para pengusaha lama seperti orang-orang seperti itu; tetapi, di bawah supremasi konsumen, mereka tidak dapat mencegah permohonan mereka.) Dalam mesin sosialisme birokrasi, jalan menuju promosi bukanlah pencapaian tetapi lebih merupakan dukungan dari atasan. Pemuda sepenuhnya bergantung pada disposisi yang baik dari para lelaki tua. Generasi yang sedang bangkit berada di tangan orang-orang yang sudah lanjut usia.

Tidak ada gunanya menyangkal fakta ini. Tidak ada kelas Marxian dalam masyarakat sosialis. Tetapi ada konflik yang tidak dapat didamaikan antara mereka yang mendukung Stalin dan Hitler dan mereka yang tidak. Dan adalah manusiawi bagi seorang diktator untuk lebih memilih mereka yang berbagi pendapat dan memuji pekerjaannya daripada mereka yang tidak.

Sia-sia bahwa kaum Fasis Italia membuat sebuah nyanyian pujian untuk kaum muda lagu partai mereka dan bahwa kaum sosialis Austria mengajar anak-anak untuk bernyanyi: "Kami masih muda dan ini baik-baik saja." Satu-satunya hak yang dinikmati kaum muda di bawah sistem ini adalah bersikap patuh, patuh, dan patuh. Tidak ada ruang bagi inovator yang nakal yang memiliki ide sendiri.

Ini lebih dari krisis kaum muda. Ini adalah krisis kemajuan dan peradaban. Umat manusia terkutuk ketika kaum muda kehilangan kesempatan untuk mengubah masyarakat sesuai dengan mode mereka sendiri.

Perwalian dan Kemajuan Otoriter

Pihak pemerintah atas perintah orang-orang yang luhur dan bijaksana, oleh elit birokrat yang mulia, dapat mengklaim juara yang sangat terkemuka, Plato. Keadaan Plato yang ideal dan sempurna harus dikuasai oleh para filsuf yang tidak mementingkan diri. Mereka adalah hakim yang tidak dapat disuap dan administrator yang tidak memihak, yang sepenuhnya tunduk pada hukum abadi yang adil. Karena ini adalah ciri khas dari filsafat Plato: Ia tidak menaruh perhatian pada evolusi kondisi sosial dan ekonomi dan perubahan dalam gagasan manusia mengenai tujuan dan sarana. Ada pola abadi negara yang baik, dan setiap penyimpangan kondisi aktual dari model ini tidak bisa lain dari korupsi dan degradasi. Masalahnya hanyalah membangun masyarakat yang sempurna dan kemudian menjaganya dari perubahan apa pun, karena perubahan haruslah sama kerusakan. Institusi sosial dan ekonomi kaku. Gagasan tentang kemajuan dalam pengetahuan, dalam prosedur teknologi, dalam metode bisnis, dan dalam organisasi sosial adalah asing bagi pikiran

Plato. Dan semua utopia kemudian yang membentuk cetak biru dari surga duniawi mereka menurut contoh Plato dengan cara yang sama percaya pada kekekalan urusan manusia.

Cita-cita Plato tentang pemerintahan elit telah diubah menjadi fakta oleh Gereja Katolik. Gereja Romawi, di bawah Tridentine organisasi seperti yang muncul dari Kontra-Reformasi, adalah birokrasi yang sempurna. Ini telah berhasil menyelesaikan masalah paling rumit dari setiap pemerintahan nondemokratis, pemilihan eksekutif puncak. Bagi setiap anak lelaki, akses ke martabat tertinggi Gereja sebenarnya terbuka. Pendeta setempat sangat ingin melicinkan jalan menuju pendidikan bagi para pemuda paling cerdas di parokinya; mereka dilatih di seminari Uskup; Setelah ditahbiskan, karier mereka selanjutnya bergantung sepenuhnya pada karakter, semangat, dan kecerdasan mereka. Ada di antara wali gereja banyak keturunan keluarga bangsawan dan kaya. Tetapi mereka tidak berutang jabatan kepada leluhur mereka. Mereka harus bersaing, dengan syarat yang hampir sama, dengan anak-anak petani miskin, pekerja, dan budak. Para pangeran Gereja Katolik, kepala biara dan pengajar universitas teologi, adalah tubuh orang-orang terkemuka. Bahkan di negara-negara paling maju mereka adalah saingan yang layak dari para sarjana, filsuf, ilmuwan, dan negarawan paling cemerlang.

Ini adalah contoh yang luar biasa bahwa penulis semua utopia sosialis modern merujuk sebagai contoh. Kasus ini nyata dengan dua pelopor sosialisme masa kini: Count Henri de Saint-Simon dan Auguste Comte. Tetapi pada dasarnya itu sama dengan kebanyakan penulis sosialisnya, meskipun untuk alasan yang jelas mereka tidak menunjuk ke

Gereja sebagai model. Tidak ada preseden dari hierarki yang sempurna yang dapat ditemukan selain dari yang disajikan oleh Katolik.

Namun, referensi ke Gereja salah. Wilayah kekristenan yang dikelola Paus dan para Uskup lainnya tidak mengalami perubahan apa pun. Itu dibangun di atas doktrin abadi dan abadi. Pengakuan iman ini diperbaiki selamanya. Tidak ada progres dan perubahan. Hanya ada kepatuhan pada hukum dan dogma. Metode-metode seleksi yang diadopsi oleh Gereja sangat efisien dalam pemerintahan suatu badan yang berpegang teguh pada seperangkat aturan dan peraturan yang tak terbantahkan. Mereka sempurna dalam memilih wali dari harta doktrin kekal.

Tetapi kasus masyarakat manusia dan pemerintahan sipil berbeda. Adalah hak istimewa manusia yang paling berharga untuk berjuang tanpa henti demi peningkatan dan berjuang dengan metode yang ditingkatkan melawan rintangan yang ditentang oleh alam terhadap kehidupan dan kesejahteraannya. Dorongan bawaan ini telah mengubah keturunan penghuni gua yang kasar menjadi manusia yang agak beradab di zaman kita. Tetapi umat manusia belum mencapai tingkat kesempurnaan yang di atasnya tidak ada kemajuan lebih lanjut. Kekuatan yang membawa peradaban kita saat ini tidak mati. Jika tidak diikat oleh sistem organisasi sosial yang kaku, mereka akan melanjutkan dan mencari perbaikan lebih lanjut. Prinsip selektif yang digunakan Gereja Katolik untuk memilih pemimpin masa depannya adalah pengabdian yang teguh pada credo dan dogma-dogma mereka. Itu tidak mencari inovator dan reformis, untuk pelopor ide-ide baru yang secara radikal bertentangan dengan yang lama. Inilah yang bisa dijaga oleh pengangkatan eksekutif puncak masa depan oleh penguasa lama yang sudah berusaha dengan baik. Tidak

ada sistem birokrasi yang dapat mencapai hal lain. Tetapi justru vatisme konser yang bersikeras ini yang membuat metode birokratis sama sekali tidak setara untuk pelaksanaan urusan sosial dan ekonomi.

Birokratisasi harus kaku karena melibatkan pengamatan aturan dan praktik yang telah ditetapkan. Namun dalam kehidupan sosial, kekakuan berarti membatu dan mati. Adalah fakta yang sangat penting bahwa stabilitas dan keamanan adalah slogan-slogan yang paling dihargai dari para "pembaru." Saat ini, jika manusia primitif telah mengadopsi prinsip stabilitas, mereka tidak akan pernah mendapatkan keamanan; mereka akan sejak lama telah dimusnahkan oleh binatang buas dan mikroba.

Kaum Marxis Jerman menciptakan diktum: Jika sosialisme bertentangan dengan fitrah manusia, maka fitrah manusia harus diubah. Mereka tidak menyadari bahwa jika sifat manusia diubah, ia tidak lagi menjadi manusia. Dalam sistem birokrasi serba, baik birokrat maupun rakyatnya tidak akan lagi menjadi manusia sejati.

Pemilihan Diktator

Semua pejuang keselamatan melalui pemerintahan para penguasa lalim dengan anggun berasumsi bahwa tidak ada keraguan tentang pertanyaan tentang siapa penguasa tinggi atau kelas penguasa ini dan bahwa semua orang akan secara sukarela menyerah pada supremasi diktator atau aristokrasi manusia super ini. Mereka tidak menyadari bahwa banyak pria dan kelompok pria dapat mengklaim keunggulan untuk diri mereka sendiri. Jika keputusan antara berbagai kandidat tidak dibiarkan menjadi suara mayoritas, tidak ada prinsip seleksi selain perang saudara. Alternatif untuk prinsip pemilihan demokratis melalui pemilihan umum adalah perebutan kekuasaan oleh petualang yang kejam.

Pada abad kedua setelah Kristus, Kekaisaran Romawi diperintah berdasarkan elaborasi prinsip Führer yang luhur. Kaisar adalah orang yang paling mampu dan terkemuka. Dia tidak mewariskan martabatnya kepada anggota keluarganya, tetapi dia memilih sebagai penerus orang yang dia anggap paling cocok untuk jabatan itu. Sistem ini memberi Kekaisaran suksesi empat raja besar: Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, dan Marcus Aurelius. Tetapi kemudian mengikuti era Praetoria, penipu perang saudara yang sengit, anarki, dan pembusukan yang cepat. Aturan yang terburuk diganti dengan aturan yang terbaik. Para jenderal yang ambisius, didukung oleh tentara bayaran, merebut kekuasaan dan memerintah sampai petualang lain mengalahkan mereka. Pengkhianatan, pemberontakan, dan pembunuhan menjadi prinsip selektif. Sejarawan menyalahkan Marcus Aurelius, yang terakhir dari kaisar yang baik. Dia bersalah, kata mereka, karena dia meninggalkan praktik leluhurnya dan, alih-alih memilih orang yang paling cocok, malah mengangkat putranya yang tidak kompeten, Commodus. Namun, sebuah sistem yang dapat dihancurkan oleh kesalahan hanya satu orang adalah sistem yang buruk, bahkan jika kesalahan itu kurang diampuni dan dimengerti daripadaseorang ayah yang melebih-lebihkan karakter dan kapasitas keturunannya. Yang benar adalah bahwa sistem Führer seperti itu harus n mengakibatkan perang saudara permanen segera setelah ada beberapa kandidat untuk jabatan tertinggi.

Semua diktator masa kini datang ke kantor melalui kekerasan. Mereka kemudian harus mempertahankan supremasi mereka terhadap aspirasi para pesaing. Bahasa politik telah menciptakan istilah khusus untuk merujuk pada tindakan seperti itu: Mereka disebut pembersihan. Para

penerus diktator ini akan naik ke tampuk kekuasaan melalui metode yang sama dan akan menerapkan kekejaman dan kekejaman yang sama dalam mempertahankannya. The ult dasar lmate dari serba bu sistem reaocratic kekerasan. Keamanan yang konon diberikannya adalah kekacauan perang saudara yang tak berkesudahan.

Hilangnya Rasa Kritis

Kaum sosialis menyatakan bahwa kapitalisme merosot, bahwa itu tidak sesuai dengan martabat manusia, bahwa itu melemahkan kemampuan intelektual manusia dan merusak integritas moralnya. Di bawah kapitalisme, kata mereka, setiap orang harus menganggap sesamanya sebagai pesaing. Karena itu, naluri kebajikan dan kebersamaan bawaan manusia diubah menjadi kebencian dan upaya kejam demi kesuksesan pribadi dengan mengorbankan semua orang. Tetapi sosialisme akan mengembalikan sifat alami manusia. Kedermawanan, persaudaraan, dan persahabatan akan menjadi ciri khas manusia masa depan. Apa yang dibutuhkan pertama adalah untuk menghilangkan yang terburuk dari semua kejahatan ini, kompetisi.

Namun, persaingan tidak pernah bisa dihilangkan. Karena akan selalu ada posisi yang dihargai pria lebih tinggi daripada posisi lain, orang akan berusaha untuk mereka dan mencoba untuk melampaui saingan mereka. Tidak penting apakah kita menyebutnya persaingan persaingan atau persaingan. Bagaimanapun, dalam beberapa cara atau lain itu harus diputuskan apakah seseorang harus mendapatkan pekerjaan yang dia lamar. Pertanyaannya hanyalah kompetisi seperti apa yang harus ada.

Variasi persaingan kapitalis adalah mengalahkan orang lain di pasar dengan menawarkan barang yang lebih baik dan lebih murah. Variasi birokrasi terdiri dari intrik di "pengadilan" mereka yang berkuasa.

Ada banyak sanjungan, sanjungan, perbudakan, dan ngeri di pengadilan semua penguasa lalim. Tetapi selalu ada beberapa pria setidaknya yang tidak takut untuk mengatakan kepada seorang tiran kebenaran. Ini berbeda di zaman kita. Politisi dan penulis saling mengalahkan dalam pemujaan sultan, "orang biasa." Mereka tidak berani merusak popularitas mereka dengan ekspresi ide-ide yang tidak populer. Para punggawa Louis XIV tidak pernah pergi sejauh beberapa orang pergi hari ini dalam memuji Führers dan pendukung mereka, massa. Tampaknya orang-orang sezaman kita telah kehilangan akal sehat dan kritik diri.

Pada Kongres Partai Komunis, seorang penulis bernama Avdyenko berbicara kepada Stalin dalam istilah-istilah ini: "Berabad-abad akan berlalu dan generasi komunis di masa depan akan menganggap kita yang paling bahagia dari semua manusia yang telah menghuni planet ini selama berabad-abad, karena kita telah melihat Stalin sebagai pemimpin yang jenius, Stalin adalah orang bijak, dia tersenyum, ramah, yang sangat sederhana. Ketika saya bertemu Stalin, bahkan di kejauhan, saya berdenyut dengan kekuatannya, daya tariknya, dan keagungannya. Saya ingin bernyanyi, menjerit, untuk melolong dari kebahagiaan dan meninggikan. "Seorang birokrat berbicara kepada atasannya tentang siapa yang dipromosikan tergantung kurang puitis tetapi tidak kurang merangkak.

Ketika di Diamond Jubilee, Joseph seorang ahli statistik mengaitkan dengan pengakuan Kaisar bahwa setelah enam puluh tahun masa pemerintahannya, negara itu memiliki ribuan mil rel kereta api, sementara

di pabriknya ada jauh lebih sedikit, masyarakat (dan mungkin Kaisar sendiri) hanya menertawakan sepotong toadisme ini. Tapi tidak ada yang tertawa ketika Pemerintah Soviet di Pameran Dunia di Paris dan New York dengan flamboyan menyombongkan fakta bahwa sementara Rusia dari Tsar tidak menggunakan traktor sama sekali, seperempat abad kemudian sudah meniru penemuan baru Amerika ini.

Tidak ada yang pernah percaya bahwa absolutisme ayah dari Marie Thérèse dan cucunya Francis dibenarkan oleh fakta bahwa Mozart, Haydn, Beethoven, dan Schubert menggubah musik abadi. Namun simfoni komposer Rusia kontemporer yang mungkin akan hilang setelah beberapa tahun diklaim sebagai bukti keunggulan totaliterisme Soviet.

Pertanyaannya adalah apakah sistem kontrol birokrasi atau sistem kebebasan ekonomi yang lebih efisien. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan alasan ekonomi. Penegasan fakta bahwa rokok yang diproduksi oleh monopoli tembakau Pemerintah Prancis tidak seburuk mendorong orang Prancis untuk berhenti merokok bukanlah argumen yang mendukung operasi industri pemerintah. Juga tidak ada fakta bahwa rokok yang diproduksi oleh monopoli Pemerintah Yunani menyenangkan para perokok. Bukan suatu keuntungan dari birokrat Yunani bahwa kondisi iklim dan fisik negara mereka membuat tembakau yang ditanam oleh para petani halus dan harum.

Setiap orang Jerman menerima begitu saja bahwa esensi dan sifat dari segala sesuatu membuatnya penting bahwa universitas, kereta api, telegraf, dan telepon dioperasikan oleh pemerintah. Bagi orang Rusia, gagasan bahwa seseorang dapat hidup tanpa paspor, yang dikeluarkan dan disahkan oleh polisi, selalu tampak paradoks. Di bawah kondisi yang

berkembang dalam tiga puluh tahun terakhir, warga benua Eropa menjadi sekadar dokumen identitas mereka. Di banyak negara berisiko berjalan keluar tanpa dokumen-dokumen ini. Di sebagian besar negara-negara Eropa, seorang pria belum bebas untuk menginap di tempat mana pun tanpa segera melaporkan kepada kepolisian setempat tentang kondisi tidurnya dan setiap pergantian alamat.

Ada kemungkinan bahwa beberapa barang dapat berasal dari resimen tersebut. Tentu saja, itu tidak banyak berguna dalam memerangi kejahatan dan menuntut para penjahat. Seorang pembunuh yang bersembunyi tidak akan segan-segan melanggar hukum yang mewajibkan adanya perubahan alamat. Dalam mempertahankan sistem mereka, birokrat menjadi melodramatis. Mereka bertanya kepada publik bagaimana anak-anak terlantar yang miskin dapat menemukan orang tua mereka yang tidak bermoral lagi. Mereka tidak menyebutkan bahwa seorang detektif yang pintar mungkin dapat menemukan mereka. Selain itu, fakta bahwa ada beberapa bajingan tidak dapat dianggap sebagai alasan yang cukup untuk membatasi kebebasan mayoritas orang-orang baik.

Perusahaan pencari keuntungan didukung oleh perlindungan sukarela dari masyarakat. Ia tidak dapat bertahan jika pelanggan tidak menuangkannya. Tetapi biro-biro itu secara paksa memperoleh "pelanggan" mereka. Bahwa sebuah kantor didekati oleh banyak orang bukanlah bukti memuaskannya suatu kebutuhan mendesak masyarakat. Itu hanya menunjukkan bahwa itu mengganggu hal-hal yang penting bagi kehidupan setiap orang.

Menipisnya arti kritis adalah ancaman serius bagi pelestarian peradaban kita. Itu memudahkan para dukun untuk membodohi

orang. Sungguh luar biasa bahwa strata yang berpendidikan lebih mudah tertipu daripada strata yang kurang berpendidikan. Pendukung Marxisme, Nazisme, dan Fasisme yang paling antusias adalah kaum intelektual, bukan kaum boor. Para intelektual tidak pernah cukup tertarik untuk melihat kontradiksi nyata dari kepercayaan mereka. Itu tidak sedikit pun merusak popularitas Fasisme bahwa Mussolini dalam pidato yang sama memuji orang Italia sebagai perwakilan dari peradaban Barat tertua dan sebagai yang termuda di antara negara-negara beradab. Tidak ada Jerman nasionalis memikirkannya ketika Hitler yang berambut gelap, Goering yang gemuk, dan Goebbels yang lumpuh dipuji sebagai wakil yang bersinar dari ras master Arya yang tinggi, langsing, berambut adil, dan heroik. Tidakkah luar biasa bahwa jutaan orang non-Rusia sangat yakin bahwa rejim Soviet itu demokratis, bahkan lebih demokratis daripada Amerika?

Tidak adanya kritik ini memungkinkan untuk memberi tahu orang-orang bahwa mereka akan menjadi orang bebas dalam sistem resimentasi serba. Orang-orang membayangkan sebuah rezim di mana semua sarana dimiliki oleh negara dan pemerintah adalah satu-satunya pemberi kerja sebagai ranah kebebasan. Mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa pemerintah yang kuat dari utopia mereka dapat mencapai tujuan yang mereka sendiri sepenuhnya tidak setuju. Mereka selalu berasumsi bahwa diktator akan melakukan apa yang mereka inginkan.

Bab VII

Dampak Birokratisasi

Kegagalan Masa Lalu

Kita harus mengakui kenyataan bahwa sampai sekarang semua upaya untuk menghentikan kemajuan birokratisasi dan sosialisasi telah sia-sia. Dalam dua puluh tujuh tahun yang telah berlalu sejak Presiden Wilson memimpin Amerika ke dalam perang untuk membuat dunia aman bagi demokrasi, demokrasi telah kehilangan semakin banyak dasar. Despotisme menang di sebagian besar negara-negara Eropa. Bahkan Amerika telah mengadopsi kebijakan yang, beberapa dekade yang lalu, itu meremehkan sebagai "Prusia." Umat manusia secara nyata menonton menuju totalitarianisme. Generasi yang meningkat merindukan kontrol penuh pemerintah atas setiap bidang kehidupan.

Pengacara yang terpelajar telah menerbitkan risalah yang sangat bagus yang menggambarkan substitusi progresif kesewenangan administratif untuk supremasi hukum. Mereka telah menceritakan kisah bagaimana merongrong pemerintahan sendiri membuat semua hak warga negara lenyap dan menghasilkan hiper despotisme gaya oriental. Tetapi kaum sosialis tidak peduli sedikit pun untuk kebebasan dan inisiatif pribadi.

Tidak ada buku satir yang lebih sukses daripada buku-buku tebal pengacara. Beberapa penulis paling terkenal di abad ke-19 — Balzac, Dickens, Gogol, Maupassant, Courteline — telah melakukan pukulan telak terhadap birokratisme. Aldous Huxley bahkan cukup berani untuk menjadikan surga impian sosialisme sebagai target ironi

sinisnya. Masyarakat senang. Namun para pembacanya tetap bergegas untuk melamar pekerjaan dengan pemerintah.

Beberapa orang suka mengolok-olok fitur birokrasi yang boros. Sungguh mengherankan bahwa pemerintah negara yang paling kuat dan terkaya di dunia mengelola sebuah kantor — Biro Ekonomi Dalam Negeri Departemen Pertanian Amerika Serikat — salah satu tugasnya adalah merancang celana panjang "untuk anak kecil yang hanya belajar berpakaian sendiri". Tetapi bagi banyak orang sezaman kita tidak ada yang konyol dalam hal ini. Mereka mengarah pada mode pemerintahan di mana produksi selang, pakaian dalam, dan semua hal berguna lainnya harus menjadi tugas pihak berwenang.

Semua kritik terpelajar dan sindiran jenaka tidak ada gunanya karena mereka tidak mencapai inti masalah. Birokratisasi hanyalah fitur sosialisasi tertentu. Masalah utamanya adalah: Kapitalisme atau Sosialisme? Yang mana?

Para pendukung sosialisme berpendapat bahwa kapitalisme adalah suatu sistem eksploitasi yang tidak adil, karena itu sangat merugikan kesejahteraan rakyat dan bahwa hal itu mengakibatkan kesengsaraan, degradasi, dan kemiskinan progresif dari mayoritas yang sangat besar. Di sisi lain, mereka menggambarkan utopia sosialis mereka sebagai negeri susu dan madu yang dijanjikan di mana setiap orang akan bahagia dan kaya. Apakah mereka benar atau mereka salah? Ini pertanyaannya.

Ekonomi vs Perencanaan dan Totalitarianisme

Ini sepenuhnya merupakan masalah ekonomi. Itu tidak dapat diputuskan tanpa melakukan pengawasan penuh terhadap ekonomi. Kata-kata sembarangan palsu dan doktrin yang salah dari pendukung kontrol pemerintah, sosialisme, komunisme, perencanaan, dan totaliterianisme tidak dapat diungkapkan kecuali dengan alasan ekonomi. Suka atau tidak suka, itu adalah fakta bahwa masalah utama politik saat ini murni ekonomi dan tidak dapat dipahami tanpa pemahaman teori ekonomi. Hanya seorang pria yang fasih dengan masalah-masalah utama ekonomi yang mampu membentuk independen pendapat tentang masalah yang terlibat. Yang lain hanya mengulangi apa yang telah mereka ambil dengan cara. Mereka adalah mangsa yang mudah bagi penipu demagogik dan dukun idiot. Mereka mudah tertipu merupakan ancaman paling serius bagi pelestarian demokrasi dan peradaban Barat.

Tugas pertama seorang warganegara dari sebuah komunitas demokratis adalah untuk mendidik dirinya sendiri dan untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk berurusan dengan urusan sipil. Waralaba bukan hak istimewa tetapi tugas dan tanggung jawab moral. Pemilih sebenarnya adalah pemegang jabatan; kantornya adalah yang tertinggi dan menyiratkan kewajiban tertinggi. Seorang warga negara yang sepenuhnya terserap oleh karya ilmiahnya di bidang lain atau dengan pemanggilannya sebagai seorang seniman dapat memohon keadaan khusus saat gagal dalam tugas pengajaran ini. Mungkin pria seperti itu benar dalam berpura-pura bahwa mereka memiliki tugas yang lebih penting untuk dipenuhi. Tetapi semua pria *cerdas* lainnya tidak hanya sembrono tetapi juga nakal dalam mengabaikan untuk mendidik dan mengajar diri mereka

sendiri untuk kinerja terbaik dari tugas mereka sebagai pemilih yang berdaulat.

Trik propaganda utama dari para pendukung kebijakan yang diduga "progresif" dari kontrol pemerintah adalah menyalahkan kapitalisme untuk semua yang tidak memuaskan dalam kondisi saat ini dan untuk memuji berkah yang disediakan sosialisme bagi umat manusia. Mereka tidak pernah berusaha untuk membuktikan dogma-dogma keliru mereka atau masih kurang untuk membantah keberatan yang diajukan oleh para ekonom. Yang mereka lakukan adalah memanggil nama musuh mereka dan untuk mencurigai motif mereka. Dan, sayangnya, rata-rata warga negara tidak dapat melihat melalui strategi ini.

Pertimbangkan, misalnya, masalah pengangguran massal yang berkepanjangan dari tahun ke tahun. "Progresif" menafsirkannya sebagai kejahatan yang melekat dalam capi talism. Publik yang naif siap menelan penjelasan ini. Orang-orang tidak menyadari bahwa dalam pasar tenaga kerja yang tidak terhalang, dimanipulasi baik oleh tekanan serikat buruh maupun oleh tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah, pengangguran hanya memengaruhi kelompok-kelompok kecil untuk waktu yang singkat. Dibawah kapitalisme bebas, pengangguran merupakan fenomena sementara yang relatif tidak penting; ada kecenderungan permanen untuk pengangguran menghilang. Perubahan ekonomi dapat menyebabkan pengangguran baru. Tetapi pada tingkat upah yang ditetapkan dalam pasar tenaga kerja gratis, setiap orang yang ingin mendapatkan upah akhirnya mendapatkan pekerjaan. Pengangguran sebagai fenomena massa adalah hasil dari kebijakan yang "pro-tenaga kerja" dari pemerintah dan tekanan dan paksaan serikat pekerja.

Penjelasan ini sama sekali tidak khas bagi para ekonom yang oleh kaum "progresif" menyebutnya "reaksioner." Karl Marx sendiri sepenuhnya yakin bahwa serikat buruh tidak dapat berhasil dalam menaikkan tingkat upah untuk semua pekerja. Doktrin-doktrin Marxian selama bertahun-tahun dengan tegas menentang semua upaya untuk memperbaiki tingkat upah minimum. Mereka menganggap tindakan seperti itu bertentangan dengan kepentingan mayoritas pencari nafkah.

Adalah sebuah ilusi untuk meyakini bahwa pengeluaran pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja bagi para penganggur, yaitu bagi mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan karena serikat pekerja atau kebijakan pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah dibiayai oleh metode noninflasi, yaitu, dengan memajaki warga negara atau dengan meminjam dari publik, ia menghapuskan di satu sisi sebanyak mungkin pekerjaan yang diciptakan di sisi lain. Jika dibiayai oleh inflasi, yaitu, dengan peningkatan uang dan uang kertas yang beredar atau dengan meminjam dari bank komersial, itu mengurangi pengangguran hanya jika upah uang tertinggal di belakang kenaikan harga komoditas, yaitu, jika dan begitu sejauh tingkat upah *riil* turun. Hanya ada satu cara menuju peningkatan tingkat upah riil untuk semua itu ger untuk mendapatkan upah: akumulasi progresif modal baru dan peningkatan metode produksi teknis yang dihasilkan oleh modal baru. Kepentingan kerja yang sesungguhnya bertepatan dengan kepentingan bisnis.

Pendekatan untuk memahami masalah ekonomi tidak terdiri dari asimilasi tanpa pandang bulu atas fakta dan angka yang terputus-putus. Ini agaknya terdiri atas analisis dan pemeriksaan kondisi dengan refleksi yang masuk akal. Yang dibutuhkan di atas segalanya adalah *akal sehat* dan

kejelasan logis. Ke kanan ke bawah hal-hal adalah aturan utama. Jangan menyetujui penjelasan dan solusi yang dangkal. Gunakan kekuatan berpikir dan kemampuan kritis Anda.

Akan menjadi kesalahan besar untuk diyakinkan bahwa rekomendasi studi ekonomi ini bertujuan menggantikan merek propaganda lain untuk propaganda berbagai pemerintah dan pihak. Propaganda adalah salah satu kejahatan birokrasi dan sosialisme terburuk. Propaganda selalu merupakan propaganda kebohongan, kekeliruan, dan takhayul. *Keberanian tidak membutuhkan propaganda apa pun*; itu memegang sendiri. Tanda khas dari kebenaran adalah bahwa itu adalah representasi yang benar dari kenyataan, yaitu, dari keadaan yang ada dan bekerja apakah ada yang mengenalinya atau tidak. Pengakuan dan pernyataan kebenaran adalah suatu kutukan atas segala sesuatu yang tidak benar. Itu dijalankan hanya dengan fakta kebenaran.

Karena itu biarkan nabi palsu melanjutkan. Jangan mencoba meniru kebijakan mereka. Jangan mencoba seperti yang mereka lakukan untuk membungkam dan melarang pembangkang. Para pembohong harus takut akan kebenaran dan karenanya didorong untuk menekan pernyataannya. Tetapi para pendukung kebenaran menaruh harapan mereka pada kebenaran mereka sendiri. Veracity tidak takut pada pembohong. Itu bisa bertahan dengan permohonan mereka. Para propagandis dapat terus menyebarkan dongeng mereka dan untuk mengindoktrinasi kaum muda. Mereka akan gagal dengan menyedihkan.

Lenin dan Hitler tahu betul mengapa mereka menghapuskan kebebasan berpikir, berbicara, dan pers, dan mengapa mereka menutup perbatasan negara mereka dengan segala impor ide dari luar negeri. Sistem

mereka tidak dapat bertahan tanpa kamp konsentrasi, sensor, dan gantungan. Instrumen utama mereka adalah GPU dan Gestapo.

Juara Inggris dari Socialization dan birokratisasi tidak kurang menyadari sepenuhnya dari kaum Bolshevik dan Nazi dari fakta bahwa di bawah kebebasan berbicara dan berpikir mereka tidak akan pernah mencapai tujuan mereka. Profesor Harold Laski terus terang menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan Parlemen diperlukan untuk mengamankan transisi ke sosialisme. Stafford Cripps, kandidat favorit kaum liberal yang berpihak pada diri sendiri untuk Perdana Menteri, telah menyarankan "Undang-Undang Perencanaan dan Pemberdayaan", yang pernah disahkan oleh Parlemen, tidak bisa didiskusikan, apalagi dicabut lagi. Berdasarkan tindakan ini, yang harus sangat umum dan menyerahkan semua "detail" kepada Kabinet, Pemerintah akan diberkahi dengan kekuatan yang tidak dapat dibatalkan. Perintah dan ketetapanannya jangan pernah dipertimbangkan oleh Parlemen; tidak juga harus ada jalan lain ke Pengadilan. Semua kantor harus dijaga oleh "anggota partai yang setia", oleh "orang-orang yang memiliki pandangan sosialis". "Dewan Klerus dan Menteri untuk Kepemilikan Bersama" Inggris menyatakan dalam sebuah pamflet di mana Uskup Bradford menulis kata pengantar bahwa pembentukan sosialisme yang nyata dan permanen mensyaratkan "bahwa semua oposisi fundamental harus dilikuidasi, yaitu, secara politis tidak aktif oleh pencabutan hak, dan diperlukan, dengan pemenjaraan". Profesor Joan Robinson dari Universitas Cambridge, nomor dua setelah Lord Keynes sendiri dalam kepemimpinan sekolah Keynesian, tidak kurang tidak toleran dalam semangatnya untuk mewujudkan sosialisme. Menurutnya "gagasan kebebasan adalah salah satu yang licin." Ini adalah "hanya ketika tidak ada

musuh serius, tanpa atau dalam, bahwa kebebasan penuh berbicara dapat dengan aman diperbolehkan." Robinson tidak hanya takut pada independen gereja-gereja, universitas-universitas, belajar ikatansosial, dan penerbit, tetapi tidak kurang dari teater independen dan masyarakat philharmonic. Semua lembaga seperti itu, dia berpendapat, harus dibiarkan ada hanya "asalkan rezim cukup aman untuk menghadapi risiko kritik." Dan advokat terkemuka kolektivisme Inggris lainnya, JG Crowther, tidak segan-segan memproklamirkan berkat inkuisisi. Sayang sekali Stuart tidak hidup menyaksikan kemenangan prinsip-prinsip mereka!

Jadi pendukung sosialisme yang paling terkemuka secara implisit mengakui bahwa prinsip dan rencana mereka tidak tahan kritik ilmu ekonomi dan ditakdirkan di bawah rezim kebebasan.

Tetapi karena dengan bahagia masih ada beberapa negara bebas yang tersisa, masih ada beberapa harapan untuk kebangkitan kebenaran.

Warga Biasa vs Propaganda Profesional Birokratisasi

Tujuan dari mempopulerkan studi ekonomi bukanlah untuk menjadikan setiap orang seorang ekonom. Identy adalah untuk membekali warga negara untuk fungsi sipilnya dalam kehidupan masyarakat.

Konflik antara kapitalisme dan totaliterisme, yang menjadi akibat nasib peradaban, tidak akan diputuskan oleh perang sipil dan revolusi. Itu adalah perang gagasan. Opini publik akan menentukan kemenangan dan kekalahan.

Di mana pun dan kapan pun pria bertemu untuk membahas urusan apa pun dari kotamadya, negara bagian, atau bangsa mereka, opini publik sedang dalam proses untuk berkembang dan berubah, betapapun sepele topik yang segera dibahas mungkin. Opini publik dipengaruhi oleh

apa pun yang diucapkan atau dilakukan dalam transaksi antara pembeli dan penjual, antara pengusaha dan karyawan, antara kreditor dan debitor. Opini publik dibentuk dalam debat berbagai badan perwakilan, komite dan komisi yang tak terhitung jumlahnya, asosiasi dan klub, oleh editorial dan surat kepada editor, oleh permohonan pengacara dan oleh pendapat hakim.

Dalam semua diskusi ini para profesional memiliki keunggulan dibandingkan orang awam. Peluangnya selalu berpihak pada mereka yang mengabdikan semua upaya mereka secara eksklusif untuk satu hal saja. Meskipun tidak harus ahli dan sering tentu tidak lebih pintar dari amatir, mereka menikmati manfaat dari menjadi spesialis. Teknik eristik mereka serta pelatihan mereka lebih unggul. Mereka datang ke pertemuan itu dengan pikiran dan tubuh yang tenang, tidak lelah setelah bekerja seharian seperti para amatir.

Sekarang, hampir semua profesional ini adalah pendukung kuat birokratisasi dan sosialisme. Ada, pertama-tama, tuan rumah pegawai pemerintah dan berbagai kantor propaganda. Lebih jauh lagi, para pengajar dari berbagai lembaga pendidikan yang dengan penuh rasa ingin tahu menganggap pengakuan radikalisme birokratis, sosialis, atau Marxis sebagai tanda kesempurnaan ilmiah. Ada editor dan kontributor surat kabar dan majalah "progresif", pemimpin dan pengurus serikat buruh, dan akhirnya mengangkat orang-orang ambisius yang ingin masuk ke berita utama dengan ekspresi pandangan radikal. Pengusaha, pengacara, atau pencari nafkah biasa tidak cocok dengan mereka.

Orang awam dapat dengan gemilang berhasil membuktikan argumennya. Tidak ada gunanya. Untuk musuhnya, berpakaian dengan

martabat penuh dari kantornya atau jabatan profesornya, berteriak: "Kekeliruan dari alasan pria itu sudah lama tidak diungkapkan oleh para profesional Jerman yang terkenal, Mayer, Müller, dan Schmid. Hanya orang idiot yang masih bisa berpegang teguh pada ide-ide kuno dan untuk dilakukan". Orang awam didiskreditkan di mata penonton, sepenuhnya percaya pada infalibilitas profesional. Dia tidak tahu bagaimana menjawab. Dia belum pernah mendengar nama-nama profesor Jerman terkemuka ini. Dengan demikian ia tidak tahu bahwa buku-buku mereka adalah humbug sederhana, penuh omong kosong, dan bahwa mereka tidak menyentuh masalah yang ia kemukakan. Dia mungkin mempelajarinya nanti. Tetapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa ia telah dikalahkan di tempat.

Atau orang awam dapat secara cerdas menunjukkan ketidakpraktisan dari beberapa proyek yang disarankan. Kemudian profesional menjawab: "Pria ini sangat bodoh karena tidak tahu bahwa skema yang diusulkan berhasil dengan sangat baik di Swedia sosialis dan di Wina *merah*." Sekali lagi orang awam kita dibungkam. Bagaimana dia bisa tahu bahwa hampir semua buku berbahasa Inggris di Swedia dan Wina adalah produk propaganda yang sangat merusak fakta? Dia belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi yang benar dari sumber aslinya.

Klimaks dari pidato profesional itu, tentu saja, selalu menjadi rujukan ke Rusia, surga para pekerja dan petani. Selama hampir tiga puluh tahun hanya komunis fanatik dan sesama pelancong yang diizinkan memasuki Rusia. Laporan mereka adalah pemujaan Soviet yang tidak kritis, beberapa dari mereka benar-benar tidak jujur, sisanya kekanak-kanakan dalam kepercayaan mereka yang naif. Ini adalah salah satu fakta paling

menghibur bahwa beberapa pelancong ini meninggalkan Rusia dengan kecenderungan pro-Soviet dan, di negara asalnya, menerbitkan akun-akun yang tidak dipernis. Tetapi para profesional dengan mudah membuang buku-buku ini dengan menyebut penulis mereka "Fasis."

Yang dibutuhkan adalah membuat para pemimpin sipil cocok untuk pertemuan seperti itu dengan para pengkhotbah birokrasi dan sosialisasi yang profesional. Tidak ada harapan untuk menghentikan kecenderungan ke arah birokratisasi hanya dengan tekanan kemarahan dan pemujaan nostalgia masa lalu yang indah. Masa lalu ini tidak begitu baik seperti yang terlihat oleh beberapa penipu sementara kita. Apa yang hebat di dalamnya adalah ketergantungan mereka pada kecenderungan ke arah perbaikan yang melekat dalam sistem ekonomi pasar yang tidak terhalang. Mereka tidak percaya pada keserupaan dengan pemerintah. Inilah kemuliaan mereka.

Hasil paling buruk dari penolakan rata-rata warga negara terhadap masalah serius dengan masalah ekonomi adalah kesiapannya untuk mendukung program kompromi. Dia memandang konflik antara kapitalisme dan sosialisme seolah-olah pertengkaran antara dua kelompok — buruh dan modal — yang masing-masing mengklaim sendiri seluruh masalah yang dipermasalahkan. Karena dia sendiri tidak siap untuk menilai manfaat dari argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak, dia pikir itu akan menjadi solusi yang adil untuk mengakhiri perselisihan dengan pengaturan damai: Setiap pengadu harus memiliki bagian dari klaimnya. Dengan demikian program campur tangan pemerintah dengan bisnis memperoleh mastabat. Seharusnya tidak ada kapitalisme penuh atau sosialisme penuh, tetapi ada sesuatu di antaranya, jalan tengah. Sistem ketiga ini, tegas para

pendukungnya, harus diatur oleh kapitalisme dan diatur oleh campuran pemerintah dengan bisnis. Tetapi intervensi pemerintah ini seharusnya tidak berarti kontrol penuh pemerintah atas semua kegiatan ekonomi; itu harus dibatasi pada penghapusan beberapa ekresi kapitalisme yang secara khusus tidak dapat diterima tanpa menekan aktivitas pengusaha secara keseluruhan. Dengan demikian tatanan sosial akan menghasilkan yang diduga jauh dari kapitalisme penuh sebagaimana dari sosialisme murni dan, sambil mempertahankan keunggulan yang melekat dalam masing-masing dua sistem ini, akan menghindari kerugiannya. Hampir semua orang yang tidak tanpa syarat menganjurkan dukungan sosialisme penuh sistem ini interventionisme hari ini dan semua pemerintah yang tidak secara langsung dan pro-sosialis telah menganut kebijakan intervensi ekonomi. Saat ini sangat sedikit yang menentang segala bentuk campuran pemerintah dengan harga, tingkat upah, suku bunga, dan keuntungan dan tidak takut untuk berpendapat bahwa mereka menganggap kapitalisme dan perusahaan bebas satu-satunya sistem yang dapat dijalankan, bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan untuk semua anggotanya.

Namun, alasan para pendukung solusi tengah ini sepenuhnya keliru. Konflik antara sosialisme dan kapitalisme bukanlah perjuangan antara dua pihak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dalam dividen sosial. Untuk melihat masalah ini dengan cara yang sama dengan penerimaan penuh terhadap ajaran Marxis dan sosialis lainnya. Musuh sosialisme menyangkal bahwa kelas atau kelompok mana pun akan lebih baik di bawah sosialisme daripada di bawah kapitalisme langsung. Mereka menentang tesis bahwa pekerja akan lebih baik dalam persemakmuran

sosialis dan, akibatnya, dianiaya oleh keberadaan sistem kapitalis. *Mereka tidak merekomendasikan kapitalisme demi kepentingan egois para wirausahawan dan kapitalis tetapi untuk semua anggota masyarakat.* Besar konflik historis mengenai masalah social organisasi ekonomi ini tidak dapat ditangani dengan seperti pertengkaran antara dua pengusaha mengenai sejumlah uang; itu tidak dapat diselesaikan dengan memisahkan perbedaan.

Intervensionisme ekonomi adalah kebijakan yang merugikan diri sendiri. Langkah-langkah individu yang berlaku tidak mencapai hasil yang dicari. Mereka membawa keadaan, yang —dari sudut pandang advokat mereka sendiri — jauh lebih tidak diinginkan daripada keadaan sebelumnya yang cenderung mereka ubah. Pengangguran sebagian besar dari mereka yang siap mendapatkan upah, berkepanjangan tahun demi tahun, monopoli, krisis ekonomi, hambatan umum produktivitas usaha ekonomi, nasionalisme ekonomi, dan perang adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari campur tangan pemerintah dengan bisnis sebagai direkomendasikan oleh para pendukung solusi ketiga. Semua kejahatan yang disalahkan kaum sosialis atas kapitalisme adalah produk kebijakan malang yang konon "progresif" ini. Peristiwa cata strophic yang menjadi inti bagi pabrik sosialis radikal adalah hasil dari ide-ide mereka yang mengatakan: "Saya tidak menentang kapitalisme, tetapi. . ." Orang-orang semacam itu pada dasarnya adalah pembuat alat sosialisasi dan birokratisasi menyeluruh. Ketidaktahuan mereka menyebabkan bencana.

Pembagian kerja dan spesialisasi adalah fitur penting dari peradaban. Tetapi meski menjadi sebuah hal yang penting bagi mereka, kemakmuran materi

dan kemajuan intelektual tidak menjadi kemungkinan. Keberadaan kelompok ilmuwan, cendekiawan, dan pekerja penelitian yang terintegrasi adalah hasil dari pembagian kerja seperti halnya keberadaan kelas spesialis lainnya. Pria yang berspesialisasi dalam ekonomi adalah spesialis seperti semua spesialis lainnya. Kemajuan lebih lanjut dari ilmu ekonomi di masa depan juga akan menjadi pencapaian manusia mencurahkan semua upaya mereka untuk tugas ini.

Tapi itu akan menjadi kesalahan yang menentukan bagi warga negara untuk meninggalkan keprihatinan dengan studi ekonomi kepada para profesional sebagai domain eksklusif mereka. Karena isu-isu utama dari politik saat ini adalah bersifat ekonomi, maka penolakan semacam itu sama saja dengan pengabdian warga secara total demi keuntungan para profesional. Jika pemilih atau anggota parlemen dihadapkan pada masalah yang diangkat oleh undang-undang tentang pencegahan penyakit ternak atau pembangunan gedung kantor, mereka dapat menyerahkan pembahasan rinciannya kepada para ahli. Masalah dokter hewan dan teknik seperti itu tidak mengganggu fundamental kehidupan sosial dan politik. Mereka penting tetapi tidak utama dan vital. Tetapi jika tidak hanya massa tetapi bahkan sebagian besar perwakilan terpilih mereka menyatakan: "Masalah moneter ini hanya dapat dipahami oleh spesialis; kami tidak memiliki kecenderungan untuk mempelajarinya; dalam hal ini kita harus mempercayai para ahli," mereka hampir menyerahkan kedaulatan mereka kepada para profesional. Tidak masalah apakah mereka secara resmi mendelegasikan kekuatan mereka untuk membuat undang-undang atau tidak. Bagaimanapun para spesialis melebihi mereka. Birokrat melanjutkan.

Warga biasa salah dalam mengeluh bahwa para birokrat telah merebut kekuasaan; mereka sendiri dan mandatory mereka telah meninggalkan kedaulatan mereka. Mereka sayag norange dari probl mendasar ems ekonomi telah membuat spesialis profesional tertinggi. Semua perincian teknis dan yuridis dari undang-undang dapat dan harus diserahkan kepada para ahli. Tetapi demokrasi menjadi tidak praktis jika warga negara yang terkemuka, para pemimpin intelektual masyarakat, tidak berada dalam posisi untuk membentuk pendapat mereka sendiri tentang prinsip-prinsip dasar sosial, ekonomi, dan politik kebijakan. Jika warga berada di bawah hegemoni intelektual para profesional birokrasi, masyarakat terbagi menjadi dua kasta: para profesional yang berkuasa, para Brahmana, dan warga negara yang mudah tertipu. Kemudian despotisme muncul, apa pun kata-kata konstitusi dan hukum.

Demokrasi berarti penentuan nasib sendiri. Bagaimana orang dapat menentukan urusan mereka sendiri jika mereka terlalu acuh untuk mendapatkan melalui pemikiran sendiri penilaian independen pada masalah-masalah politik dan ekonomi mendasar? Demokrasi bukanlah hal baik yang bisa dinikmati orang tanpa masalah. Sebaliknya, itu adalah harta yang harus dipertahankan dan ditaklukkan setiap hari dengan upaya yang keras.

Bab VIII

Birokrasi Perwujudan Bela Negara

Bab ini akan menjelaskan mengenai konsepsi birokrasi dan bela negara. Dua konsep ini merupakan hal yang beda sama sekali, namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Hubungan dua konsep tersebut bisa diibaratkan sebagai keping mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebagai alat tukar, keping mata uang tersebut tidak akan bernilai ketika dua sisi tersebut terpisah dan begitu sebaliknya. Analogi dalam memberi makna birokrasi dan bela negara tersebut menunjukkan betapa kedua konsep tersebut saling berkaitan. Bagian ini akan diawali dengan menyajikan kedua konsep tersebut secara parsial sehingga bisa dipahami masing-masing konsep tersebut dalam tataran pemahaman sebagai sebuah ilmu ataupun pengetahuan. Selanjutnya akan dikemukakan pada bagian ini kaitan birokrasi dan bela negara dalam perspektif praktis. Bab ini akan diakhiri dengan sebuah simpulan mengenai pentingnya birokrasi dan bela negara.

Konsep Birokrasi

Dalam banyak perbincangan ilmu administrasi dan politik tentang konsep birokrasi, terdapat penerimaan mengenai pengertian birokrasi. Setidaknya terdapat tujuh pengertian konsep tentang birokrasi (Albrow, 1989), yaitu: 1) Birokrasi sebagai Organisasi Rasional, 2) Birokrasi sebagai inefisiensi Organisasi, 3) Birokrasi sebagai Kekuasaan yang dijalankan oleh Pejabat, 4) Birokrasi sebagai Administrasi Negara (Publik), 5) Birokrasi sebagai Administrasi yang dijalankan oleh Pejabat, 6) Birokrasi sebagai Sebuah Organisasi, dan 7) Birokrasi sebagai Masyarakat Modern.

Dari berbagai macam pengertian yang sering muncul dalam terminology birokrasi, dapat disistematisasikan dalam tiga kategori, yaitu: *pertama*, birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional (*bureau-rationality*) seperti terkandung dalam dalam pengertian *Hegelian Bureaucracy* dan *Weberian Bureaucracy*; *kedua*, birokrasi dalam pengertian sebagai suatu penyakit (*bureau pathology*) seperti diungkap oleh Karl Marx, Laski, Robert Michels, Donald P. Warwick, Michael Crocier, Fred Luthan, dan sebagainya; dan *ketiga*, birokrasi dalam pengertian netral (*value-free*), artinya tidak terkait dengan pengertian baik atau buruk. Dalam pengertian netral ini birokrasi dapat diartikan sebagai: keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar (*every big organization is bureaucracy*)(Santoso, 1997).

Selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan pandangan para penganut *bureau-rationality* maupun *bureau-pathologi* serta dalam pengertian *value-free*. Pertama-tama akan dibahas dialektika pemikiran Hegel, Marx dan Weber (Giddens,1985).

Hegel berpendapat, kalau warga dari sebuah negara dibiarkan mengatur dirinya sendiri, maka akan terjadi kekacauan karena masing-masing warga akan memperjuangkan kepentingan subyektifnya melawan kepentingan subyektif warga lainnya. Ini adalah tesis dan antithesis yang sintesisnya ditemui dalam perwujudan lembaga negara. Negara bagi Hegel merupakan penjelmaan kepentingan umum masyarakat. Kepentingan umum ini sebenarnya merupakan kepentingan warga juga, bukan sesuatu yang asing di luar individu tiap-tiap warga negara. Dengan mengikuti kepentingan umum, warga sebenarnya juga sedang membela kepentingan

sendiri. Jadi kalau seorang warga patuh pada negara, orang ini sebenarnya melawan kepentingan personalnya yang subyektif. Karena bagi Hegel dalam Budiman (1982:5) negara merupakan “penjelmaan dari kebebasan rasional yang menyatakan dan mengenali dirinya dalam bentuk yang kongkrit dan obyektif. Dengan demikian negara merupakan sebuah lembaga yang mengatasi dan lebih sempurna dari masyarakat. Kesempurnaan dan kekuatannya terletak di dalam kesatuan dari tujuannya yang universal dengan kepentingan khusus dari masing-masing warga, di dalam kenyataan bahwa para warga punya kewajiban-kewajiban terhadap negara dengan hak-hak yang mereka peroleh sebagai warga dari negara tersebut(ibid,hlm.6).

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Hegel beranggapan negara secara apriori melayani kepentingan umum, karena ia merupakan sintesis dari pertentangan-pertentangan individu yang subyektif dan tidak rasional. Dalam kenyataannya kebijaksanaan-kebijaksanaan negara seringkali hanya menguntungkan sekelompok orang dalam masyarakat. Oleh karenanya menurut Tjokrowinoto (1990) perlu adanya struktur yang menjembatani antara *The State* yang merefleksikan kepentingan umum, dan *civil-society* yang terdiri dari pelbagai kepentingan khusus dalam masyarakat. Inilah inti konsep Hegelian Bureaucracy, yaitu melihat birokrasi sebagai institusi yang menjembatani antara “negara” yang memmanifestasikan kepentingan umum dan “*civil-society*” yang memmanifestasikan kepentingan khusus dalam masyarakat.

Pendapat di atas dibantah oleh Karl Marx. Ia berpendapat bahwa negara hanyalah alat dari kelas yang berkuasa yakni kelas bangsawan di negara feodal dan kelas kapitas di negara kapitalis. Marx melontarkan kritik

terhadap pemikiran Hegel yang dianggap abstrak, yang hanya bermain dengan logika dan kemudian mau memaksakan kesimpulan-kesimpulan logika abstrak itu ke dalam kenyataan empiris. Menurut Marx, Hegel melakukan kesalahan metodologis. Seharusnya ide diperoleh dan diangkat dari kenyataan empiris bukan sebaliknya. Karena itu, Hegel bukan melahirkan sebuah analisa tentang lembaga-lembaga tersebut (Budiman, 1982). Bagi Marx, birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitir kelas proletar. Birokrasi adalah parasite yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas proletar tadi. Karena eksistensi birokrasi terkait dengan "kelas", maka setelah terjadi revolusi sosial yang memporak-porandakan kelas-kelas sosial dan terciptanya *classes society* bersamaan dengan itu akan lenyaplah birokrasi (Tjokrowinoto, 1990).

Berbeda dengan Karl Marx, Weber membahas birokrasi dalam kerangka teori mengenai "*authority*" dan "*domination*". Konsep "*authority*" dan "*domination*" membicarakan hubungan kekuasaan yang menyangkut kemampuan dari orang yang berkuasa untuk memaksakan kehendaknya kepada orang yang dikuasai lepas dari pertimbangan apakah orang yang dikuasai tadi suka atau tidak suka. Konsep tersebut menyangkut hubungan kekuasaan, akan tetapi dalam hubungan kekuasaan ini orang yang berkuasa menyadari haknya untuk menggunakan kekuasaannya dan orang yang dikuasai menyadari kewajibannya untuk tunduk pada kekuasaan tadi. Weber membagi "*authority*" dan "*domination*" menjadi tiga, yaitu: tradisional, karismatik, dan legal-rational. Setiap bentuk dominasi ini berpangkal pada sumber legitimasi yang berbeda, dengan aparat administrasi yang berbeda-beda pula.

Sumber legitimasi bagi dominasi tradisional adalah waktu. Dominasi jenis ini bersandar pada *establish belief in the sanctity of immemorial traditions and the legitimacy of the status of those exercising authority under them*(Weber, 1947) (Membangun kepercayaan pada kesucian tradisi-tradisi masa lampau dan legitimasi atas status penggunaan kewenangan di bawah mereka). Aparat administrasinya adalah “kerabat kerja”. Sedangkan dominasi kharismatik berpangkal pada sumber legitimasi yang lain, yakni kepribadian yang luar biasa yang dimiliki pemimpin. Bentuk dominasi ini bersandar pada *devotion to the specific and exceptional sanctity, heroism or exemplary character of an individual person, and the normative patterns or order revealed ordained by him*(Weber,1947)(Ketaatan pada kesucian yang luar biasa dan istimewa, sifat-sifat kepahlawanan atau keteladanan dari person individu, dan pola-pola normative atau ungkapan tata cara yang ditasbihkan olehnya). Aparat administrasinya adalah *disciples* (murid-murid yang setia). Akhirnya legitimasi bagi dominasi legal-rasional bersumber pada perangkat aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dijunjung tinggi. Jadi dominasi legal rasional bersandar pada *the legality of patterns of normative rules and the right of those elevated to authority under such rules to issue commands* (Weber, 1947) (pola-pola legal atas aturan-aturan normative dan ketepatan dalam pengangkatan wewenang atas dasar berbagai peraturan resmi). Aparat administrasinya adalah “birokrasi”. Bagi Weber, birokrasi inilah yang merupakan unsur terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Selain itu menurut Weber, organisasi tidak lebih merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu perhatiannya tertuju pada struktur yang diatur secara normative dan mekanisme untuk mempertahankan

struktur itu. Hal ini merupakan unsur “formal” yang menjadi ciri khas dari karya Weber dengan *ideal type of bureaucracy-nya* (Etzioni, 1982).

Selain mengandung pengertian bureau-rationality seperti dijelaskan dalam konsep *Hegelian Bureaucracy* dan *Weberian Bureaucracy*, birokrasi juga diartikan dalam pengertian *bureau-pathology* seperti diungkap dalam konsep Marxian Bureaucracy. Dalam pengertian *bureau-pathology*, birokrasi juga selalu dikaitkan dengan kelambanan kerja dan prosedur yang berbelit-belit. Seringkali birokrasi dianggap sebagai organisasi yang kejam yang mempunyai peraturan yang aneh-aneh, dan sewenang-wenang dan menindas (Luthans, 1973) Bahkan Laski mencatat, bahwa birokrasi merupakan suatu system pemerintahan dimana kekuasaan ada pada pejabat-pejabat negara yang diselenggarakan sedemikian rupa sehingga merugikan atau membahayakan warga negara. Sementara itu Robert Michels melihat birokrasi sebagai suatu struktur yang mesti mengambil bentuk oligarkhi. Oleh karenanya pandangan ini sering disebut sebagai *Iron Law of Oligarkhi*, hukum besi dari oligarkhi (Michels, 1984). Pengertian birokrasi yang buruk juga dicatat oleh Crozier dalam penelitiannya tentang birokrasi di Perancis, yaitu *a bureaucratic organization....an organization that cannot correct its behavior by learning from its errors* (Crozier, 1964) (organisasi birokratik...adalah suatu organisasi yang tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya dengan cara belajar dari kesalahan-kesalahan). Gencarnya kritik yang ditujukan pada organisasi birokrasi ini terkandung maksud, bahwa *type of bureaucracy* sebagaimana dikemukakan Weber sulit dijumpai dalam tataran realitas.

Seperti dikemukakan bahwa birokrasi juga dapat diartikan dalam pengertian *value-free*, yaitu dalam pengertian yang terbatas dan tidak

terkait pengertian baik dan buruk. Pengertian yang terbatas ini sejalan dengan istilah governmental bureaucracy sebagaimana dikatakan oleh Almond dan Powell (1966) bahwa “ *The governmental bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, linked in a complex grading subordinates to the formal role-makers*”.(Birokrasi pemerintahan adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal (*role-makers*)).

Sedang pengertian lainnya dari birokrasi seperti dikemukakan Castles (1976) dalam suatu uraian tentang birokrasi di Indonesia bahwa “*Bureaucracy I mean the salaried people who are charged with the function of government. The army officers, the military bureaucracy, are of course included*” (Birokrasi saya maksudkan sebagai orang-orang yang bergaji yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Tentu saja termasuk didalamnya adalah para pejabat tentara dan birokrasi militer). Senada dengan yang dikemukakan Castles; La Palombara (1967:49) memberikan pengertian birokrasi dalam arti “birokrat”, yaitu: *The bureaucrats of major interest to us are generally those who occupy managerial roles, who are in some, directives capacity either in central agencies or in the field, who are generally described in the language of public administration as ‘middle’ or ‘top’ management.* (Birokrat yang paling penting bagi kita adalah mereka yang pada umumnya menduduki peran manajerial, yang mempunyai kapasitas memerintah baik di badan-badan sentral maupun di lapangan, yang pada umumnya digambarkan dalam Bahasa Administrasi Negara sebagai manajemen “menengah” atau “atas”.

Mendasarkan pada beberapa pengertian tentang birokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud birokrasi dalam konteks pembahasan ini bisa menunjuk pada pengertian sebagai “birokrat”; sebagai “suatu system administrasi yang dijalankan oleh pejabat”; maupun sebagai “suatu organisasi pemerintahan yang pada hakekatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat.”

Pengertian Bela Negara.

Dalam banyak pemahaman di masyarakat konsep bela negara seringkali dimaknai sebagai hal atau aktivitas yang berbau militerisme seperti misalnya panggul senjata, wajib militer, perang dan sejenisnya. Pemahaman ini sebenarnya tidak salah karena hal ini memang merupakan sebagian dari ruang lingkup aktivitas bela negara. Konsep bela negara memiliki pengertian yang sangat luas dan implementasinya masuk pada spectrum yang luas dalam semua aspek kehidupan baik personal maupun nasional.

Bela negara menurut Wikipedia adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Pengertian lebih lanjut tentang bela negara adalah seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada penjelasan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara ini, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan

kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Mendasarkan pada pengertian di atas menunjukkan bahwa bela negara memiliki cakupan pengertian yang luas. Secara fisik, hal tersebut bisa mempunyai arti sebagai upaya pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam eksistensi negara tersebut, sedangkan menurut non-fisik konsepsi ini diterjemahkan sebagai usaha untuk ikut serta berperan aktif terhadap kemajuan bangsa dan negara, dari moral, sosial, pendidikan ataupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

Fungsi Bela Negara

Bela negara sebagai suatu sikap dan perilaku tidaklah begitu saja muncul menjadi kesadaran setiap warga negara sejak lahir, sehingga perlu ditumbuhkembangkan sejak dini serta senantiasa dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan melalui pembinaan kesadaran bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara ini menjadi bagian penting dari strategi bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diperoleh melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan, tidak dapat dilepaskan dari peran kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Negara dan Bangsa Indonesia mengerahkan segenap daya upayanya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rakyat Indonesia bersama-sama berupaya mencapai tujuan nasional tersebut guna meraih cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut dibutuhkan suatu strategi nasional guna menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional. Setiap negara perlu memiliki strategi nasional, mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif berupa peluang, namun juga dapat berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) atau yang dikenal sebagai hakikat ancaman bagi negara Indonesia.

Memperhatikan ancaman yang senantiasa dihadapkan pada bangsa Indonesia ini, maka kesadaran bela negara setiap warga negara perlu disiagakan dan terus dikembangkan, karena bela negara ini menjadi kewajiban setiap warga negara. Hal ini seperti diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Lebih lanjut tentang bagaimana warga negara dalam mengimplementasikan keikutsertaannya dalam bela negara diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara dinyatakan dalam pasal 9 ayat (2) bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui :

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Mendasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat disarikan fungsi bela negara antara lain yaitu:

- a. Sebagai penjaga keutuhan wilayah negara;
- b. Sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman;
- c. Adalah panggilan sejarah;
- d. Sebagai kewajiban masing-masing warga negara

Tujuan Bela Negara

Kesadaran bela negara pada hakekatnya adalah kesediaan berbakti kepada negara dan berkorban membela negara. Upaya untuk mewujudkan kesadaran ini bukanlah hal yang mudah terlebih kepada masyarakat yang masih belum memiliki persepsi yang sama tentang pemahaman konsep bela negara. Terkait dengan hal ini, maka ada pertanyaan mendasar tentang bela negara yang perlu dijawab guna lebih memahami makna dari bela negara itu sendiri. *Pertama*, "Apa yang harus dibela dari negara?". UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 menyebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pasal tersebut menunjukkan bahwa yang harus dibela adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. *Kedua*, "Mengapa negara harus dibela?". Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang terkadang berbenturan antara negara satu dan lainnya. Kondisi tersebut membuat negara perlu survive mengingat semakin kuatnya persaingan dan tidak ada yang dapat

menjamin bahwa sebuah negara akan tetap selamanya ada atau tetap berdiri. Untuk itu, agar tetap hidup, negara harus dibela dan dilindungi dari berbagai macam bentuk ancaman. *Ketiga*, “Siapa yang harus membela negara?”. Tugas membela negara tidak bisa hanya digantungkan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) semata, apalagi harus diserahkan bangsa lain. Sungguh, bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik (suprastruktur dan infrastruktur politik) (Anonim, Wira:2017)

Mendasarkan pada uraian di atas, dapat dikemukakan secara ringkas tujuan bela negara adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara
- b. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara
- c. Melaksanakan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- d. Melestarikan budaya bangsa
- e. Melakukan perbuatan yang paling baik untuk bangsa dan negara

Birokrasi dan Bela Negara

Pada bagian ini akan disajikan birokrasi dan bela negara sebagai dua konsepsi yang saling berhubungan dan bahkan tidak mungkin dipisahkan. Birokrasi dalam pembahasan ini bisa dimaksudkan secara bergantian sebagai organ (institusi), administrasi yang dijalankan pejabat, maupun dalam pengertian sebagai aparat/birokrat. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa keikutsertaan warga negara dalam menunaikan kewajibannya dalam bela negara diantaranya bisa dilakukan melalui pengabdian sesuai profesi. Hal ini mengandung pengertian bahwa warga negara yang berprofesi sebagai aparat pemerintah atau disebut birokrasi (La Palombara,1967) ataupun sebutan lain saat ini yaitu Aparatur Sipil

Negara (ASN) adalah merupakan salah satu profesi bagi pengabdianya dalam bela negara.

Pembahasan birokrasi dalam kaitan dengan bela negara ini akan dijelaskan dari sudut pandang structural artinya adalah bahwa birokrasi dalam bekerja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang mengikat mereka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Diantara landasan yang menjadi sandaran birokrasi dalam bekerja adalah tingkat kepatuhannya pada kode etik sebagai anggota Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Pada setiap kesempatan tertentu terutama saat upacara peringatan hari-hari nasional seringkali kode etik Aparatur Sipil Negara yang diberi nama Sapta Prasetya KORPRI selalu dibacakan. Adapun substansi Sapta Prasetya KORPRI adalah sebagai berikut:

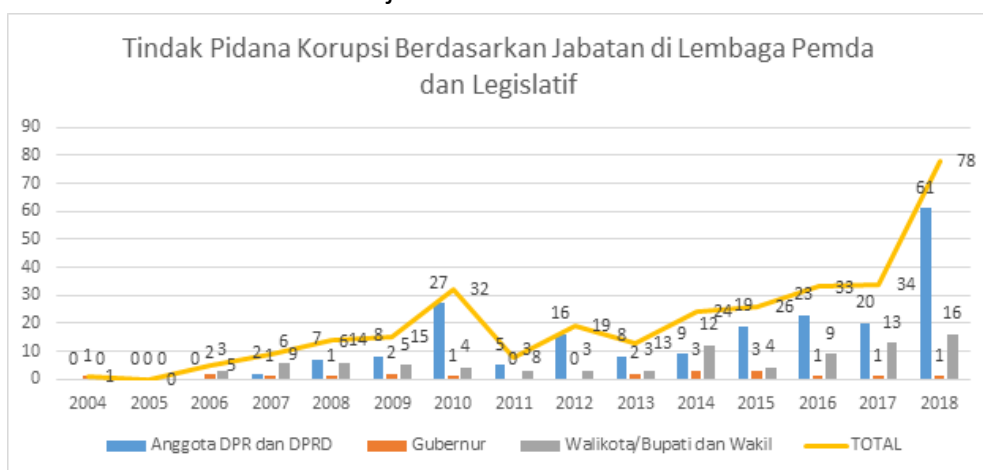
1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia negara;
3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korp Pegawai Republik Indonesia;
5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Terdapat pesan moral dalam kode etik tersebut yang wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan, sebab jika tidak maka oknum ASN tersebut akan berhadapan dengan hukum. Dalam konteks bela negara, substansi dari kode etik tersebut merupakan sikap dan perilaku yang berorientasi bela negara. Namun demikian, meskipun kode etik ini sering dibacakan dan

diperdengarkan namun faktanya tidak sedikit oknum ASN tersebut melakukan pelanggaran.

Permasalahan umum yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini antara lain adalah masih terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan masih banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Fungsi utama birokrasi sebagai lembaga pengabdian dan pelayanan masyarakat seringkali tidak terwujud secara optimal. Bahkan kinerja birokrasi sering mengalami disorientasi, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja aparatur, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Hasil kajian Litbang Kompas tahun 2018 memberikan informasi yang factual mengenai disorientasi tugas pokok birokrasi tersebut, yaitu perilaku koruptif yang masif. Banyak Kepala Daerah seperti Gubernur, Walikota ataupun Bupati dan jajaran di bawahnya yang tersandung kasus korupsi ini, bahkan perilaku ini ada kecenderungan mengalami peningkatan, hal ini seperti nampak dalam gambar di bawah ini.

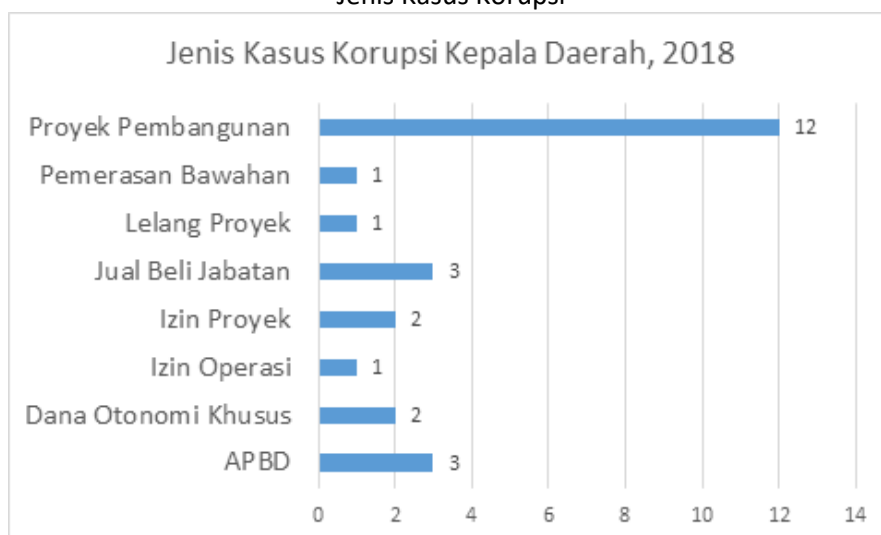
Gambar 1.
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jabatan
Sejak 2004 – Juni 2018



Sumber: KPK 2018

Berdasarkan analisis terhadap data tahun 2018, terbanyak dari kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah suap terkait proyek pembangunan, baik pembangunan infrastruktur milik pemda maupun swasta (12 kasus). Berikutnya adalah kasus jual beli jabatan, alokasi APBD, dana otonomi khusus, izin proyek, dan izin operasi. Lainnya yaitu lelang proyek, dan pemerasan terhadap bawahan. Secara sederhana disampaikan jenis kasus korupsi pada gambar di bawah ini.

Gambar 2
Jenis Kasus Korupsi



Sumber: KPK 2018

Disoptimalisasi dan disorientasi birokrasi terhadap tugas pokoknya itu disebabkan oleh banyak factor, baik yang ada dalam internal institusi birokrasi sendiri maupun factor yang ada di lingkungan dimana birokrasi berada. Faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan birokrasi bergerak lambat, tidak efisien, berbelit-belit, boros, tidak memiliki standar kepastian kerja yang baik, dan pada akhirnya tidak disukai oleh masyarakat sebagai pengguna jasanya (*costumers*).

Perilaku birokrasi seperti dijelaskan di atas mengindikasikan rendahnya sikap dan perilaku bela negara, mereka bekerja masih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dari pada kepentingan masyarakat. Orientasi bekerja yang masih mencari dan mengejar manfaat ekonomi untuk kepentingan pribadi. Orientasi tugas yang seharusnya melayani masyarakat menjadi mengeksploitasi masyarakat, melindungi menjadi menindas, membimbing menjadi menyesatkan adalah merupakan sikap dan perilaku yang kontraproduktif dengan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara.

Sikap dan perilaku yang sejalan dengan semangat bela negara itu adalah sikap dan perilaku birokrasi yang didasari oleh nilai-nilai bela negara sebagai berikut:

1. Cinta Tanah Air;
2. Sadar Berbangsa dan Bernegara;
3. Yakin terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara;
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara; dan
5. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.

Nilai-nilai bela negara tersebut mengandung maksud sebagai berikut:

Pertama, Nilai Cinta Tanah Air, yaitu mengenal, memahami dan mencintai wilayah nasional; menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia; melestarikan dan dan mencintai lingkungan hidup; memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara; menjaga nama baik bangsa dan negara serta bangga sebagai Bangsa Indonesia dengan cara waspada dan siap membela tanah air terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara baik dari dalam maupun luar negeri.

Kedua, Nilai Sadar Berbangsa dan Bernegara; yaitu dengan membina kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil atau keluarga; lingkungan masyarakat; lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja; mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri; mengakui, menghargai dan menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia raya; menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Ketiga, Nilai Yakin kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara, yaitu memahami hakekat atau nilai-nilai dalam Pancasila; melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara serta yakin pada kebenaran Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Keempat, Nilai Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara; siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman; berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara; gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan; dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.

Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara baik secara fisik dan psikis. Secara fisik, yaitu memiliki kondisi kesehatan, ketrampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bina secara psikis dengan cara gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Sedang secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual serta intelegensia; senantiasa

memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji.

Memperhatikan fenomena sikap dan perilaku birokrasi yang tidak sejalan dengan semangat bela negara, maka tidak ada pilihan lain selain meningkatkan kesadaran bela negara bagi segenap aparatur sipil negara melalui upaya-upaya internalisasi nilai-nilai bela negara itu dalam lingkungan birokrasi. Mengingat pentingnya hal ini, pemerintah memiliki komitmen yang tinggi meningkatkan kesadaran dan implementasi bela negara dilingkungan birokrasi dalam upaya meningkatkan semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Komitmen pemerintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Gerakan ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan massif, dan ditujukan kepada : Para Menteri Kabinet Kerja; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Intelejen Negara; Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; Para Gubernur; dan Para Bupati/Walikota.

Bahan Bacaan

Untuk memperkaya pemahaman mengenai birokrasi, silahkan mengakses bahan bacaan tambahan yang kami referensikan sebagai berikut:

- Albrow, Martin .1989. *Birokrasi*. Terjemahan. PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Almond, Gabriel and Bingham Powell.1966. *Comparative Politics Development Approach*, Little Brown Company, Bombay, India, hlm. 95.
- _____.2017. *Bela Negara Dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*. Majalah Wira. 2017. Puskom Publik Kemhan. Jakarta.
- Budiman, Arief. 1982. *"Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan"*. Prisma 7, LP3ES. Jakarta.hlm5
- Castles, Lance.1976. *"Bureaucracy and Society in Indonesia"*, Unpublished Paper.hlm.2
- Crozier, Michael.1964. *The Bureaucratic Phenomenon*, Tavistock Publication, London
- Etzioni, Amitai.1982. *Organisasi-organisasi Modern*, UI Press, Jakarta.
- Garston, Neil. 1993. *Bureaucracy: Three Paradigms*. Los Angeles: Springer Science+Business Media LLC
- Gay, Paul Du. 2005. *The Values of Bureaucracy*.New York: Oxford University Press
- Giddens, Anthony.1985. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Marx Weber*, UI Press. Jakarta
- La Palombara.1967. *Bureaucracy and Political Development*, Princeton,New jersey.hlm.49
- Luthans, Fred.1973. *Organizational Behavior*. Mc.Graw-Hill Book, New York, hlm.106.
- Mises, Ludwig von. 2007. *Bureaucracy*. Indiana: Liberty fund.Inc
- Santoso, Priyo Budi.1997. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1990. *"Birokrasi Pembangunan Masyarakat"*.Makalah pada Seminar Nasional HIPIIS, 16-21 Juli, hlm12.
- Trikha, Rajeshwar. 2009. *Bureaucracy and Public Administration*. Jaipur India: ABD Publisher
- Waber, Marx. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. The Free Press, New York.hlm.328.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional
Bela Negara Tahun 2018-2019.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pembinaan Kesadaran Bela Negara.